SEJARAH INDONESIA, SEJARAH PERAMPASAN

Buku ini menelusuri sejarah Indonesia melalui satu benang merah yang sering disembunyikan: bagaimana pembangunan dan modernitas kerap bergerak bersama praktik perampasan. Dari kolonialisme awal hingga kehidupan digital hari ini, berbagai kekuatan negara, modal, dan institusi pengetahuan mengambil alih ruang hidup masyarakat sambil menyebutnya sebagai kemajuan.

Dengan membaca ulang berbagai periode sejarah, buku ini menunjukkan bahwa perubahan rezim tidak otomatis menghapus pola lama. Tanam paksa, kapitalisme liberal kolonial, proyek pembangunan Orde Baru, hingga neoliberalisme setelah Reformasi, semuanya beroperasi dalam logika yang sama: akumulasi untuk sebagian kecil, biaya sosial untuk banyak orang. Bahasa hukum dan istilah ekonomi yang tampak netral sering kali justru menjadi alat untuk menutupi ketimpangan itu.

Pada akhirnya, buku ini bukan hanya tentang apa yang hilang, tetapi juga tentang daya tahan dan perlawanan. Sejarah diperlakukan bukan sebagai arsip, melainkan sebagai alat untuk membaca ulang masa kini dan membayangkan dunia yang lebih adil. Ia mengajak pembaca mempertanyakan narasi yang selama ini diterima begitu saja, dan melihat siapa sebenarnya yang diuntungkan dari gagasan tentang "kemajuan".

MNC
Media Nusa Creative
Anggota IKAPI (162/JTI/2015)
Bukit Cemara Tidar H5 No. 34 Malang
Telp : 0812 3334 0088
Email : medianusacreative@gmail.com
Website : www.mncpublishing.com

CONTACT US

ISBN 978-634-261-109-8 (PDF)
9 786342 611081

SEJARAH INDONESIA, SEJARAH PERAMPASAN

HIDAYATULLAH RABBANI
MEI SUCIATI

MNC

MNC

SEJARAH INDONESIA, SEJARAH PERAMPASAN

HIDAYATULLAH RABBANI & MEI SUCIATI

SEJARAH INDONESIA, SEJARAH PERAMPASAN

Hidayatullah Rabbani
Mei Suciati

Media Nusa Creative

MNC PUBLISHING
FUTURE BOOKS WITH PASSION
2025

SEJARAH INDONESIA,
SEJARAH PERAMPASAN

Penulis:
Hidayatullah Rabbani
Mei Suciati

Desain Cover & Penata Isi
MNC Publishing

Cetakan Pertama, Desember 2025

Diterbitkan Oleh :
Media Nusa Creative
Anggota IKAPI (162/JTI/2015)
Bukit Cemara Tidar H5 No. 34, Malang
Telp. : 0812.3334.0088
E-mail : medianusacreative@gmail.com
Website : www.mncpublishing.com

ISBN : 978-634-261-108-1
E-ISBN : 978-634-261-109-8 (PDF)

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6)

Media Nusa Creative

PRAKATA

Buku ini lahir dari kegelisahan yang terus tumbuh: mengapa sejarah Indonesia, dari masa kolonial hingga hari ini, selalu dipenuhi janji tentang "kemajuan" tetapi meninggalkan begitu banyak luka dan kehilangan? Mengapa pembangunan yang dikatakan membawa kesejahteraan justru berulang kali menghadirkan perampasan — terhadap tanah, hutan, tenaga, dan bahkan pengetahuan? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi benih dari naskah yang kini Anda pegang ini: Sejarah Indonesia, Sejarah Perampasan.

Kami menulis buku ini dengan keyakinan bahwa sejarah tidak hanya berisi deretan peristiwa, tetapi juga cara pandang — dan cara pandang itu selama ini dikuasai oleh mereka yang berkuasa. Dalam narasi resmi, pembangunan selalu dikisahkan sebagai keberhasilan bangsa, sebagai bukti bahwa Indonesia telah keluar dari "keterbelakangan." Namun di balik kisah itu tersembunyi kenyataan lain, bahwa apa yang disebut pembangunan sering kali berdiri di atas penderitaan dan penghilangan yang sistematis. Bahwa modernitas yang kita rayakan hari ini bertumpu pada fondasi yang rapuh, tanah-tanah yang dirampas, masyarakat adat yang digusur, tenaga kerja yang dieksploitasi, dan cara-cara hidup yang dimusnahkan atas nama kemajuan.

Tujuan utama buku ini bukan sekadar menulis ulang sejarah, melainkan membaca ulang sejarah dari sudut pandang mereka yang dirampas. Ia adalah upaya untuk memperlihatkan bahwa apa yang tampak sebagai perjalanan menuju "kemajuan" sebenarnya merupakan proses panjang *dispossession* — perampasan yang dilegitimasi oleh hukum, oleh wacana pembangunan, dan oleh ideologi modernitas itu sendiri. Buku

Media Nusa Creative

ini ingin mengajak pembaca menyadari bahwa sejarah nasional Indonesia tidak pernah netral, ia selalu merupakan hasil dari pertarungan kekuasaan, dan oleh karena itu harus terus diperdebatkan dan ditulis ulang.

Buku ini juga merupakan percakapan antara teori dan kenyataan. Kami berutang pada banyak pemikir yang memberi bahasa bagi kegelisahan ini, Karl Marx dengan konsep *primitive accumulation*, David Harvey dengan gagasan *accumulation by dispossession*, Immanuel Wallerstein dengan kerangka *world-systems theory*, serta Arturo Escobar dan Tania Li yang membuka jalan untuk memahami pembangunan sebagai bentuk kekuasaan yang memproduksi "keterbelakangan." Namun, buku ini tidak berhenti pada teori. Ia juga berakar pada pengalaman konkret masyarakat di berbagai wilayah Indonesia — dari petani di Jawa yang kehilangan tanahnya, masyarakat adat di Kalimantan dan Papua yang menghadapi ekspansi sawit dan tambang, warga kota yang terusir oleh proyek infrastruktur dan tata ruang neoliberal, hingga warga digital abad-21 yang secara sadar maupun tidak terampas kebebasannya oleh logika algoritma dan kecerdasan buatan (*AI*) untuk akumulasi kapital para raksasa teknologi.

Dengan demikian, buku ini berupaya menyatukan tiga lapisan refleksi: sejarah, teori, dan kesaksian. Ia mencoba menulis ulang hubungan antara kolonialisme dan pembangunan, antara kapitalisme dan negara, antara modernitas dan kekerasan. Dan di tengah semua itu, ia juga mencari ruang bagi harapan, bagi munculnya imajinasi politik baru yang melampaui logika perampasan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini tidak sempurna. Banyak bagian yang mungkin masih terbatas, banyak detail sejarah yang bisa lebih dalam, banyak referensi yang bisa diperluas. Namun kami memilih untuk menerbitkannya sekarang, dalam bentuk *zine/self-publishing*,

Media Nusa Creative

justru agar ia bisa menjadi ruang percakapan yang terbuka. Buku ini bukan titik akhir, melainkan undangan untuk berpikir bersama, untuk mengoreksi, memperkaya, dan melanjutkan. Kritik, masukan, dan pembacaan ulang dari siapa pun — akademisi, aktivis, petani, mahasiswa, atau pembaca biasa — adalah bagian penting dari proses itu.

Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberi inspirasi dalam penulisan buku ini, para peneliti yang karyanya menjadi pijakan konseptual, para pejuang agraria dan lingkungan yang memperlihatkan bahwa pengetahuan bisa lahir dari perjuangan, serta rekan-rekan diskusi yang tanpa lelah berbagi gagasan dan keberanian. Kepada mereka yang kisah hidupnya menjadi bagian dari narasi ini — mereka yang kehilangan tanah, rumah, atau hutan — buku ini kami persembahkan dengan rasa hormat yang mendalam.

Dalam proses penyusunan dan penyuntingan buku ini, kami memanfaatkan bantuan kecerdasan buatan (*AI*) secara terbatas, khususnya untuk memperbaiki tata bahasa, menyusun struktur argumen, dan melakukan pengecekan konsistensi istilah. Namun seluruh ide, interpretasi, dan keputusan penulisan merupakan tanggung jawab penuh penulis. Penggunaan *AI* dilakukan sebagai alat bantu teknis, bukan sebagai pengganti proses berpikir dan menulis manusia.

Akhirnya, kami menulis buku ini dengan satu harapan sederhana, agar kita bisa melihat kembali Indonesia dengan mata yang lebih jernih, dengan kesadaran bahwa apa yang disebut “pembangunan” tidak selalu berarti kemajuan, dan bahwa sejarah yang adil hanya bisa lahir bila kita berani mengingat yang telah dihapus.

Semoga buku ini dapat menjadi sumbangan kecil dalam percakapan yang lebih besar tentang bagaimana membangun

Media Nusa Creative

dunia yang tidak lagi bertumpu pada perampasan, melainkan pada kehidupan yang setara dan berkeadilan.

Dan jika di dalamnya masih terdapat kekurangan — baik dalam analisis, penulisan, maupun pemahaman — maka biarlah itu menjadi ruang bagi pembaca untuk melanjutkan kerja ini. Karena sejarah tidak pernah selesai, dan pengetahuan selalu tumbuh dari percakapan yang jujur dan terbuka.

Terima kasih telah bersedia membaca, menafsirkan, dan mungkin menulis ulang sejarah ini bersama kami.

Hidayatullah Rabbani dan Mei Suciati

Jakarta, Oktober 2025

Media Nusa Creative

PENGANTAR

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

Sejarah Indonesia sebagai Cermin yang Terdistorsi: Membongkar Narasi Kemajuan dan Perampasan Global

***Thung Ju Lan**, Peneliti Ahli Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional*

Buku ini sepertinya lahir sebagai sebuah penegasan yang mendasar dari para penulisnya bahwa sejarah Indonesia yang dominan adalah cermin yang terdistorsi dari masa lampau yang sesungguhnya. Cermin ini membentuk apa yang dapat disebut sebagai "Sejarah Elitis"—narasi tentang pergantian rezim, konflik antar-elit, dan keputusan strategis dari atas ke bawah. Ia mengisahkan tokoh-tokoh besar, drama politik, dan manuver negara, sementara suara rakyat yang hidup di luar istana dan parlemen direduksi menjadi latar.

Sejarah elitis bekerja sebagai pembenaran diam-diam atas proyek pembangunan. Ia merayakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, tetapi mengaburkan kekerasan struktural yang menopang keduanya. Pembangunan, sebagaimana dijalankan di Indonesia sejak Orde Baru hingga era neoliberal pasca-Reformasi, bukanlah sekadar agenda nasional untuk kemakmuran; ia merupakan mekanisme integrasi paksa ke dalam kapitalisme global yang menempatkan Indonesia sebagai negara periferi. Di posisi inilah sumber daya alam, tenaga kerja murah, dan ruang hidup komunal terus dieksploitasi untuk akumulasi modal, terutama oleh korporasi transnasional. *Accumulation by dispossession* menjadi logika inti dari apa yang selama ini disebut pembangunan.

Media Nusa Creative

Distorsi terbesar dalam cermin sejarah itu terdapat pada representasi proyek modernisasi. Narasi resmi menggambarkan pembangunan sebagai jalan mulus menuju efisiensi dan kemakmuran. Namun di balik citra tersebut terhampar sejarah perampasan yang sistematis—hak atas tanah, ruang hidup, dan penghidupan yang hilang demi perkebunan, pertambangan, kawasan industri, serta megainfrastruktur. Perubahan sosial yang dialami masyarakat akar rumput dan pengalaman mereka yang terampas (*the dispossessed*) dipinggirkan menjadi catatan kaki. Kealpaan ini bukan sekadar kekurangan metodologis; ia merupakan refleksi dari struktur kekuasaan yang memposisikan rakyat sebagai objek pembangunan, bukan subjek sejarah. Padahal inti sejarah Indonesia justru ada pada perjuangan mereka.

Buku ini berupaya membalik matriks sejarah tersebut dengan menempatkan pengalaman kolektif mereka yang terampas sebagai pusat analisis:

1) Petani dan masyarakat adat yang kehilangan kedaulatan atas tanah dan wilayah adat yang dianggap "lahan kosong";
2) Buruh yang perjuangan upah, keselamatan kerja, dan hak-hak dasar mereka dibungkam demi "iklim investasi";
3) dan kelompok-kelompok lain yang terpinggirkan oleh logika pembangunan.

Melalui pendekatan *history from below*, buku ini membongkar pola perampasan yang berulang dari masa kolonial hingga kebijakan neoliberal kontemporer. Ia memetakan bagaimana *dispossession* bekerja sebagai logika berulang yang mendefinisikan relasi antara negara, modal, dan masyarakat. Dengan demikian, karya ini bukan hanya kritik atas narasi

Media Nusa Creative

resmi, tetapi juga ajakan untuk merumuskan kembali paradigma historiografi Indonesia: dari sejarah tentang siapa yang memerintah menjadi sejarah tentang bagaimana rakyat bertahan, berjuang, dan menciptakan dunia mereka di tengah bayang-bayang kekuasaan.

Menghadapi cermin sejarah yang terdistorsi menuntut kita untuk jujur: tidak hanya menyusun kembali historiografi, tetapi juga memberikan pertanggungjawaban moral terhadap korban-korban masa lalu dan masa kini. Dari sanalah kekuatan politis dapat dibangun—untuk masa depan yang berlandaskan keadilan distributif dan harmoni ekologis.

Pada akhirnya, kita membutuhkan lebih banyak karya sejarah yang menceritakan persoalan komunitas akar rumput: bukan hanya petani, masyarakat adat, dan buruh, tetapi juga nelayan, perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas—mereka yang sering luput dari narasi besar bangsa. Pertanyaannya kini: *di mana mereka dalam sejarah Indonesia yang selama ini kita baca?*

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

Menulis Sejarah sebagai Perlawanan

***Riwanto Tirtosudarmo**, Peneliti Independen*

Sejak bulan Agustus hingga November 2025 ini panggung politik Indonesia cukup riuh rendah. Sebelumnya, publik ramai membicarakan penulisan buku sejarah nasional baru dibawah Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Menjelang usia setahun, setelah pelantikannya pada tanggal 20 November 2024 lalu, pemerintahan Prabowo Subianto memang melakukan banyak gebrakan. Penulisan buku sejarah yang baru hanya salah satunya. Selain upayanya untuk mengendalikan ekonomi yang sedang goyah melalui pembentukan Danantara, kebijakan populisnya, Makan Siang Gratis dan Koperasi Merah Putih, terus digeber, meskipun banyak yang menilai kebijakan ini cuma gincu untuk menutupi pengerukan kekayaan alam dan berbagai program yang hanya menguntungkan para oligarki dan pemilik modal seperti PSN (Program Strategis Nasional) dan *Food Estates* yang dinilai meminggirkan masyarakat lokal.

Menjelang ulang tahun kemerdekaan yang ke-80, tanggal 17 Agustus 2025 yang lalu, cuaca politik terasa kelabu karena desas-desus akan ada gelombang protes, terutama dari kelompok buruh dan mahasiswa sebagai reaksi terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang dianggap merugikan masyarakat. Gelombang aksi demo itu benar terjadi tanggal 28-30 Agustus di berbagai kota, terutama di Jakarta. Bulan September-Oktober kita menyaksikan bagaimana polisi dan tentara menangkapi aktifis yang dianggap menjadi dalang demo. Menjelang bulan November

Media Nusa Creative

pangggung politik kembali diramaikan dengan rencana pemerintah memberikan gelar palawan kepada Suharto. Kembali berbagai gerakan protes digalang, petisi ditandatangani ratusan akademisi dan tokoh masyarakat, namun Presiden Prabowo Subianto tidak bergeming, Suharto resmi menjadi pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2025, dua hari yang lalu.

Penulisan sejarah, menurut adagium lama, selalu dilakukan oleh pihak yang menang, pihak yang sedang berkuasa. Itu tampaknya yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto, seorang mantan jendral, mantan menantu Jendral Besar Suharto, anak dari begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo. Prabowo Subianto yang masa kecil dan remajanya banyak di luar negeri, karena ayahnya seorang pelarian politik, memilih karir di bidang militer, mungkin karena pengaruh latarbelakang keluarganya yang patriotik. Konon dua pamannya meninggal sewaktu perang kemedekaan. Nama pamannya yang meninggal saat perang kemerdekaan, Subianto, menjadi nama keduanya. Darah patriotisme tampaknya kuat mengalir di tubuhnya. Ketika masih berpangkat Kapten (Mei 1983) Prabowo menikahi anak Suharto, Siti Hediati, dan sejak itu bisa dimengerti karirnya sebagai tentara meroket. Menjelang kejatuhan Suharto Mei 1998, Prabowo sudah berpangkat Letnan Jendral dan menjadi Komandan Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat), jabatan Suharto, mertuanya ketika membasmi PKI tahun 1965.

Dalam kecamuk politik menjelang lengesernya Suharto, Prabowo dinilai oleh atasannya saat itu, Jendral Wiranto, sebagai telah melanggar Sumpah Prajurit, antara lain karena telah menculik para aktifis dan melakukan pelanggaran HAM yang lain. Akibatnya dia diberhentikan dari karir militernya, dan sejak itu mengikuti adiknya Hasyim Djojohadikusumo,

Mbira Nusa Creative

berbisnis. Tidak lama kemudian Prabowo bercerai dengan istrinya, kemudian seperti ayahnya hidup di luar negeri, antara lain di Jordania, konon karena Pangeran Abdulah II Raja Jordania adalah teman sekelasnya ketika sama-sama kursus militer di Amerika Serikat. Prabowo sempat dicekal untuk masuk Amerika Serikat karena pelanggaran HAM yang dilakukannya. Prabowo kembali ke Indonesia saat Megawati Sukarnoputri menjadi presiden, dan pada tahun 2002 bersama adiknya Hasyim dan kawan-kawannya dari militer dan sipil, membentuk Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya). Sejak itu Prabowo hampir tidak pernah absen untuk bertarung di setiap pemilu untuk bisa menjadi Presiden. Kesempatan itu datang setelah pencalonannya didukung oleh Presiden Jokowi yang menjadikan anaknya Gibran Rakabuming Raka, sebagai pasangannya, tahun 2024.

Prabowo Subianto jelas orang yang haus kekuasaan. Ketika kekuasaan berhasil diraihnya pada usia 75 tahun, negeri yang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia bernama Indonesia ini ada dalam genggaman tangannya, apapun yang lama menjadi keinginannya, tak seorangpun dapat menghalanginya. Menjadikan Suharto, mantan mertuanya, diktator selama 32 tahun yang dianggap telah menghabisi golongan kiri, memperkusi mereka yang tidak sejalan, menumpas mereka yang dianggap menentang kebijakan nasionalnya; sebagai pahlawan nasional tidak saja wujud apresiasi terhadap pendahulunya namun, dan ini yang barangkali yang terpenting, wujud pengabsahannya terhadap kekerasan sebagai sebuah *virtue* (kebajikan) dalam politik.

Kita tahu bahwa salah satu hak yang dimiliki negara adalah penggunaan kekerasaan, melalui aparat militer dan kepolisian, dalam menjalankan pemerintahannya. Prabowo bisa dikatakan telah melanjutkan tradisi yang telah ditanamkan oleh Suharto,

Media Nusa Creative

dengan pemberian makna terhadap kekerasan yang baru, sebagai *public virtue* (kebajikan publik). Tanpa ragu-ragu Prabowo memperluas wilayah kekuasaan militer ke wilayah sipil dan memperbanyak komando daerah militer yang menunjukkan bahwa militerlah yang sesungguhnya menjadi panglima dari arah kedepan republik ini. Fadli Zon yang sejak awal telah menjadi kader Partai Gerindra adalah orang yang memahami keinginan Prabowo dan mengetahui apa yang harus dilakukannya untuk mendukung keinginan Prabowo*, to reinventing Indonesia to be* Indonesia Raya. *Reinventing* Indonesia adalah kata kunci dan kekerasan adalah *the new public virtue* yang perlu disampaikan ke publik dalam narasi sejarah Indonesia yang baru.

Buku yang berjudul "Sejarah Indonesia, Sejarah Perampasan" yang ditulis oleh Hidayatullah Rabbani dan Mei Suciati, dua anak muda dari generasi millennial ini, melihat Indonesia, tepatnya warganegara Indonesia sebagai korban dari politik perampasan - the *politics of dispossession.* Indonesia dalam buku ini telah dianggap ada sejak sebelum bernama Indonesia, sejak masih disebut sebagai nusantara, sebagai bagian dari apa yang oleh Anthony Reid disebut sebagai "tanah bawah angin" – *Land Below the Wind.* Sejarah sebagai rentangan waktu, dalam buku ini dimulai ketika kepulauan nusantara sudah menjadi bagian dari wilayah eksploitasi global, awal abad 16. Secara kroologis buku ini membagi sejarah Indonesia sebagai berikut: (1) Kekerasan dan Dagang: Perampasan Kolonial Awal (1600–1800), (2) Tanam Paksa dan Hukum Kolonial: Produksi Kemiskinan Struktural (1830–1870), (3) Liberal Kolonialisme dan Kapital Swasta (1870–1942), (4) Politik Etis dan Lahirnya Subjek Kolonial Modern (1901–1942), (5) Kemerdekaan dan Reproduksi Kekuasaan: Negara Nasional yang Sedang Dibentuk (1945–1965), (5) Pembangunan, Militer, dan Modal:

Media Nusa Creative

Orde Baru sebagai Rezim Perampasan (1966 1998). (6) Reformasi, Neoliberalisme, dan Perampasan Baru (1998–Sekarang), (7) Perampasan di Era Digital.

Melihat cakupannya buku ini cukup ambisius karena harus menjelajah rentang waktu yang panjang, menjelaskan perampasan yang terus menerus dialami oleh "orang Indonesia" tanpa jeda oleh rejim-rejim politik-ekonomi yang berbeda-beda. Berikut adalah alasan mengapa mereka menulis buku ini:

Kami menulis buku ini dengan keyakinan bahwa sejarah tidak hanya berisi deretan peristiwa, tetapi juga cara pandang — dan cara pandang itu selama ini dikuasai oleh mereka yang berkuasa. Dalam narasi resmi, pembangunan selalu dikisahkan sebagai keberhasilan bangsa, sebagai bukti bahwa Indonesia telah keluar dari "keterbelakangan." Namun di balik kisah itu tersembunyi kenyataan lain, bahwa apa yang disebut pembangunan sering kali berdiri di atas penderitaan dan penghilangan yang sistematis. Bahwa modernitas yang kita rayakan hari ini bertumpu pada fondasi yang rapuh, tanah-tanah yang dirampas, masyarakat adat yang digusur, tenaga kerja yang dieksploitasi, dan cara-cara hidup yang dimusnahkan atas nama kemajuan.

Buku ini oleh kedua penulisnya diklaim sebagai buku sejarah, dan mereka menulis sejarah ini dari sebuah posisi politik tertentu, saya menyebutnya dari posisi politik perlawanan, atau *resistance politics.* Kedua penulis secara konsisten menunjukkan bahwa apa yang selama ini disebut sebagai sejarah Indonesia sesungguhnya menyembunyikan ironi sekaligus tragedi dari sebuah bangsa – yaitu kegagalan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Bangsa Indonesia tumbuh dan

Media Nusa Creative

berkembang, menururt kedua penulis buku ini, "bertumpu pada fondasi yang rapuh, tanah-tanah yang dirampas, masyarakat adat yang digusur, tenaga kerja yang dieksploitasi, dan cara-cara hidup yang dimusnahkan atas nama kemajuan" – sebuah akusasi yang keras, tajam dan pedas. Dalam hal ini tentu akan cukup banyak pihak yang tidak sependapat dengan akusasi ini, dan perbedaan semacam ini harus dilihat sebagai sesuatu yang lumrah.

Sebagai pembaca yang tidak memiliki latar belakang keahlian ilmu sejarah saya bersimpati dengan posisi politik dan narasi sejarah yang ditulis dalam buku ini. Saya mendukung posisi politik mereka karena posisi politik mereka saat ini sangat diperlukan bagi negeri ini. Sebuah negeri yang seperti saya coba uraikan diawal tulisan ini sedang memasuki zaman perampasan yang mungkin paling brutal, ketika kekerasan dijunjung tinggi sebagai sebuah kebajikan publik (*public virtue*). Sebagai bangsa kita sedang dipimpin oleh sebuah rezim politik yang tidak hanya merampas dan mengeksploitasi atas nama kerakusan (*greediness*) tetapi yang melegitimasi perampasan dan eksploitasi melalui sebuah ideologi yang militersistik dengan kekerasan yang akan dinarasikan sebagai *legitimate ideology. Reinventing Indonesia* sebagai *keywords* dan kekerasan sebagai *virtue* oleh rezim yang saat ini berkuasa akan ditulis dalam buku sejarah nasional yang baru yang tidak lama lagi akan terbit.

Dalam konteks perkembangan sosial politik terakhir inilah buku karya Hidayatullah Rabbani dan Mei Suciati, wakil dari generasi milenial Indonesia, "Sejarah Indonesia, Sejarah Perampasan" menjadi penting kehadirannya. Buku ini penting karena telah berhasil menunjukkan proses perampasan (*dispossession*) yang terus berlangsung dari abad 16 hingga hari ini, tetapi juga karena keberaniannya untuk mengambil posisi

Media Nusa Creative

politik yang jelas dan tegas – perlawanan, *resistance.* Ketika dunia akademik dan dunia aktifisme sosial tampak semakin kehilangan *elan vital* dan relevansinya, buku ini bisa menjadi perintis dari sebuah perlawanan epistemik, dan mewujudkan perlawanannya dalam wujud teks narasi sejarah yang berbeda, narasi sejarah dari mereka yang tidak bisa menuliskan sejarahnya sendiri – *people without history* – meminjam istilah Eric Hobsbawm*, the subaltern* – meminjam istilah Gayatri Spivak.

Kampung Limasan Tonjong, Bogor

12 November 2025

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

Sejarah yang Terus Diperebutkan: Sebuah Esai Reflektif-Kritis atas Sejarah Indonesia, Sejarah Perampasan

***Cahyo Pamungkas**, Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)*

Media Nusa Creative

Pertama kali, saya menyampaikan selamat kepada Saudara Hidayatullah Rabani, seorang peneliti berusia muda di Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN yang selalu bersemangat, dan juga Mei Suciati, peneliti di LP3ES Jakarta atas publikasi buku ini. Dalam membaca sebuah karya yang menggabungkan rentang sejarah panjang, kritik terhadap praktik-praktik pembangunan kapitalistik, dan sejumlah teori sosial terutama post-strukturalisme, pembaca sering kali berharap menemukan jarak—sebuah ruang objektivitas yang menjadi syarat bagi tulisan akademik. Namun *Sejarah Indonesia, Sejarah Perampasan* secara sadar menolak posisi itu. Buku ini tidak ditulis dari menara gading, melainkan "dari reruntuhan"—reruntuhan ekologis, sosial, dan epistemik yang membentuk wajah Indonesia kotemporer. Dari titik berangkat inilah buku tersebut menyusun argumen besar: bahwa sejarah Indonesia, dari kolonialisme hingga pembangunan di masa kini, merupakan sejarah tentang perampasan hak-hak rakyat yang dilegitimasi oleh bahasa kemajuan dan modernisasi.

Catatan ini berusaha menanggapi karya tersebut secara reflektif dan kritis—bukan sekadar membaca dan menilai kualitas tulisan, tetapi merenungkan dan memikirkan kembali

apa yang dipertaruhkan ketika kita menulis sejarah. Tulisan ini juga mempertimbangkan kelebihan dan kritik terhadap karya tersebut baik secara akademik maupun praktis, sambil mempertanyakan cara-cara kita memahami pembangunan, kekuasaan, dan harapan di tengah meningkatnya otoritarianisme global di berbagai belahan bumi dan tentu saja dunia yang terus berubah. Dengan cara itu, esai ini berupaya bukan hanya merespon, akan tetapi berdialog dengan karya tersebut: sebuah percakapan antara teks sejarah, interpretasi pembaca, dan pengalaman sejarah Indonesia.

Kegelisahan sebagai Titik Berangkat

Kekuatan utama buku ini—dan sekaligus daya tariknya—terletak pada keberaniannya menempatkan kegelisahan intelektual sebagai fondasi narasi. Ia dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang tampak sederhana namun memiliki sarat bobot politis: mengapa pembangunan yang dijanjikan, oleh rejim politik suatu negara, sebagai jalan yang membawa kemajuan justru meninggalkan begitu banyak luka, trauma, dan penderitaan dari rakyatnya yang tidak berdaya? Mengapa modernitas yang diagung-agungkan berdiri di atas tanah yang dirampas, hutan yang dihancurkan, tenaga kerja yang dieksploitasi, warga yang disingkirkan dari habitat ekologisnya?

Tentu saja, kegelisahan seperti ini bukan hal baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Pengalaman negara-negara pascakolonial seperti di Asia dan Afrika menunjukkan bahwa rejim otoriter bekerja sama dengan kapitalisme internasional selalu menjalankan pembangunan yan gberoreintsi pada pertumbuhan dan menarik investasi asing. Banyak pemikir pascakolonial, kritikus terhadap ideologi pembangunan,

Media Nusa Creative

bahkan aktivis agraria mengawali pemikirannya dari titik yang sama. Namun buku ini memberikan satu nuansa berbeda: ia menempatkan kegelisahan itu sebagai kerangka epistemik yang mendasari seluruh tulisan pada buku ini. Dengan kata lain, kegelisahan bukan sekadar emosi, melainkan cara membaca dunia sosial.

Di sini pembaca melihat salah satu kelebihan buku tersebut, bahwa buku ini tidak sekadar menceritakan sejarah, tetapi menyusun kembali cara kita memahami sejarah nasional secara khusus dan dunia sosial secara umum. Penulis buku ini menyadari bahwa sejarah bukanlah deretan fakta, melainkan konstruksi yang dibentuk oleh kekuasaan. Penguasa kolonial menulis sejarah resmi versi penguasa untuk mengukuhkan "peradaban Eropa yang berkemajuan"; atau negara pascakolonial menulis sejarah untuk melegitimasi pembangunan. Dengan demikian, kegelisahan dalam buku ini bukan tanda ketidakpastian, melainkan pilihan posisi politik dan epistemologis.

Membangun Argumen dari Jembatan Teori

Salah satu bagian paling kuat dari buku ini adalah jembatan yang dibangun antara teori sosial dan realitas Indonesia. Penulis menggunakan beragam konsep: mulai dari *primitive accumulation-nya* Marx, *accumulation by dispossession* ala Harvey, *world-systems theory* dari Wallerstein, hingga kritik pembangunan dari Escobar dan Tania Li. Keempat scholar yang dikutip ini merupakan referensi kritik dalam ilmu sosial tergadap praktik pembangunan yang kapitalistik. Tidak berhenti di situ, penulis buku ini juga meminjam Foucault untuk membahas kekuasaan yang dibentuk melalui bahasa dan

Media Nusa Creative

hukum, serta Federici dan Ostrom untuk membuka ruang kemungkinan di luar kapitalisme ekstraktif.

Pada titik ini, kekuatan akademik buku menjadi terlihat jelas: ia berani menjahit berbagai teori lintas tradisi untuk membangun satu argumen besar bahwa pembangunan yang sekarang sedang berjalan di Indonesia ini bukanlah jalan menuju kemajuan, kebahagiaan dan kebebasan tetapi sebuah proses reproduksi kolonialisme dalam wajah baru dengan menggunakan modus operandi yang berbeda.

Namun di sini juga terletak salah satu potensi sumber persoalannya. Kekuatan naratif yang luas dapat membawa risiko overgeneralisasi. Indonesia, seperti negara mana pun, adalah ruang sosial kehidupan yang kompleks, termasuk memiliki kompleksitas sejarah dan kebudayaan serta keragaman identitas sosial warganya. Dalam imajinasi sosiologis, tidak semua pembangunan adalah perampasan bagi kelompok sosial tertentu pada wilayah tertentu dalam seting sejarah tertentu. Juga tidak semua kebijakan negara hanya memperpanjang kolonialisme, namun merupakan jalan untuk mobilisasi sosial bagi kelompok warganya di wilayah tertentu dan pada masa tertentu. Pola-pola eksploitasi itu mungkin dominan, tetapi mungkin juga tidak absolut. Kritik semacam ini penting agar argumen penulis tidak mudah diserang akademisi yang lebih mencari nuansa daripada tesis besar atau subtansi persoalan yang sedang didiskusikan.

Namun demikian, penulis tampaknya sadar akan risiko ini. Alih-alih menampilkan karya tulis sebagai kebenaran final, mereka membuka ruang untuk koreksi, dialog, dan kritik. Buku ini menyebut dirinya bukan sebagai karya puncak, tetapi sebagai undangan untuk mengenali dunia sosial yang dikenalkan penulis dalam melihat sejarah Indonesia. Dan

Media Nusa Creative

dalam undangan itulah ia menemukan bentuk kekuatannya apabila mampu berdialog dengan kritik dari pembaca.

Sejarah Indonesia sebagai Narasi Perampasan

Jika bagian teoretis menjadi fondasi, maka bagian historis buku ini menjadi tubuh utama argumentasinya. Para penulis dengan percaya diri menyusuri rentang sejarah Indonesia: dari VOC, tanam paksa, liberalisasi kolonial, politik etis, revolusi kemerdekaan, Orde Baru, hingga neoliberalisme pascareformasi. Semua periode sejarah yang sangat panjang tersebut dibaca melalui satu lensa untuk memandang dunia sosial yang rumit dan kompleks dengan satu konsep, yakni perampasan.

Ada daya tarik tersendiri dalam membaca sejarah dari sudut pandang *dispossession*. Perspektif ini memberi ruang bagi kelompok yang selama ini dibungkam oleh narasi pembangunan. Dengan logika ini, pembangunan infrastruktur jalan raya misalnya bukan hanya pencapaian nasional, tetapi hilangnya sawah yang dapat kita maknai sebagai mundurnya sektor pertanian dan kemandirian pangan. Pembangunan sebuah bendungan besar bukan hanya penggunaan teknologi, tetapi juga dapat dilhat sebagai lenyapnya kampung, komunitas beserta sejarah dan kebudayannya. Eksplorasi mineral bukan hanya menarik investasi, transfer teknologi dan pemasukan negara, tetapi hilangnya hutan adat, masyarakat adat yang hidup di atasnya, dan pola hidup yang dianggap tidak menyesuaikan diri terhadap kemajuan dan modernitas.

Cara baca seperti ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih jujur tentang cara pandang dan makna modernitas di kalangan ilmuwan sosial di Indonesia. Modernitas bukan sekadar bermakna teknologi, melainkan kekuasaan untuk

Media Nusa Creative

merampas kehidupan suatu komunitas beserta ruang hidupnya. Dan kekuasaan tiranik seperti ini selalu memerlukan legitimasi. Dalam kasus Indonesia, legitimasi itu bernama pembangunan—suatu istilah yang seakan tidak mungkin ditolak. Yang belum ditulis dalam buku ini, legitimasi kekuasaan juga dilakukan melalui produksi dan reproduksi pengetahuan dan sejumlah nilai atau norma yang dianggap benar.

Di sinilah buku ini menciptakan ketegangan penting bagi pembaca: para penulis sebenarnya memaksa kita bertanya kembali, apa yang sebenarnya kita rayakan ketika merayakan kemajuan dan kelompok mana yang menikmati kemajuan serta bagaimana cara mereka mendapatkan kemajuan? Apakah kemajuan itu universal, ataukah hanya dirasakan oleh sebagian kelompok? Sementara kelompok sosial laiinya membayar biayanya dengan trauma dan penderitaan terutama mereka yang menjadi korban dalam pembangunan

Namun, meskipun narasi perampasan ini terasa tajam dalam buku ini, namun ada sejumlah persoalan akademik yang patut dicatat. Karya tulis ini belum memberikan contoh kasus empiris yang konkret melalui penelitian lapangan. Tanpa data etnografis atau studi lapangan yang mendalam, narasi besar ini mungkin berisiko dianggap oleh akademisi lain yang melihat dunia secara positivistik, sebagai terlalu teoretis, terlalu naratif. Walau bagaimanapun, kekuatan analisis buku ini tetap tinggi, meskipun ada pandangan bahwa legitimasi empirisnya belum cukup. Oleh karena itu, untuk pembaca umum, persoalan ini bukan masalah besar.

Media Nusa Creative

Bahasa sebagai Arena Kekuasaan

Salah satu bagian yang paling menarik dalam buku ini adalah pembahasan tentang bahasa dan hukum sebagai instrumen perampasan. Penulis menunjukkan bagaimana istilah seperti "tanah negara," "kepentingan umum," dan "objek vital nasional" bekerja bukan hanya sebagai kategori administratif, tetapi sebagai perangkat kekuasaan. Sebagai contoh kasus yang dapat saya gambarkan, dengan alasan menjaga objek vital negara dan sloga memeprtahankan keutuhan NKRI di Tanah Papua, sebuah metode kekerasan oleh aparat keamanan terhadap orang Papua dilegitimasi menjadi normalitas.

Analisis hegemoni negara ini yang membuat karya ini lebih dalam dari sekadar analisis ekonomi-politik yang lebih bersifat teknis. Dengan memasukkan konsep Foucault, penulis mengingatkan bahwa perampasan bukan hanya terjadi pada tubuh dan tanah, tetapi juga pada ilmu pengetahuan. Kekuasaan bekerja melalui normalisasi, kategorisasi, dan legitimasi. Tanah adat hilang bukan hanya karena ditambang dan dirasmpas oleh perusahaan atau neraga, tetapi juga karena dinyatakan "tidak ada" di dalam hukum. Subjek kehilangan tanah bukan hanya karena digusur, tetapi karena direduksi menjadi kata: "terbelakang," "tidak produktif," "tradisional."

Pada titik ini, buku ini memberi kontribusi reflektif penting: bahwa pembangunan bukan sekadar proyek material, tetapi proyek epistemik. Dan proyek epistemik selalu menghasilkan penghapusan. Yang dihapus bukan hanya ruang, melainkan kemungkinan untuk hidup di dalam dunia dengan cara lain. Dengan demikian, yang saya kagumu dari buku ini adalah bahwa pendekatan ini bukan hanya menunjukkan kelebihan analitis penulis, tetapi juga kepekaan filosofisnya. Di tengah dominasi teknokrasi pembangunan modern, mengingatkan

Media Nusa Creative

kekuasaan bahasa adalah langkah penting untuk memahami akar ketidakadilan.

Pembangunan sebagai Kekerasan yang Dinaturalisasi

Di bagian lain, buku ini menunjukkan bagaimana pembangunan bekerja sebagai kekerasan yang dinaturalisasi dan sekarang ini sedang disentralisasi oleh rejim politik Neo-Orde Baru. Penulis buku ini mengutip gagasan Harvey tentang *accumulation by dispossession* untuk melihat pembangunan Orde Baru dan neoliberalisme pascareformasi, yang saya sbeut sebagai Neo-Orde Baru. Proyek-proyek seperti swastanisasi air, ekspansi perekbunan sawit, *Food Estates*, pertambangan besar, dan reformasi hukum investasi dibaca sebagai upaya menciptakan ruang bagi akumulasi kapital.

Pembacaan seperti ini sangat relevan dengan kondisi kontemporer Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, negeri ini menjadi laboratorium besar praktik neoliberalisme dan oligarki politik. Meskipun bahasa pembangunan telah berubah menjadi "konektivitas," "kota pintar," atau "transformasi digital," logikanya tetap berpusat pada akumulasi sumber daya yang sifat aslinya tidak hilang, yaitu mengekslusi mereka yang tidak berdaya dan tidak memiliki akses terhadap kekuasaan.

Namun di sini pula buku ini menghadapi tantangan praktis. Bagi pembaca yang bekerja di sektor pemerintahan atau pengembangan wilayah, buku ini mungkin terasa terlalu keras. Mereka, para aparatus negara ini, termasuk para akademisi di perguruan tinggi dan para periset yang bekerja di BRIN, akan mengatakan bahwa tidak semua pembangunan adalah perampasan. Tidak semua kebijakan publik dibuat dengan niat ekstraktif. Mungkin, ada sejumlah birokrat yang jujur dan ingin

Media Nusa Creative

memperbaiki kondisi warga dan mungkin juga terdapat proyek yang benar-benar berhasil meningkatkan kesejahteraan.

Kritik yang terlalu total dapat mengaburkan kompleksitas persoalan eksploitasi itu sendiri. Di sinilah karya ini perlu lebih bernuansa, agar dapat menjadi dialog yang efektif, bukan hanya seruan politik, akan tetapi juga sebagai kritik struktural, posisi keras seperti ini tetap memiliki tempat yang sah dalam diskursus di ruang publik maupun dunia akademik.

Meskipun karya ini kuat secara teoretis, ia masih lemah secara empiris. Penulis belum menyajikan sejumlah studi kasus konkret, meski menyebut beragam daerah: Papua, Kalimantan, Jawa, dan kota-kota besar. Untuk sebuah karya tulis reflektif, hal ini dapat diterima. Namun untuk karya akademik mendalam, data empiris yang belum mencukupi merupakan sebuah persoalan akademik. Tanpa contoh-contoh studi kasus yang cukup mendalam, narasi besar ini dapat dianggap sebagai kritik ideologis, bukan se buah analisis ilmiah. Persoalan lain adalah ketiadaan metodologi, mungkin akan mendorong pembaca menanyakan apakah tulisan ini bersifa akademik murni. Namun, saya melihat karya tulis ini sepertinya memang tidak ingin menjadi karya akademik kaku. Melainkan ingin menjadi sebuah bacaan populer kritis, sebuah jembatan antara teori dan gerakan sosial. Oleh karena itu, saya melihat bahwa persoalah akademik dalam buku ini menjadi tidak signifikan.

Meski penuh kritik dan analisis kelam, buku ini tidak jatuh pada pesimisme total. Di bagian akhir, penulis membuka ruang untuk harapan: tentang *commons*, ekonomi solidaritas, dan imajinasi politik baru. Referensi pada Federici dan Ostrom menunjukkan bahwa penulis tidak berhenti pada kritik, tetapi juga memikirkan kemungkinan. Namun ruang harapan ini masih samar. Tidak ada contoh konkret tentang bagaimana

Media Nusa Creative

commons dapat dikembangkan di Indonesia. Tidak ada gambaran jelas bagaimana kebijakan dapat diubah. Akibatnya, proposal ini lebih bersifat normatif ketimbang praktis. Meski begitu, keberadaan bagian ini penting. Tanpa harapan, kritik akan menjadi destruktif. Dengan harapan, kritik berubah menjadi undangan untuk membayangkan masa depan yang lain.

Bagian paling kuat secara emosional dalam buku ini adalah *Kata Penutup: Menulis dari Reruntuhan*. Di sini penulis merumuskan posisi etiknya: menulis sebagai bentuk perlawanan terhadap penghapusan. Menulis menjadi cara untuk melawan amnesia nasional, melawan narasi pembangunan yang menyembunyikan luka. Nada dalam bagian ini mengingatkan kita bahwa teori dan sejarah bukan sekadar wacana, tetapi sesuatu yang berakar pada kehidupan orang-orang nyata: petani yang kehilangan sawah, masyarakat adat yang kehilangan hutan, pekerja yang kehilangan hak, bahasa-bahasa yang hilang dari generasi ke generasi. Pada titik ini, karya ini bukan lagi teks akademik, tetapi deklarasi politik. Dan keberanian untuk melakukan itu adalah salah satu kekuatan utama buku ini. Ia bersuara dari posisi yang tidak populer, tetapi penting.

Penutup: Sejarah yang Belum Selesai

Apa yang Diperoleh dari Buku Ini? Jika kita membaca buku ini dengan detail secara reflektif maka membuka sejumlah kesadaran sebagai berikut. *Pertama*, bahwa pembangunan bukan konsep dan praktik yang netral karena di baliknya terdapat kekuasaan, bahasa, dan kepentingan dari elit penguasa dan pemilik kapital. *Kedua*, penulisan sejarah Indonesia tidak pernah selesai ditulis, sejarah selalu

Media Nusa Creative

merupakan arena perebutan makna yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh elit penguasa, termasuk sejarah pembangunan sebagai sejarah eksploitasi dan peminggiran. *Ketiga*, modernitas yang dihasilkan oleh pembangunan ini tidak identik dengan pembebasan. Pada banyak kasus, modernitas justru menjadi kelanjutan kolonialisme. *Keempat*, sejumlah teori kritis memberi bahasa bagi kegelisahan kelompok-kelompok kritis maupun korban pembangunan. Akan tetapi konsep-konsep kritis ini harus terus diuji melalui pengalaman konkret. *Kelima*, harapan akan perubahan hanya mungkin jika kita berani melihat reruntuhan apa adanya.

Pada akhirnya, membaca buku ini menghadirkan satu kesimpulan penting: bahwa sejarah Indonesia belum selesai karena perampasan masih berlangsung, dan karena perlawanan selalu muncul. Buku ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang masa kini dan masa depan. Ia mengajak kita untuk melihat dunia dengan mata yang lebih jernih, tetapi juga dengan keberanian untuk bermimpi tentang masa depan dan pembebasan.

Dalam dunia yang terus bergerak cepat, pembangunan akan selalu datang dengan janji-janji yang indah. Tetapi janji itu harus selalu ditanya: siapa yang diuntungkan? Siapa yang kehilangan? Dan siapa yang menentukan arti "kemajuan"? Esai reflektif-kritis ini berupaya membaca buku tersebut sebagai lebih dari teks — sebagai sebuah intervensi dalam percakapan panjang tentang apa artinya menjadi bangsa pascakolonial yang terus berjuang untuk menemukan masa depannya sendiri. Selama kita masih mampu mengingat, menulis, dan berbicara, sejarah Indonesia tetap terbuka untuk ditulis ulang. Dan di reruntuhan itulah, kita mungkin menemukan kesempatan untuk memulai yang baru.

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **i**

PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **xxxi**

PROLOG: Pembangunan, Modernitas, dan Sejarah yang Dirampas ..... **xxxiii**

Bagian I — Dunia dan Teori Perampasan **1**

1. INDONESIA DALAM SISTEM DUNIA **3**

2. DARI AKUMULASI PRIMITIF KE AKUMULASI MELALUI PERAMPASAN **11**

3. PEMBANGUNAN SEBAGAI IDEOLOGI: MODERNITAS DAN KEKUASAAN **19**

Bagian II — Sejarah Perampasan di Indonesia **27**

4. KEKERASAN DAN DAGANG: PERAMPASAN KOLONIAL AWAL (1600–1800) **29**

5. TANAM PAKSA DAN HUKUM KOLONIAL: PRODUKSI KEMISKINAN STRUKTURAL (1830–1870) **37**

6. LIBERAL KOLONIALISME DAN KAPITAL SWASTA (1870–1942) **45**

7. POLITIK ETIS DAN LAHIRNYA SUBJEK KOLONIAL MODERN (1901–1942) **55**

8. KEMERDEKAAN DAN REPRODUKSI KEKUASAAN: NEGARA NASIONAL DAN NEGARA YANG SEDANG DIBENTUK (1945–1965) **63**

9. PEMBANGUNAN, MILITER, DAN MODAL: ORDE BARU SEBAGAI REZIM PERAMPASAN (1966–1998) **71**

10. REFORMASI, NEOLIBERALISME, DAN PERAMPASAN BARU (1998–SEKARANG) **79**

11. PERAMPASAN DI ERA DIGITAL **91**

Media Nusa Creative

Bagian III — Genealogi Kekuasaan **99**
12. PERAMPASAN LEWAT BAHASA DAN HUKUM **101**
13. TUBUH, TENAGA, DAN PENGETAHUAN YANG DIRAMPAS **109**
14. RESISTENSI DAN AGENSI **117**
Bagian IV — Sejarah Sebagai Alat Pembebasan **125**
15. MELAMPAUI PEMBANGUNAN **127**
16. MENGEMBALIKAN YANG DIRAMPAS **135**
17. MENULIS SEJARAH NASIONAL **143**
EPILOG: TENTANG INGATAN DAN PENGHAPUSAN **149**
KATA PENUTUP: **157**
MENULIS DARI RERUNTUHAN **157**
TENTANG PENULIS **159**

Media Nusa Creative

PROLOG:

Pembangunan, Modernitas, dan Sejarah yang Dirampas

Sejarah Indonesia sering kali diceritakan sebagai kisah tentang kemajuan — tentang bagaimana sebuah bangsa yang pernah dijajah berjuang menata diri menuju modernitas. Dalam narasi resmi, pembangunan menjadi simbol utama keberhasilan itu: proyek raksasa yang menghubungkan masa lalu kolonial dengan masa depan nasional. Jalan raya, bendungan, kawasan industri, dan gedung-gedung tinggi dikisahkan sebagai bukti nyata dari cita-cita kemerdekaan yang berhasil diwujudkan. Namun di balik kisah megah tersebut, tersimpan cerita lain yang jarang disebut: kisah tentang tanah yang diambil, hutan yang ditebang, tenaga yang diperas, dan kehidupan yang dihapus atas nama kemajuan. Buku ini berangkat dari keyakinan bahwa pembangunan dan modernitas di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari proses panjang perampasan — *dispossession* — yang menjadi fondasi historis dan logika berkelanjutan dari apa yang disebut "kemajuan nasional."

Untuk memahami ini, kita perlu menempatkan Indonesia dalam konteks yang lebih luas, dunia kapitalis global. Sejak awal kemunculannya, kapitalisme tidak hanya merupakan sistem ekonomi, tetapi juga sistem kekuasaan yang menata ulang hubungan antara manusia, ruang, dan alam. Marx (1867/1990) menyebut fase kelahiran kapitalisme sebagai *primitive accumulation* — proses historis di mana produsen dipisahkan dari alat produksinya melalui kekerasan, kolonisasi, dan penciptaan pasar tenaga kerja bebas. Dalam pandangan Marx, akumulasi kapital tidak lahir dari pertukaran yang adil, melainkan dari perampasan yang dilembagakan. Pemagaran tanah di Inggris, penaklukan kolonial di Asia dan

Media Nusa Creative

Afrika, serta perdagangan budak di Atlantik adalah bagian dari fondasi kapitalisme global yang dibangun melalui pengusiran massal dan penghancuran ekonomi subsisten.

David Harvey (2003) kemudian memperluas gagasan Marx ini dalam konsep *accumulation by dispossession* — perampasan sebagai mekanisme berulang yang terus-menerus direproduksi bahkan di era kapitalisme modern. Dalam konteks kontemporer, perampasan tidak lagi selalu dilakukan dengan kekerasan fisik, tetapi melalui mekanisme hukum, pasar, dan keuangan. Privatisasi sumber daya publik, komodifikasi tanah, dan penyerapan tenaga kerja murah menjadi bentuk-bentuk baru akumulasi. Harvey menegaskan bahwa kapitalisme hidup dari kontradiksinya sendiri, ia membutuhkan ruang-ruang baru untuk dijadikan objek ekspansi, dan karena itu, selalu menciptakan frontier baru perampasan. Indonesia, sejak era kolonial hingga hari ini, adalah salah satu frontier itu.

Jika kolonialisme Eropa abad ke-17 hingga ke-20 melahirkan bentuk awal *primitive accumulation*, maka pembangunan pascakolonial di Indonesia merupakan kelanjutannya dalam bentuk yang dilembagakan secara nasional. Sejak awal kemerdekaan, negara Indonesia menempatkan pembangunan sebagai proyek politik dan ideologis yang menjanjikan transformasi menuju modernitas. Namun di balik janji tersebut, pembangunan bekerja sebagai dispositif kekuasaan yang menstrukturkan siapa yang berhak atas tanah, siapa yang dianggap "terbelakang," dan siapa yang layak dimajukan. Arturo Escobar (1995) menyebut pembangunan sebagai "mesin produksi dunia ketiga," bukan hanya dalam arti ekonomi, tetapi juga dalam arti epistemologis: ia menciptakan kategori, bahasa, dan praktik yang membentuk realitas sosial. Dalam *Encountering Development*, Escobar menunjukkan bagaimana pembangunan memproduksi subjek dan wilayah yang dapat diintervensi oleh negara dan lembaga internasional, menjadikan kemiskinan bukan sekadar kondisi ekonomi,

Warna Nusa Creative

melainkan hasil politik dari proses pembentukan dunia modern.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Tania Murray Li (2007) dalam *The Will to Improve*, yang menelusuri bagaimana proyek pembangunan di Indonesia beroperasi melalui logika *governmentality* — cara negara mengatur kehidupan rakyat dengan dalih memperbaiki. Dalam praktiknya, pembangunan tidak sekadar menghadirkan infrastruktur, tetapi juga memproduksi hubungan kekuasaan yang mendefinisikan siapa yang rasional, siapa yang primitif, siapa yang produktif, dan siapa yang harus "diperbaiki." Melalui proyek-proyek pembangunan, modernitas tidak hanya mengatur ekonomi, tetapi juga mengatur cara berpikir, berperilaku, dan memahami dunia. Dengan demikian, pembangunan tidak netral; ia adalah bentuk kekuasaan yang memproduksi ketimpangan dengan nama kemajuan.

Bila dilihat secara historis, proyek pembangunan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari warisan kolonial. Apa yang disebut "pembangunan nasional" pada dasarnya merupakan kelanjutan dari *civilizing mission* kolonial, hanya dengan bahasa baru. Kolonialisme Belanda mengklaim dirinya membawa "peradaban" bagi Hindia Timur; negara Indonesia pascakolonial mengklaim dirinya membawa "kemajuan" bagi rakyat. Dalam keduanya, subjek yang menjadi sasaran intervensi tetap sama: masyarakat desa, petani, dan masyarakat adat yang dianggap belum modern. Foucault (1977) mengingatkan bahwa kekuasaan modern bekerja bukan hanya melalui represi, tetapi juga melalui produksi pengetahuan: dengan menciptakan kategori seperti "terbelakang," "tidak produktif," atau "tradisional," kekuasaan menciptakan dasar bagi tindakan yang tampak rasional untuk menaklukkan, menertibkan, dan mengatur. Itulah yang terjadi dalam sejarah Indonesia: pembangunan menjadi alat untuk melegitimasi pengambilalihan sumber daya dengan klaim moral bahwa itu demi kemajuan bersama.

Warna Nusa Creative

Dengan kerangka ini, kita dapat melihat bahwa perampasan — *dispossession* — bukan sekadar fenomena ekonomi, tetapi juga epistemologis dan kultural. Ia bekerja melalui bahasa, hukum, dan rasionalitas. Istilah-istilah seperti "tanah negara," "objek vital nasional," atau "kepentingan umum" bukan hanya kategori hukum, melainkan representasi ideologis yang menutupi kekerasan struktural di baliknya. Peluso dan Vandergeest (2001) menunjukkan bagaimana negara di Asia Tenggara menciptakan "*forest territories*" melalui pembatasan hukum dan peta kolonial, mengubah ruang hidup masyarakat menjadi objek administrasi. Proses serupa berlanjut di Indonesia pasca-kolonial: negara mengklaim kepemilikan atas tanah-tanah adat dan hutan dengan dalih pembangunan dan keamanan nasional. Hukum menjadi instrumen *accumulation by dispossession* — kekerasan yang disamarkan dalam bahasa legalitas.

Selain itu, pembangunan di Indonesia juga harus dibaca dalam konteks ketimpangan sistem dunia. Immanuel Wallerstein (1974) dalam *The Modern World-System* menempatkan negara-negara seperti Indonesia di posisi *periphery* dalam pembagian kerja global. Peran historis wilayah-wilayah pinggiran bukanlah untuk menjadi modern secara setara dengan pusat, tetapi untuk menopang akumulasi kapital di pusat melalui penyediaan bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar bagi produk industri. "Ketertinggalan" bukanlah penyimpangan dari modernitas, melainkan fungsi struktural dari kapitalisme dunia. Dalam pengertian ini, pembangunan di Indonesia berfungsi ganda: secara internal, ia menjadi proyek nasionalisme ekonomi; secara eksternal, ia memastikan integrasi yang lebih dalam ke dalam sistem kapitalisme global. Pembangunan menjadi bentuk baru imperialisme yang diinstitusikan melalui lembaga internasional, utang luar negeri, dan rezim investasi.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perampasan selalu hadir di setiap fase pembangunan. Pada masa kolonial, perampasan terjadi melalui *cultuurstelsel* dan privatisasi tanah

Media Mesa Creative

adat. Pada masa Orde Baru, ia dilembagakan melalui hukum kehutanan 1967, proyek pertambangan, dan ekspansi sawit yang dilakukan atas nama pembangunan nasional. Di era Reformasi, perampasan mengambil bentuk baru: privatisasi air, liberalisasi investasi, dan proyek infrastruktur raksasa yang mengatasnamakan partisipasi rakyat. Semua ini mencerminkan logika yang sama: negara dan kapital bekerja bersama untuk menciptakan kondisi bagi akumulasi melalui pengambilalihan sumber daya publik. Harvey (2003) menyebut proses ini sebagai "*consent to coercion*" — situasi di mana kekerasan struktural dilegitimasi melalui persetujuan formal warga, melalui hukum, kebijakan, atau wacana pembangunan.

Buku ini lahir dari kesadaran bahwa narasi pembangunan yang hegemonik telah menutupi dimensi kekerasan dalam sejarah Indonesia. Ia berupaya menulis ulang sejarah nasional dari perspektif *dispossession* — melihat pembangunan bukan sebagai jalan menuju kemajuan, tetapi sebagai proyek kekuasaan yang berulang kali merampas hak hidup rakyat. Melalui pendekatan historis dan teoretis, buku ini mengurai bagaimana perampasan menjadi logika berkelanjutan: dari kolonialisme VOC, tanam paksa, dan politik etis; ke nasionalisasi dan proyek agraria pasca-1945; ke rezim militeristik Orde Baru; hingga neoliberalisme pasca-1998. Masing-masing fase memiliki wajah yang berbeda, tetapi benang merahnya sama: akumulasi melalui pengambilalihan yang dilegitimasi oleh wacana pembangunan.

Tujuan utama buku ini bukan hanya untuk mengungkap sejarah perampasan, tetapi juga untuk menelusuri bagaimana kekuasaan bekerja melalui ide-ide yang tampak netral seperti "kemajuan" dan "rasionalitas ekonomi." Dengan membaca ulang konsep-konsep seperti pembangunan, modernitas, dan hukum, buku ini berupaya menunjukkan bahwa perampasan di Indonesia tidak hanya terjadi di ranah ekonomi, tetapi juga di ranah simbolik dan epistemik. Ia menelusuri bagaimana tubuh, waktu, tenaga, dan pengetahuan menjadi arena *dispossession* —

Mega Nusa Creative

dari kerja paksa di perkebunan kolonial hingga kerja fleksibel di pabrik modern, dari penyingkiran pengetahuan adat hingga dominasi rasionalitas teknokratik dalam kebijakan publik.

Dalam kerangka yang lebih luas, buku ini ingin berkontribusi pada diskusi global tentang kapitalisme, kolonialisme, dan kekuasaan. Ia menempatkan Indonesia bukan sebagai kasus pinggiran, tetapi sebagai medan utama di mana kontradiksi modernitas kapitalis bekerja. Dengan memadukan teori kritis (Marx, Harvey, Wallerstein, Escobar, Li, Foucault) dan pengalaman konkret rakyat Indonesia, buku ini ingin membangun jembatan antara analisis akademik dan praksis politik. Ia mengajak pembaca untuk mempertanyakan ulang asumsi-asumsi dasar tentang pembangunan: apakah kemajuan selalu berarti kesejahteraan? Apakah modernitas selalu berarti pembebasan? Dan apakah kita dapat membangun masa depan tanpa mengulang logika perampasan?

Lebih jauh, buku ini juga berupaya membuka ruang imajinasi politik baru — ruang untuk membayangkan bentuk kehidupan di luar logika kapitalisme ekstraktif. Di tengah krisis ekologis dan ketimpangan sosial yang semakin dalam, gagasan tentang commons, ekonomi solidaritas, dan ekologi politik rakyat menjadi penting untuk dipertimbangkan kembali (Federici, 2018; Ostrom, 1990). Indonesia memiliki banyak bentuk kehidupan kolektif dan tradisi pengelolaan sumber daya bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi alternatif bagi masa depan. Dengan menulis sejarah perampasan, kita sekaligus menulis kemungkinan untuk memulihkannya — untuk merebut kembali tanah, air, dan pengetahuan yang telah diambil.

Akhirnya, buku ini ingin menjadi undangan: undangan untuk melihat sejarah Indonesia bukan hanya sebagai kronologi pembangunan, tetapi sebagai medan pergulatan antara perampasan dan perlawanan, antara kekuasaan dan kehidupan. Karena selama perampasan masih disebut pembangunan, sejarah Indonesia belum selesai ditulis.

Visi Nusa Cerdas

DAFTAR PUSTAKA

Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press.

Federici, S. (2018). *Re-Enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons*. PM Press.

Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books.

Hall, D. (2015). *Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab*. Third World Quarterly, 34(9), 1582–1604.

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.

Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press.

Marx, K. (1867/1990). *Capital*: Volume I. Penguin Classics.

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Journal of Asian Studies*, 60(3), 761–812.

Wallerstein, I. (1974). *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. Academic Press.

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

Bagian I — Dunia dan Teori Perampasan

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

1

INDONESIA DALAM SISTEM DUNIA

"*The capitalist world-economy has always been a system of unequal exchange between core and periphery*."

Immanuel Wallerstein, *The Modern World-System* (1974)

Sejarah modern Indonesia tidak bisa dipahami hanya sebagai kisah nasional tentang kemerdekaan dan pembangunan, melainkan sebagai bagian integral dari sejarah kapitalisme global. Sejak awal abad ke-17, wilayah Nusantara telah terseret ke dalam orbit sistem dunia modern yang terbentuk di Eropa Barat. Dalam kerangka teori sistem dunia (*World-Systems Theory*) yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein (1974, 1989), dunia modern sejak abad ke-16 bukan sekadar kumpulan negara-bangsa yang berdiri sendiri, tetapi sebuah *capitalist world-economy* — sistem ekonomi global yang tersusun secara hierarkis, terdiri dari wilayah inti (*core*), semi-periferi (*semi-periphery*), dan periferi (*periphery*). Hubungan antara wilayah-wilayah ini ditandai oleh pembagian kerja internasional yang tidak seimbang, di mana *core* mendominasi proses akumulasi kapital dengan memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja, dan pasar dari *periphery*.

Dalam sistem ini, wilayah *core* (Eropa Barat, kemudian Amerika Serikat, Jepang, dan kini juga Cina) mengendalikan teknologi, modal, dan perdagangan global. Sementara itu, *periphery* — termasuk Asia Tenggara dan kepulauan Nusantara — disusun secara struktural untuk menyediakan bahan mentah, tenaga

Media Nusa Creative

kerja murah, dan komoditas ekspor yang menopang pertumbuhan kapitalisme di pusat. Keterbelakangan, kemiskinan, dan ketergantungan negara-negara periferi bukanlah akibat kegagalan internal, melainkan konsekuensi langsung dari peran yang mereka mainkan dalam pembagian kerja global (Frank, 1967; Wallerstein, 1974). Dengan kata lain, "ketertinggalan" bukan deviasi dari norma modernitas, tetapi justru fungsi struktural dari kapitalisme dunia.

Ketika *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) datang ke Nusantara pada awal abad ke-17, mereka tidak sekadar berdagang rempah-rempah, melainkan membawa logika kapitalisme global yang baru lahir. VOC adalah perusahaan multinasional pertama di dunia — entitas hibrid yang menggabungkan kekuasaan militer, politik, dan ekonomi. Ia menandai tahap awal integrasi kepulauan Nusantara ke dalam sistem dunia kapitalis (Reid, 1993). Melalui monopoli perdagangan pala dan cengkih, pembentukan pelabuhan-pelabuhan seperti Batavia, dan penguasaan wilayah strategis di Ambon, Banda, dan Banten, VOC menciptakan sistem produksi dan sirkulasi komoditas yang berorientasi global. Penduduk lokal kehilangan kendali atas sumber daya dan jalur perdagangan mereka; kekayaan alam Nusantara dialirkan ke Amsterdam dan kota-kota pelabuhan Eropa. Dalam bahasa Marx (1867/1990), ini adalah bentuk awal dari *primitive accumulation* — perampasan paksa yang membentuk dasar bagi ekspansi kapitalisme.

Melalui integrasi kolonial ini, Nusantara menempati posisi periferi yang khas yaitu sebagai "penghasil komoditas tropis" yang dibutuhkan pusat industri dunia. Ketika Wallerstein (1979) menjelaskan bahwa kapitalisme global tumbuh melalui *unequal exchange* — pertukaran yang tidak setara antara pusat dan pinggiran — Indonesia adalah contoh yang nyaris sempurna. Dari rempah-rempah abad ke-17, gula dan kopi abad ke-19, hingga karet dan minyak bumi abad ke-20, semua

Media Musa Creative

siklus komoditas besar Indonesia menunjukkan pola yang sama yakni nilai ditransfer dari periferi ke *core* melalui mekanisme perdagangan, kolonialisme, dan negara nasional. Bahkan setelah kemerdekaan, hubungan ini tidak benar-benar terputus, hanya berubah bentuk.

Dalam kerangka sistem dunia, kolonialisme Belanda tidak sekadar menjajah tanah, melainkan menstrukturkan ruang ekonomi Nusantara agar sesuai dengan kebutuhan kapital global. Sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*, 1830–1870) adalah contoh klasik dari bagaimana negara kolonial menciptakan mekanisme *coerced commodification* — pemaksaan produksi komoditas ekspor untuk kepentingan negara pusat kolonial, yaitu Belanda (Elson, 1994). Di bawah *Cultuurstelsel*, petani Jawa diwajibkan menanam kopi, tebu, dan nila untuk disetor ke kas kerajaan Belanda. Sementara itu, hasil dari sistem ini mendanai pembangunan infrastruktur dan industri di Eropa (Booth, 1988). Pembangunan di wilayah *core* dengan demikian didanai oleh kemiskinan di wilayah *periphery*.

Setelah 1870, ketika Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) membuka akses bagi perusahaan swasta Eropa untuk menguasai tanah di Hindia Belanda, pola hubungan itu semakin menguat. Perkebunan-perkebunan raksasa (*ondernemingen*) di Sumatra, Pulau Jawa, serta wilayah Kalimantan dan sebagian di Sulawesi serta Maluku tidak berdiri untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi untuk memenuhi permintaan global atas gula, karet, dan tembakau. Para pekerja kontrak (*koelie*) direkrut dari Jawa, Cina, dan India, dipaksa bekerja dalam kondisi mirip perbudakan (Stoler, 1985). Melalui sistem inilah Indonesia semakin terkunci dalam peran strukturalnya sebagai periferi, wilayah yang fungsi utamanya adalah menyediakan tenaga dan bahan baku murah bagi kapital global.

Teori sistem dunia menolak pandangan modernisasi yang melihat "ketertinggalan" negara Dunia Ketiga sebagai akibat

Media Nusa Creative

keterlambatan evolusi internal. Sebaliknya, Wallerstein (1989) dan Frank (1967) menegaskan bahwa *underdevelopment* justru diciptakan oleh hubungan eksploitasi struktural antara *core* dan *periphery*. Indonesia tidak "gagal" menjadi modern; ia dibuat tetap tidak setara agar sistem dunia kapitalis tetap berfungsi. Pembangunan di Barat bergantung pada keterbelakangan di Timur. Dalam istilah Andre Gunder Frank (1967), "*the development of underdevelopment*" adalah logika bawaan kapitalisme global.

Setelah kemerdekaan pada 1945, posisi struktural Indonesia dalam sistem dunia tidak serta-merta berubah. Negara nasional memang menggantikan pemerintahan kolonial, namun hubungan ekonomi global tetap mempertahankan logika *dependent accumulation* (Amin, 1976). Melalui bantuan luar negeri, investasi asing, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, kapital global terus memanfaatkan Indonesia sebagai periferi baru yang "berdaulat." Pembangunan nasional pascakolonial, terutama sejak 1966 di bawah Orde Baru, secara efektif menjadi proyek integrasi ulang ke dalam ekonomi kapitalis global, kali ini melalui mekanisme utang dan liberalisasi (Robison, 1986).

Teori sistem dunia menjelaskan fenomena ini melalui konsep *semi-periphery* — wilayah yang memainkan peran antara *core* dan *periphery*. Indonesia pada masa Orde Baru berfungsi sebagai *semi-periphery* subordinat, artinya ia memiliki struktur industri dan negara yang tampak kuat, tetapi fungsinya tetap menyalurkan surplus ke pusat melalui ekspor bahan mentah, manufaktur padat karya, dan repatriasi keuntungan perusahaan asing (Arrighi, 1994). Industri-industri besar seperti tambang Freeport, Caltex, dan perkebunan sawit bukanlah tanda industrialisasi mandiri, melainkan instrumen akumulasi kapital global. Seperti yang dijelaskan Harvey (2003), kapitalisme terus hidup dengan membuka *new spaces of accumulation* — wilayah baru untuk perampasan sumber

Media Nusa Creative

daya dan tenaga. Indonesia adalah salah satu ruang ekspansi itu.

Di sinilah teori sistem dunia membantu kita memahami mengapa pembangunan di Indonesia kerap bersifat paradoksal. Di satu sisi, ia menampilkan kemajuan ekonomi seperti pertumbuhan, urbanisasi, industrialisasi, digitalisasi. Namun di sisi lain, ia terus mereproduksi ketimpangan sosial dan ekologis, mulai dari penggusuran, deforestasi, dan kemiskinan pedesaan. Pembangunan nasional tampak sebagai proyek kemerdekaan, tetapi secara struktural ia menegaskan posisi subordinat Indonesia dalam ekonomi global. Pusat-pusat akumulasi modal — baik di Amsterdam abad ke-17, Washington abad ke-20, atau Beijing abad ke-21 — selalu memerlukan wilayah seperti Indonesia untuk menopang pertumbuhannya.

Teori sistem dunia juga membuka ruang bagi pembacaan sejarah Indonesia yang melampaui batas waktu kolonial dan nasional. Jika kita memandang kapitalisme global sebagai sistem yang berumur lima abad (Arrighi, 1994), maka sejarah Indonesia bukanlah sejarah yang terpisah, melainkan bagian integral dari sistem itu. VOC, tanam paksa, liberalisasi kolonial, nasionalisasi Orde Lama, dan industrialisasi Orde Baru adalah variasi dari logika yang sama: penciptaan dan reproduksi ketergantungan melalui perampasan. Dengan demikian, sejarah ekonomi Indonesia adalah sejarah transformasi bentuk perampasan — dari kekerasan militer ke hukum kolonial, dari nasionalisasi ke neoliberalisasi.

Dalam konteks ini, teori sistem dunia memberikan lensa yang radikal/progresif terhadap gagasan "kemajuan." Pembangunan bukanlah jalan keluar dari keterbelakangan, melainkan bentuk artikulasi baru dari posisi periferi dalam sistem global. Setiap proyek modernitas di Indonesia — dari tanam paksa abad ke-19 hingga megaproyek Ibu Kota Nusantara abad ke-21 —

Media Nusa Creative

adalah upaya untuk memperdalam integrasi dalam sistem kapitalisme dunia, bukan untuk keluar darinya. Seperti dicatat Wallerstein (1989), sistem dunia kapitalis selalu memperluas diri dengan "menginkorporasi ruang-ruang baru ke dalam logika akumulasinya." Dalam hal ini, pembangunan Indonesia adalah bentuk perpanjangan tangan dari logika ekspansi itu.

Namun teori sistem dunia tidak boleh dipahami secara deterministik. Ia juga membuka ruang bagi kontradiksi dan resistensi. Indonesia bukan sekadar korban pasif, melainkan juga arena perjuangan antara berbagai kekuatan sosial yang berusaha mengubah posisi strukturalnya. Gerakan petani, masyarakat adat, dan buruh adalah bentuk-bentuk upaya untuk menegosiasikan ulang pembagian kerja global dari bawah. Tapi dalam banyak kasus, resistensi ini dihadapkan pada kekuasaan negara dan kapital global yang bersekutu — kekuatan yang menjadikan pembangunan sebagai moralitas dan modernitas sebagai takdir.

Dengan demikian, memahami Indonesia melalui teori sistem dunia berarti membaca ulang sejarahnya sebagai sejarah *inclusion and subordination* dalam kapitalisme global. Pembangunan dan modernitas Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran strukturalnya sebagai periferi yang menanggung beban akumulasi kapital dunia. Ketertinggalan bukanlah kegagalan, tetapi konsekuensi logis dari posisi periferi yang terus direproduksi oleh proyek-proyek kemajuan itu sendiri. Inilah paradoks sejarah Indonesia: semakin kita berusaha "maju," semakin dalam kita terjerat dalam logika global yang membuat kemajuan itu mustahil bagi kebanyakan orang.

Media Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Amin, S. (1976). *Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism*. Monthly Review Press.

Arrighi, G. (1994). *The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times*. Verso.

Booth, A. (1988). *Agricultural Development in Indonesia*. Allen & Unwin.

Elson, R. E. (1994). *Village Java under the Cultivation System, 1830–1870*. Allen & Unwin.

Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press.

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.

Marx, K. (1990). *Capital*, Volume I. (B. Fowkes, Trans.). Penguin. (Original work published 1867)

Reid, A. (1993). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680*. Yale University Press.

Robison, R. (1986). *Indonesia: The Rise of Capital*. Allen & Unwin.

Stoler, A. L. (1985). *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870–1979*. Yale University Press.

Vickers, A. (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press.

Wallerstein, I. (1974). *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. Academic Press.

Media Nusa Creative

Wallerstein, I. (1989). *The Modern World-System III: The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730–1840s*. Academic Press.

Media Nusa Creative

2

DARI AKUMULASI PRIMITIF KE AKUMULASI MELALUI PERAMPASAN

"*The expropriation of the agricultural producer, of the peasant, from the soil is the basis of the whole process*."

Karl Marx, *Capital*, Vol. I (1867)

Dalam sejarah kapitalisme, perampasan bukanlah penyimpangan moral, melainkan mekanisme struktural yang memungkinkan kelahiran dan keberlangsungan sistem itu sendiri. Marx (1867/1990) menyebutnya sebagai *primitive accumulation* — akumulasi primitif — yaitu proses historis yang memisahkan produsen langsung dari alat produksinya. Proses ini menciptakan dua kelas sosial yang menjadi syarat utama bagi kapitalisme yaitu kelas buruh bebas yang tidak memiliki apa-apa selain tenaga kerjanya, dan kelas pemilik modal yang menguasai alat-alat produksi. Dengan kata lain, kapitalisme tidak lahir dari kerja keras atau inovasi moral sebagaimana sering digambarkan dalam mitos ekonomi liberal, melainkan dari perampasan besar-besaran terhadap tanah, tenaga, dan sumber kehidupan manusia.

Dalam *Capital*, Marx menggambarkan peralihan dari feodalisme ke kapitalisme di Inggris bukan sebagai evolusi damai, melainkan sebagai "sejarah berdarah dan penuh kekerasan" (Marx, 1990). Para petani digusur dari tanah komunal mereka melalui *enclosure movement* — kebijakan privatisasi lahan yang mengubah tanah bersama menjadi

Media Nusa Creative

properti pribadi. Mereka yang sebelumnya hidup dari sistem subsisten dipaksa menjadi buruh upahan di kota-kota industri. Proses inilah yang disebut Marx sebagai *divorcing the producer from the means of production,* artinya pemisahan manusia dari alat produksinya. Ia tidak hanya mengubah hubungan ekonomi, tetapi juga tatanan sosial, politik, dan moral, termasuk munculnya individualisme, rasionalitas ekonomi, dan pandangan dunia kapitalistik. Akumulasi primitif dengan demikian bukan hanya transformasi ekonomi, tetapi proses historis pembentukan subjek kapitalis.

Bagi Marx, *primitive accumulation* adalah momen asal, tetapi bukan semata peristiwa masa lalu. Dalam *Capital* jilid I, Marx menulis bahwa akumulasi primitif "tidak hanya merupakan asal-usul kapitalisme, tetapi juga terus berulang sebagai momen reproduksi sistem" (Marx, 1990). Namun, ia tidak sempat mengembangkan dimensi reproduktif ini lebih jauh. Di sinilah David Harvey (2003, 2004) melanjutkan dan memperluas gagasan Marx dengan konsep *accumulation by dispossession* — akumulasi melalui perampasan — untuk menjelaskan bahwa praktik perampasan bukan hanya fase transisi menuju kapitalisme, tetapi mekanisme permanen yang menopang kapitalisme modern.

Dalam *The New Imperialism*, Harvey (2003) berargumen bahwa kapitalisme tidak pernah berhenti melakukan perampasan baru. Ketika sistem menghadapi krisis kelebihan akumulasi — situasi di mana modal tidak lagi dapat menemukan ruang investasi yang menguntungkan — ia menciptakan ruang-ruang baru untuk menyalurkan surplus tersebut melalui perampasan. Bentuk-bentuk baru perampasan mencakup privatisasi aset publik, liberalisasi pasar, komodifikasi sumber daya alam, dan finansialisasi utang. Inilah yang membuat kapitalisme terus hidup, dengan cara mengubah apa yang sebelumnya bukan komoditas menjadi sumber akumulasi baru. Harvey (2003)

Media Nusa Creative

menyebutnya "*the continuation and proliferation of primitive accumulation in contemporary forms*."

Perampasan dalam kapitalisme kontemporer berlangsung melalui berbagai mekanisme yang tampak sah dan rasional. Dalam konteks neoliberalisme, misalnya, negara memainkan peran sentral dalam mengubah sumber daya publik menjadi objek investasi. Proses privatisasi — air, energi, pendidikan, dan tanah — adalah bentuk klasik *accumulation by dispossession*. Harvey (2005) menegaskan bahwa negara neoliberal berfungsi sebagai "*the agent of dispossession*," menggunakan hukum dan kebijakan untuk mengalihkan kepemilikan kolektif ke tangan swasta. Dengan kata lain, perampasan tidak lagi memerlukan pedang dan meriam seperti pada masa colonial, tetapi ia bekerja melalui hukum, utang, dan proyek pembangunan.

Konsep ini menjelaskan mengapa krisis ekonomi kapitalisme selalu diikuti oleh gelombang perampasan baru. Krisis finansial global 1970-an, misalnya, melahirkan gelombang neoliberal yang mendorong privatisasi dan deregulasi di seluruh dunia (Harvey, 2005). Negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, dipaksa membuka pasarnya melalui paket penyesuaian struktural dari IMF dan Bank Dunia. Hutang luar negeri menjadi alat politik untuk menundukkan negara pascakolonial agar tunduk pada logika pasar global. Dalam istilah Harvey (2003), utang adalah bentuk modern dari penjajahan, ia mengikat negara melalui mekanisme keuangan alih-alih kekuatan militer.

Dengan demikian, *accumulation by dispossession* bukan hanya teori ekonomi, tetapi kerangka untuk membaca transformasi kekuasaan global. Ia menjelaskan bagaimana kapitalisme bertahan hidup dengan menyalurkan krisisnya ke pinggiran dunia, melalui ekspansi spasial dan perampasan baru. Inilah yang disebut Harvey sebagai "*the spatial fix*" — penyelesaian

Media Nusa Creative

spasial terhadap krisis kapitalisme (Harvey, 1981). Ketika ruang lama jenuh oleh akumulasi, sistem mencari ruang baru — baik secara geografis (ke Dunia Ketiga) maupun institusional (privatisasi, finansialisasi, digitalisasi). Dalam konteks inilah, dunia pascakolonial menjadi *frontier* baru perampasan.

Bagi dunia pascakolonial seperti Indonesia, perampasan bukanlah masa lalu kolonial, tetapi kondisi struktural yang terus direproduksi. Kolonialisme menciptakan pola pemisahan — antara pemilik modal dan produsen langsung — yang diwariskan dan diperluas oleh negara nasional. Setelah kemerdekaan, elite politik Indonesia mewarisi struktur ekonomi kolonial yang bergantung pada ekspor bahan mentah dan kontrol negara atas sumber daya. Reformasi agraria yang dijanjikan pasca-1945 gagal terlaksana, sementara reformasi 1960-an berujung pada kontrareformasi yang memperkuat aliansi antara negara, militer, dan kapital swasta (White, 1989). Ketika Orde Baru berkuasa pada 1966, proyek pembangunan nasional dijalankan sebagai bentuk baru *accumulation by dispossession*.

Kebijakan pembangunan Orde Baru — dari proyek transmigrasi hingga hutan tanaman industri — secara sistematis mengalihkan sumber daya dari masyarakat adat dan petani kecil ke korporasi besar dan negara. Undang-undang Kehutanan 1967 dan Pertambangan 1967 mendefinisikan 70% wilayah Indonesia sebagai "tanah negara," menyingkirkan hak-hak adat yang telah eksis selama berabad-abad (Peluso, 1992). Tanah, hutan, dan tambang dijadikan aset strategis untuk menarik investasi asing. Dalam istilah Harvey, ini adalah "*state-mediated dispossession*" yakni perampasan yang dilegitimasi oleh proyek pembangunan. Ideologi pembangunan layaknya berfungsi seperti agama sekuler yang menjustifikasi pemindahan kepemilikan dengan alasan kemajuan nasional.

Media Nusa Creative

Setelah krisis ekonomi 1997–1998, proses perampasan tidak berhenti, justru menemukan bentuk barunya dalam neoliberalisme pascareformasi. Melalui desentralisasi dan liberalisasi investasi, perampasan menjadi lebih tersebar dan kompleks. Pemerintah daerah menjadi mediator baru bagi investasi modal, sementara konflik agraria meningkat di seluruh wilayah (Li, 2014; Hall, Hirsch, & Li, 2011). Sumber daya yang sebelumnya dianggap milik publik — tanah, air, udara, bahkan pengetahuan tradisional — dikomodifikasi atas nama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam logika ini, "*green economy*" dan "*sustainability*" sering berfungsi sebagai wajah baru dari *accumulation by dispossession* yang mengubah ekologi dan adat menjadi kapital hijau.

Perampasan dalam konteks pascakolonial juga tidak hanya material, tetapi epistemik. Modernitas, yang diimpor dari proyek kolonial, terus menegaskan dominasi pengetahuan Barat atas cara hidup lokal. Arturo Escobar (1995) menyebut pembangunan sebagai "*regime of representation*" yang memproduksi masyarakat Dunia Ketiga sebagai subjek yang terbelakang dan butuh dibimbing. Dalam kerangka ini, perampasan bukan hanya soal tanah dan tenaga, tetapi juga soal makna kehidupan, bagaimana penghapusan adalah cara lain untuk memahami dunia. Modernitas memonopoli rasionalitas dan menghapus pluralitas pengetahuan lokal. Inilah dimensi *epistemic dispossession* yang menjadi sisi tak kasat mata dari akumulasi kapital global.

Hubungan antara *primitive accumulation* Marx dan *accumulation by dispossession* Harvey dengan demikian adalah hubungan genealogis. Jika Marx menjelaskan "kelahiran kapitalisme melalui kekerasan," Harvey menjelaskan "kelangsungan kapitalisme melalui kekerasan yang diperbarui." Keduanya berbicara tentang mekanisme pemisahan — pemisahan manusia dari tanah, kerja, dan komunitasnya —

Media Nusa Creative

sebagai inti dari akumulasi. Dalam konteks dunia pascakolonial, mekanisme ini bekerja melalui kombinasi kekerasan langsung dan kekerasan structural yang oleh Galtung (1969) bisa melalui senjata, hukum, utang, dan narasi pembangunan. Kapitalisme global hidup bukan karena menciptakan kekayaan baru, tetapi karena terus menemukan cara baru untuk merampas yang sudah ada.

Dari sini kita bisa memahami bahwa pembangunan di Indonesia bukan sekadar proses modernisasi, melainkan bagian dari logika akumulasi global. Setiap proyek pembangunan — jalan tol, bendungan, kawasan industri, *food estate*, atau ibu kota baru — adalah ruang baru bagi perampasan, ruang di mana negara dan kapital bekerja sama untuk menyalurkan surplus global dan menormalisasi ketimpangan. Dalam hal ini, *accumulation by dispossession* adalah kunci untuk membaca bagaimana kolonialisme bertransformasi menjadi pembangunan, dan kekerasan menjadi hukum.

Konsep Marx dan Harvey menegaskan bahwa kapitalisme tidak pernah menjadi sistem yang menciptakan kemakmuran universal. Ia selalu bergantung pada pemisahan dan penghisapan: dari *enclosure* di Inggris abad ke-16, ke *cultuurstelsel* di Jawa abad ke-19, hingga privatisasi air dan hutan di Indonesia abad ke-21. Dalam setiap tahap, perampasan menjadi motor kemajuan yang menyingkirkan sebagian besar manusia dari hasil kerja mereka sendiri. Karenanya, untuk memahami modernitas Indonesia, kita tidak boleh bertanya "seberapa jauh kita sudah maju," tetapi "siapa yang harus dirampas agar kemajuan itu terjadi."

Media Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press.

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.

Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.

Harvey, D. (1981). *The Limits to Capital*. Basil Blackwell.

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.

Harvey, D. (2004). The "New" Imperialism: Accumulation by Dispossession. *Socialist Register*, 40, 63–87.

Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press.

Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.

Marx, K. (1990). *Capital*, Volume I. (B. Fowkes, Trans.). Penguin. (Original work published 1867)

Peluso, N. L. (1992). *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. University of California Press.

White, B. (1989). *Problems in the Empirical Analysis of Agrarian Differentiation*. In G. Hart, A. Turton, & B. White (Eds.), *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia* (pp. 15–30). University of California Press.

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

3

PEMBANGUNAN SEBAGAI IDEOLOGI: MODERNITAS DAN KEKUASAAN

"*Development was—and continues to be—a powerful discourse that creates the Third World as a field of intervention*."
Arturo Escobar, *Encountering Development* (1995)

"*Improvement is a faith and a practice. It legitimates interventions that reallocate access to resources, with profound effects on the lives of those improved*."
Tania Murray Li, *The Will to Improve* (2007)

Pembangunan sering dipahami sebagai upaya moral dan teknis untuk memajukan masyarakat, menghapus kemiskinan, dan membawa modernitas ke dunia yang "tertinggal." Namun bagi teori kritis pascakolonial, pembangunan tidak netral. Ia bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan rezim kekuasaan dan pengetahuan yang memproduksi cara kita memahami dunia. Dalam kerangka inilah Arturo Escobar (1995) menyebut pembangunan sebagai *discourse* — serangkaian praktik, institusi, dan narasi yang menciptakan "Dunia Ketiga" sebagai objek intervensi. Pembangunan bukan jawaban atas keterbelakangan, melainkan mesin yang memproduksi keterbelakangan agar bisa diatasi.

Escobar, terinspirasi oleh Michel Foucault (1978), berargumen bahwa sejak akhir Perang Dunia II, pembangunan menjadi *dispositif of power* — seperangkat mekanisme wacana dan institusi yang mengatur kehidupan manusia melalui pengetahuan, data, dan proyek. Setelah kolonialisme formal

Nusa Creative

berakhir, pembangunan mengambil alih fungsi "misi peradaban" Barat. Melalui lembaga seperti Bank Dunia, IMF, dan USAID, dunia pascakolonial dikonstruksi sebagai ruang ketidaktahuan dan kemiskinan yang menuntut intervensi teknokratis. Sebagaimana kolonialisme mengklaim membawa pencerahan kepada "yang liar," pembangunan mengklaim membawa modernitas kepada "yang terbelakang." Perbedaannya hanya terletak pada bahasa: *civilizing mission* berganti nama menjadi *nation building*.

Dalam *Encountering Development*, Escobar (1995) menunjukkan bagaimana istilah "*underdeveloped*" — pertama kali dipopulerkan oleh pidato Presiden AS Harry Truman pada 1949 — menciptakan pembagian dunia baru antara "yang maju" dan "yang tertinggal." Dunia pascakolonial tidak lagi dijajah secara teritorial, tetapi dijajah secara *epistemic* yang dijadikan ruang di mana definisi kemajuan, rasionalitas, dan kesejahteraan ditentukan oleh standar Barat. Di sini pembangunan berfungsi sebagai kekuasaan produktif (*productive power*), bukan menindas secara langsung, melainkan menciptakan subjek yang dapat diatur. Ia membentuk negara, masyarakat, dan individu agar berpikir dan bertindak sesuai logika modernitas kapitalis.

Konsep ini sangat relevan bagi konteks Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, pembangunan dijadikan ideologi negara yang menggantikan kolonialisme tetapi tetap membawa semangat yang sama: "memajukan" yang dianggap tertinggal. Dalam pidato-pidato Soekarno, terutama pada era Demokrasi Terpimpin, pembangunan dikaitkan dengan revolusi nasional — proyek besar membangun bangsa yang kuat, berdaulat, dan berdiri sejajar dengan Barat. Namun, ideologi pembangunan ini menemukan bentuk hegemoniknya di bawah Orde Baru (1966–1998). Soeharto dan teknokratnya menjadikan pembangunan (pembangunan nasional) sebagai asas tunggal politik negara. Semua kebijakan — dari pertanian hingga pertambangan, dari pendidikan hingga keluarga — didefinisikan dalam bahasa pembangunan.

Warna Nusa Creative

Pembangunan Orde Baru menciptakan *aparatus of improvement* (Li, 2007) yaitu sebuah bentuk jaringan birokrat, teknokrat, militer, dan konsultan internasional yang menyebarkan keyakinan bahwa kemajuan dapat diukur, diatur, dan dipercepat melalui intervensi negara. Ide "pemerataan pembangunan" berfungsi untuk menutupi kenyataan bahwa proyek-proyek pembangunan justru menciptakan ketimpangan baru. Seperti ditunjukkan oleh Tania Murray Li (2007) dalam *The Will to Improve*, pembangunan adalah "iman dan praktik" — keyakinan bahwa masyarakat bisa diperbaiki jika diatur sesuai logika efisiensi dan produktivitas. Tetapi dalam praktiknya, upaya "perbaikan" ini selalu disertai perampasan yang berbentuk redistribusi sumber daya dari masyarakat ke negara atau korporasi atas nama kemajuan.

Bagi Li, "*improvement*" bukan sekadar niat baik, tetapi tindakan politik yang mengatur siapa yang berhak atas tanah, sumber daya, dan kehidupan. Ketika negara membangun proyek irigasi, hutan tanaman industri, atau transmigrasi, ia tidak hanya memindahkan manusia dan sumber daya, namun ia juga menata ulang cara hidup, relasi sosial, dan struktur kekuasaan. Pembangunan menjadi cara bagi negara untuk memperluas kontrolnya, sambil menciptakan citra sebagai pelindung rakyat. Dalam istilah Foucault (1991), ini adalah bentuk *governmentality*, yaitu kekuasaan yang tidak menindas secara frontal, tetapi mengatur kehidupan melalui kebijakan, statistik, dan normalisasi.

Pembangunan Indonesia karenanya dapat dibaca sebagai kelanjutan logika kolonial dalam bentuk nasional. Kolonialisme Belanda mengklaim membawa peradaban (*beschaving*) kepada pribumi; negara Orde Baru mengklaim membawa pembangunan kepada rakyat. Dalam kedua kasus itu, kekuasaan bekerja melalui narasi moral bahwa intervensi atas nama kemajuan adalah bentuk kasih sayang. "Negara tahu apa yang terbaik bagi rakyatnya," begitu doktrin yang berulang dari zaman kolonial hingga sekarang. Dalam kerangka ini, modernitas menjadi ideologi yang menaturalisasi kekuasaan

Media Nusa Creative

yang mengubah perampasan menjadi reformasi, pemaksaan menjadi kemajuan.

Sejarawan seperti Benedict Anderson (1990) menunjukkan bahwa nasionalisme pascakolonial di Asia sering kali mereproduksi bentuk-bentuk kekuasaan kolonial — dari sistem birokrasi hingga logika pembangunan. Negara bangsa menggantikan imperium, tetapi cara memandang rakyat tidak berubah yaitu sebagai objek yang harus ditata. Dalam kasus Indonesia, proyek pembangunan desa (Inpres Desa Tertinggal), transmigrasi, dan eksploitasi sumber daya alam adalah bentuk "pemerintahan kolonial dari dalam." Pembangunan menjadi alat integrasi nasional, tetapi dengan harga mahal: penghancuran otonomi lokal dan penyeragaman cara hidup. Modernitas hadir sebagai proyek disiplin sosial.

James Ferguson (1994) menyebut fenomena ini sebagai *anti-politics machine*, yaitu sebuah mekanisme di mana pembangunan memindahkan isu-isu politik — ketimpangan, kekuasaan, eksploitasi — ke dalam ranah teknis. Dalam diskursus pembangunan, kemiskinan bukan akibat struktur ekonomi global atau ketimpangan kepemilikan tanah, melainkan akibat "kurangnya produktivitas" atau "pendidikan rendah." Dengan cara ini, pembangunan menyingkirkan politik dari ruang publik, menggantikannya dengan teknokrasi. Ia mensterilkan konflik sosial dan menampilkan kemajuan sebagai hasil rasional dari kebijakan yang ilmiah. Escobar (1995) menyebutnya *the depoliticization of poverty* yang artinya kemiskinan dijadikan data, bukan merupakan gejala ketidakadilan.

Kekuatan ideologis pembangunan terletak pada kemampuannya menciptakan "rezim kebenaran" (Foucault, 1980) — seperangkat klaim yang diterima sebagai nalar universal. Di bawah Orde Baru, pembangunan menjadi satu-satunya bahasa yang sah untuk berbicara tentang masa depan. Kritik terhadap proyek pembangunan dituding anti-nasional atau subversif. Pembangunan menjadi moralitas negara, dan

Mbak Nisa Creative

modernitas menjadi agama baru. Ketika Li (2007) menulis bahwa *improvement is a will to govern*, ia mengingatkan bahwa setiap klaim untuk memperbaiki selalu mengandung kekuasaan untuk menentukan apa yang dianggap rusak. Dalam konteks Indonesia, "kemiskinan," "ketertinggalan," dan "desa" diproduksi oleh wacana pembangunan agar bisa dikelola oleh negara dan pasar.

Era pascareformasi tidak mengubah logika ini secara mendasar. Hanya bahasanya yang berganti, bagaimana istilah "pembangunan" digantikan oleh "investasi," "daya saing," dan "pertumbuhan hijau." Program infrastruktur masif, proyek *food estate*, dan ekspansi sawit dilandasi retorika kesejahteraan dan ketahanan pangan, tetapi tetap berujung pada perampasan ruang hidup masyarakat adat dan petani. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dikampanyekan oleh Bank Dunia dan lembaga global lainnya adalah bentuk mutakhir dari apa yang disebut Li (2014) sebagai *the frontier of capital* — wilayah baru yang dijadikan sasaran ekspansi kapital dengan legitimasi ekologis. Perampasan kini dibungkus dalam bahasa keberlanjutan.

Pembangunan dalam konteks ini bekerja sebagai ideologi hegemonik yang menyatukan negara, pasar, dan masyarakat dalam satu horizon nilai: kemajuan. Ia menyingkirkan alternatif lain dalam memahami kehidupan, seperti kearifan lokal, ekonomi moral, atau hubungan spiritual dengan tanah. Dengan kata lain, pembangunan memonopoli imajinasi tentang masa depan. Seperti yang ditulis Timothy Mitchell (2002), modernitas menciptakan "*world as exhibition*" yaitu sebuah dunia dipentaskan sebagai proyek kemajuan yang sudah pasti, sementara penderitaan yang dihasilkannya disembunyikan sebagai "biaya pembangunan." Pembangunan bukan hanya mengatur ekonomi, tetapi juga mengatur apa yang bisa dipikirkan dan diinginkan.

Membaca pembangunan sebagai dispositif kekuasaan berarti menolak pandangan bahwa ia hanyalah kebijakan atau strategi

Media Nusa Creative

ekonomi. Pembangunan adalah cara modernitas bekerja sebagai kekuasaan: ia membentuk subjek yang patuh, menciptakan tatanan sosial baru, dan menaturalisasi perampasan sebagai kemajuan. Dalam sejarah Indonesia, proyek pembangunan adalah cermin dari kolonialisme yang berganti wajah. Dulu Belanda datang dengan dalih memajukan bumiputra; kini negara dan korporasi datang dengan janji meningkatkan kesejahteraan. Namun hasilnya serupa yaitu pengambilalihan tanah, tenaga, dan pengetahuan dari rakyat untuk akumulasi kapital.

Escobar (1995) dan Li (2007, 2014) mengajak kita melihat pembangunan bukan sebagai kebijakan yang gagal, melainkan sebagai bentuk kekuasaan yang berhasil — karena ia membuat ketimpangan tampak alamiah. Modernitas menjanjikan kemajuan, tetapi di balik janji itu tersembunyi logika eksklusi: tidak semua orang diundang ke masa depan. Dalam istilah Li (2014), *frontier* pembangunan selalu disertai *dispossession*, yaitu penciptaan ruang-ruang baru bagi akumulasi melalui penghapusan bentuk-bentuk kehidupan yang dianggap tidak produktif. Inilah ironi pembangunan Indonesia — proyek yang menjanjikan kesejahteraan sambil menghidupi perampasan.

Jika kolonialisme berakhir dengan kemerdekaan politik, pembangunan memastikan kelanjutannya dalam bentuk ekonomi dan epistemik. Modernitas menjadi bahasa universal yang menyingkirkan semua alternatif. Oleh karena itu, memahami pembangunan sebagai ideologi berarti membuka ruang untuk membayangkan kembali modernitas di luar logika kapital dan kekuasaan negara. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana memperbaiki pembangunan, tetapi bagaimana membebaskan diri dari pembangunan — untuk menemukan cara lain menjadi manusia dan masyarakat di luar narasi kemajuan yang selalu menyingkirkan sebagian besar dari kita.

Kopi Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B. (1990). *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Cornell University Press.

Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press.

Ferguson, J. (1994). *The Anti-Politics Machine: "Development," Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. University of Minnesota Press.

Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality*, Volume I: An Introduction. Pantheon.

Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. Pantheon.

Foucault, M. (1991). *Governmentality*. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality* (pp. 87–104). University of Chicago Press.

Gupta, A. (2012). *Red Tape: Bureaucracy, Structural Violence, and Poverty in India*. Duke University Press.

Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press.

Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.

Mitchell, T. (2002). *Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity*. University of California Press.

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

Bagian II — Sejarah Perampasan di Indonesia

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

4

KEKERASAN DAN DAGANG: PERAMPASAN KOLONIAL AWAL (1600–1800)

"*From the beginning, trade in the Indies was a matter of conquest.*" - Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce* (1993)

"*The discovery of gold and silver in America, the extirpation, enslavement and entombment in mines of the aboriginal population... are all things which characterize the dawn of the era of capitalist production.*" - Karl Marx, *Capital*, Vol. I (1867)

Ketika *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) berdiri pada 1602, ia bukan sekadar badan dagang, melainkan mesin akumulasi kolonial pertama dalam sejarah global kapitalisme. Dalam istilah Marx (1867/1990), fase ini merupakan bagian dari *primitive accumulation* — proses "berdarah" yang melahirkan kapitalisme melalui kekerasan, penjajahan, dan perampasan sumber daya. VOC menjadi instrumen penting dalam menghubungkan kepulauan Nusantara dengan sistem dunia kapitalis yang sedang tumbuh di Eropa Barat. Ia mewakili bentuk awal dari apa yang kemudian disebut Wallerstein (1974) sebagai *the capitalist world-economy*, yaitu sebuah jaringan global di mana kekayaan dari pinggiran dunia mengalir ke pusat kapitalisme industri di Eropa.

Pembentukan VOC merupakan respons terhadap kompetisi imperial antara Spanyol, Portugis, dan Inggris dalam

Media Nusa Creative

perdagangan Asia. Namun berbeda dari perusahaan dagang sebelumnya, VOC memiliki karakter unik, ia dianugerahi hak-hak kedaulatan (*sovereign rights*) oleh pemerintah Belanda — termasuk hak untuk berperang, membuat perjanjian, mencetak uang, dan menguasai wilayah (Gaastra, 2003). Dengan demikian, ia adalah perusahaan sekaligus negara, representasi awal dari kekuasaan kapital yang berdaulat. Di tangan VOC, perdagangan menjadi politik, dan politik menjadi instrumen dagang. Dalam satu abad, VOC berhasil menjadikan sebagian besar wilayah pesisir Nusantara sebagai ruang akumulasi kapital Eropa.

Salah satu momen paling simbolik dari perampasan kolonial awal adalah pembantaian Banda pada 1621. Di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, VOC menghancurkan populasi Banda— Tak kurang dari 2.500 orang meninggal, karena ditembak, dianiaya, atau kelaparan. Dari 14.000 orang rakyat Banda, jumlah penduduk asli kepulauan Banda tinggal 480 orang setelah peristiwa pembantaian itu — karena menolak menyerahkan monopoli pala kepada Belanda (Ricklefs, 2008; Hanna, 1978). Hanya beberapa ratus penduduk yang dibiarkan hidup sebagai buruh kontrak, sementara sisanya digantikan dengan budak yang didatangkan dari berbagai wilayah Asia. Tragedi Banda bukan sekadar episode kekejaman kolonial, tetapi titik asal dari kapitalisme dagang di Asia Tenggara. Ia menandai momen ketika kekerasan langsung digunakan untuk menciptakan pasar monopoli—bentuk awal *accumulation by dispossession* yang mendasari ekonomi global modern (Harvey, 2003).

Kekerasan Banda juga menunjukkan bagaimana kapitalisme awal di Nusantara dibangun di atas penghapusan sistem ekonomi lokal dan penggantian dengan logika komoditas global. Sebelum kedatangan VOC, kepulauan rempah seperti Banda dan Ternate telah memiliki sistem perdagangan maritim

Media Nusa Creative

yang kosmopolitan, di mana jaringan pedagang Arab, Cina, dan Melayu berinteraksi relatif bebas (Reid, 1993). Produksi dan distribusi rempah diatur oleh norma sosial dan hubungan timbal balik antarkomunitas. VOC menghancurkan sistem ini dan menggantikannya dengan sistem produksi tertutup yang berbasis pada kontrol militer dan kerja paksa. Dengan memusnahkan kedaulatan lokal, VOC menciptakan kondisi bagi akumulasi kapital Eropa. Marx (1990) menyebut proses semacam ini sebagai "*the great expropriation of the producers from their means of subsistence*."

Monopoli rempah yang dijalankan VOC adalah bentuk awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai kapitalisme dagang kolonial. Ia beroperasi melalui tiga logika utama yaitu kekerasan militer, penguasaan ruang, dan kontrol tenaga kerja. Pertama, VOC menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan pesaing dan menundukkan komunitas lokal. Kedua, ia menguasai pelabuhan dan jalur laut utama (Batavia, Ambon, Makassar) untuk mengendalikan sirkulasi komoditas. Ketiga, ia membangun sistem kerja paksa, termasuk *perkeniers* (petani kontrak) dan budak yang diimpor dari India dan Afrika Timur (Breman, 1983). Dalam konteks ini, perampasan bukan hanya pengambilalihan tanah atau rempah, tetapi juga penciptaan tenaga kerja terdisiplin — buruh yang tidak lagi memiliki akses ke alat produksinya sendiri.

Kekuasaan VOC atas tanah di kepulauan Nusantara memperkenalkan logika baru yang akan bertahan berabad-abad kemudian, yaitu tanah sebagai milik negara atau korporasi, dan penduduk sebagai tenaga yang dapat diatur. Di banyak wilayah, VOC mendefinisikan ulang tanah adat/tempatan sebagai "tanah kosong" atau "tanah kerajaan," yang kemudian disewakan atau diserahkan untuk kepentingan dagang. Penduduk lokal dikategorikan bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai "penggarap," "pekerja," atau "anak negeri" yang

Media Nusa Creative

wajib memberikan tenaga kepada tuannya (Peluso, 1992). Dengan cara ini, kolonialisme VOC membangun fondasi bagi logika hukum agraria kolonial yang kemudian dilembagakan dalam *Agrarische Wet 1870*, dan bahkan diwarisi oleh negara Indonesia modern (Fitzpatrick, 2008).

Dalam kerangka teori Marxian, fase VOC ini dapat dibaca sebagai akumulasi primitif melalui kekerasan kolonial. Seperti yang ditulis Marx (1990), kolonialisme adalah "*the colonial system that gave capitalism its standing leg.*" Kolonialisme tidak sekadar memperluas pasar, melainkan menciptakan kondisi material dan sosial bagi keberlanjutan kapitalisme di Eropa. Kekayaan yang dikumpulkan VOC dari perdagangan rempah, emas, dan budak mengalir ke Amsterdam, mendanai pembangunan bank-bank, infrastruktur pelayaran, dan bahkan bursa saham pertama dunia. Amsterdam menjadi pusat finansial global karena perampasan di Banda dan Ambon. Dalam bahasa Wallerstein (1974), VOC berfungsi sebagai mekanisme *surplus extraction* antara pusat (*core*) dan pinggiran (*periphery*), bagaimana nilai diciptakan di Asia, dikapitalisasi di Eropa.

Namun perampasan kolonial awal di Nusantara tidak hanya menghasilkan akumulasi material, tetapi juga membentuk tatanan sosial baru. Di bawah sistem VOC, masyarakat diklasifikasikan secara rasial dan hierarkis, Bangsa Eropa di puncak, Cina dan Arab sebagai perantara, dan pribumi di bawah sebagai tenaga kerja atau subjek. Pembagian ini bukan sekadar rasial, tetapi juga ekonomi-politik, ia menentukan siapa yang berhak menguasai alat produksi dan siapa yang harus menjual tenaga. Seperti dicatat Ann Laura Stoler (1985), sistem kolonial VOC di perkebunan dan pelabuhan membangun "*regime of intimacy*" — pengaturan ketat atas tubuh, keluarga, dan moralitas kolonial yang meneguhkan perbedaan kelas dan ras.

Media Nusa Creative

Dengan demikian, perampasan tidak hanya bekerja pada level ekonomi, tetapi juga pada level sosial dan kultural.

VOC juga berperan penting dalam membentuk negara kolonial modern di Asia Tenggara. Melalui birokrasi yang ketat, sistem catatan dagang, perpajakan, dan hukum tertulis, VOC menciptakan bentuk pemerintahan yang kelak menjadi model bagi administrasi kolonial Belanda abad ke-19. Pelabuhan Batavia (kini Jakarta) dijadikan pusat kendali logistik dan politik, tempat di mana kekuasaan dagang bertransformasi menjadi kekuasaan teritorial. Sebagaimana dikatakan oleh Benedict Anderson (1990), kekuasaan kolonial beroperasi melalui *maps, censuses, and museums* — cara-cara teknokratis untuk memetakan dan menguasai penduduk. VOC menanamkan logika bahwa penduduk dan tanah dapat diadministrasikan seperti komoditas dagang. Inilah fondasi awal dari *governmentality* kolonial yang kemudian diambil alih oleh negara pascakolonial Indonesia.

Kekerasan dan dagang dalam periode 1600–1800 menciptakan ekologi kolonial di mana ekonomi dan kekuasaan saling menopang. Kekerasan militer menciptakan stabilitas bagi perdagangan; perdagangan memberikan legitimasi bagi kekerasan. Proses ini berjalan dalam siklus yang saling menguatkan, bagaimana perampasan menciptakan modal, modal mendanai perang, perang membuka ruang baru bagi perampasan. Sebagaimana dicatat Harvey (2003), inilah logika dasar *accumulation by dispossession*, sebuah sistem kapitalis hidup dengan memperluas ruang perampasan ke wilayah baru. Dalam konteks Nusantara, logika ini berakar sejak VOC — jauh sebelum kapitalisme industri modern terbentuk di Eropa.

Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan karena korupsi dan biaya perang yang besar, terutama dalam menghadapi perlawanan lokal dan konflik global seperti

Media Nusa Creative

perang dengan Inggris. Namun kebangkrutan itu tidak mengakhiri sistem yang ia ciptakan. Ketika pemerintahan kolonial Belanda mengambil alih langsung pada 1799, mereka mewarisi seluruh struktur akumulasi VOC, mulai dari tanah sebagai aset negara, rakyat sebagai tenaga kerja, dan kekuasaan ekonomi yang dilegitimasi oleh hukum. Dengan demikian, VOC mati, tetapi logika perampasan yang ia bangun terus hidup.

Periode VOC (1600–1800) merupakan babak pertama dari sejarah panjang kapitalisme di Indonesia — masa ketika kekerasan dan dagang bersatu dalam satu tubuh politik. Ia meletakkan dasar bagi hubungan kolonial yang kelak dilembagakan dalam sistem tanam paksa, perkebunan kapitalis, dan hukum agraria kolonial abad ke-19. Melalui VOC, Indonesia tidak hanya "dijajah," tetapi diintegrasikan secara struktural ke dalam sistem dunia kapitalis. Sejak saat itu, ekonomi Nusantara tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi periferi permanen bagi akumulasi global.

Dengan demikian, jika Marx menyebut *primitive accumulation* sebagai "*prolog to capitalist production*," maka VOC adalah prolog bagi sejarah kapitalisme Indonesia. Ia menunjukkan bahwa kapitalisme tidak lahir dari pasar bebas, tetapi dari penaklukan bersenjata dan perampasan terencana. Kekerasan bukan anomali, melainkan fondasi. Dan sejak abad ke-17, fondasi itu telah tertanam dalam sejarah Indonesia — menjadikan perampasan bukan sekadar trauma masa lalu, tetapi logika yang terus direproduksi di bawah nama-nama baru: pembangunan, investasi, dan kemajuan.

Media Kusat Creative

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B. (1990). *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Cornell University Press.

Breman, J. (1983). *Control of Land and Labour in Colonial Java*. Foris.

Fitzpatrick, D. (2008). *Beyond Dualism: Land Acquisition and Law in Indonesia*. In J. F. McCarthy & K. Robinson (Eds.), *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*. ISEAS.

Gaastra, F. S. (2003). *The Dutch East India Company: Expansion and Decline*. Zutphen: Walburg Pers.

Hanna, W. A. (1978). *Indonesian Banda: Colonialism and Its Aftermath in the Nutmeg Islands*. Institute for the Study of Human Issues.

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.

Marx, K. (1990). *Capital*, Volume I. (B. Fowkes, Trans.). Penguin. (Original work published 1867)

Peluso, N. L. (1992). *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. University of California Press.

Reid, A. (1993). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680, Volume II: Expansion and Crisis*. Yale University Press.

Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Stanford University Press.

Stoler, A. L. (1985). *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870–1979*. Yale University Press.

Media Nusa Creative

Vickers, A. (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press.

Wallerstein, I. (1974). *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. Academic Press.

Media Nusa Creative

5

TANAM PAKSA DAN HUKUM KOLONIAL: PRODUKSI KEMISKINAN STRUKTURAL (1830–1870)

"*Colonialism, far from bringing wealth to the Indies, institutionalized poverty and dependency*." - Ann Laura Stoler, *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt* (1985)

"*The expropriation of the agricultural producer is the basis of the whole process of capitalist production*." - Karl Marx, *Capital*, Vol. I (1867)

Ketika sistem *Cultuurstelsel* atau tanam paksa diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1830, ia menandai transformasi mendasar dalam sejarah ekonomi dan sosial Nusantara. Jika masa VOC merupakan tahap perampasan awal yang berbasis kekerasan langsung, maka *Cultuurstelsel* adalah institusionalisasi perampasan melalui hukum, administrasi, dan moralitas pembangunan kolonial. Di bawah slogan "untuk kesejahteraan negeri dan kemakmuran rakyat," sistem ini mengubah jutaan petani Jawa menjadi penghasil komoditas global — kopi, gula, nila, dan teh — yang hasilnya sebagian besar mengalir ke kas negara Belanda. Dalam satu generasi, *Cultuurstelsel* menjadikan Hindia Belanda laboratorium kapitalisme kolonial dan menjadikan kemiskinan sebagai struktur sosial yang dilembagakan.

Media Nusa Creative

Sistem *Cultuurstelsel* dirancang oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch setelah Belanda menghadapi krisis fiskal pasca-perang Napoleon. Negara kolonial membutuhkan sumber pendapatan tetap tanpa harus mengandalkan pinjaman luar negeri. Dengan memanfaatkan struktur desa dan hierarki sosial Jawa, Van den Bosch menciptakan sistem eksploitasi yang sangat efisien, yaitu setiap desa diwajibkan menyerahkan sekitar seperlima tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang ditentukan pemerintah, dan hasilnya disetorkan langsung kepada administrasi kolonial (Elson, 1994). Petani yang gagal memenuhi kewajiban ini harus membayar pajak dalam bentuk uang atau kerja paksa. Sistem ini bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi mekanisme pengendalian sosial dan politik.

Di balik retorika kesejahteraan, *Cultuurstelsel* mengandung logika yang sepenuhnya kapitalistik, ia mengintegrasikan ekonomi subsisten ke dalam sirkuit pasar global. Sebelum abad ke-19, sebagian besar petani Jawa hidup dalam sistem ekonomi moral (Scott, 1976) di mana tanah, tenaga, dan hasil panen didistribusikan untuk menjaga keseimbangan sosial. Tanam paksa menghancurkan tatanan ini dengan memaksa petani menanam komoditas ekspor yang tidak dapat dimakan, seperti kopi dan nila. Akibatnya, petani kehilangan otonomi atas tanah dan tenaga mereka sendiri. Marx (1990, p. 915) menyebut proses ini sebagai "*the separation of the producer from the means of subsistence*" — inti dari *primitive accumulation*. Dalam konteks Hindia Belanda, pemisahan itu terjadi melalui administrasi kolonial, bukan pasar bebas.

Melalui jaringan pejabat pribumi (priyayi) dan kontrol administratif yang ketat, *Cultuurstelsel* menciptakan struktur kekuasaan baru di pedesaan. Bupati dan kepala desa menjadi perpanjangan tangan pemerintah kolonial, bertanggung jawab memastikan kuota tanam dan setoran hasil. Sistem ini

Mbah Nusir Creative

memperkuat hierarki sosial tradisional sekaligus menjadikannya instrumen eksploitasi. Seperti dicatat Fasseur (1992), *Cultuurstelsel* memanfaatkan "tradisi dan kepatuhan" untuk mengamankan kepentingan ekonomi kolonial. Dengan kata lain, kekuasaan tidak lagi bergantung pada kekerasan fisik, tetapi pada disiplin administratif yang menundukkan masyarakat melalui birokrasi dan hukum. Negara kolonial menciptakan "pemerintahan dari jarak jauh," di mana kekuasaan hadir melalui catatan-catatan, laporan pajak, dan statistik.

Pengenalan pajak uang (*landrente*) merupakan bagian penting dari proyek ini. Pajak uang memaksa petani memasuki ekonomi uang, menjadikan mereka subjek pasar yang baru. Untuk membayar pajak, petani harus menjual hasil panen atau bekerja di sektor komoditas ekspor. Dengan demikian, mereka dipaksa meninggalkan ekonomi subsisten dan bergantung pada fluktuasi harga pasar global. Menurut Booth (1988), kebijakan fiskal kolonial bukan hanya alat pendapatan, tetapi juga strategi "*disciplining the peasantry into the logic of money*." Uang menjadi medium kekuasaan baru, ia memediasi hubungan antara petani, negara, dan pasar dunia. Dalam istilah Foucault (1978), pajak dan hukum kolonial adalah bentuk *biopower* — kekuasaan yang mengatur kehidupan melalui mekanisme ekonomi.

Akibat dari sistem ini adalah produksi kemiskinan struktural. Sementara hasil ekspor kopi dan gula mendanai pembangunan jalan, kanal, dan industri di Belanda — dikenal sebagai *batig slot* atau "keuntungan bersih" — sebagian besar petani Jawa hidup dalam kondisi kelaparan dan kemelaratan. Data kolonial menunjukkan bahwa keuntungan yang disedot dari Hindia Belanda ke kas negara Belanda pada periode 1832 hingga 1867 sebesar *f* 967 juta, dan periode 1867 hingga 1877 sejumlah *f* 287 sementara konsumsi per kapita di Jawa justru menurun

Media Nusa Creative

drastis (Booth, 1988). Novel Max Havelaar (1860) karya Multatuli membuka mata publik Eropa terhadap kekejaman sistem ini. Namun bahkan setelah kritik itu muncul, sistem *Cultuurstelsel* tidak dihapus karena dianggap terlalu menguntungkan. Kapitalisme global memerlukan kemiskinan lokal untuk mempertahankan akumulasinya.

Dalam kerangka Wallerstein (1974), *Cultuurstelsel* menandai integrasi penuh Hindia Belanda ke dalam *world capitalist economy* sebagai periferi pertanian. Komoditas ekspor seperti kopi dan gula diproduksi dengan tenaga kerja murah dan tanah yang dikuasai negara kolonial, kemudian diekspor ke pasar dunia di Amsterdam dan London. Di sana, nilai tambahnya dikapitalisasi oleh pusat-pusat industri Eropa. Dengan kata lain, *Cultuurstelsel* adalah mekanisme transfer nilai dari selatan ke utara, dari petani ke kapitalis. Negara kolonial berfungsi sebagai perantara akumulasi global, ia mengubah kekayaan lokal menjadi modal imperial. Seperti dicatat Beckford (1972), "*the plantation economy was not an anomaly but the very foundation of capitalism's global expansion*."

Namun, *Cultuurstelsel* juga memiliki dimensi ideologis yang dalam. Ia tidak hanya menjarah, tetapi juga menormalisasi perampasan melalui bahasa moral dan hukum. Negara kolonial mempresentasikan sistem ini sebagai kewajiban sosial — kontribusi rakyat kepada negeri. Hukum agraria kolonial didefinisikan untuk memperkuat klaim bahwa seluruh tanah adalah milik negara. Dalam hukum Belanda, tanah yang "tidak dibuktikan kepemilikannya" dianggap domein *van den staat* (milik negara). Logika inilah yang kemudian menjadi dasar *Agrarische Wet* 1870, yang membuka akses bagi modal swasta Eropa (Peluso, 1992; Fitzpatrick, 2008). Dengan cara ini, hukum berfungsi sebagai alat *dispossession*, ia mengubah pencabutan hak menjadi tindakan legal, dan kekerasan menjadi administrasi.

Media Nusa Creative

Sistem hukum kolonial juga mengatur tubuh dan tenaga. Aturan kerja, pajak, dan hukuman didefinisikan untuk memastikan produktivitas dan kepatuhan. Dalam banyak daerah, pelanggaran terhadap kewajiban tanam dihukum cambuk atau kerja paksa di perkebunan. Namun lebih dari itu, hukum kolonial menciptakan kategori sosial baru, "penduduk" (*inlander*) sebagai subjek hukum yang berbeda dari "warga negara" Eropa. Perbedaan hukum ini adalah bentuk rasial dari pengaturan tenaga kerja — menjamin ketersediaan buruh murah tanpa harus mengakui mereka sebagai pemilik hak (Stoler, 1985). Dengan demikian, *Cultuurstelsel* bukan hanya sistem ekonomi, tetapi juga rezim rasial dan hukum yang mereproduksi hierarki sosial kolonial.

Dari perspektif teori Marxian, *Cultuurstelsel* menunjukkan bagaimana *primitive accumulation* tidak berhenti setelah kapitalisme lahir, tetapi terus berulang dalam bentuk baru — seperti yang dijelaskan oleh Harvey (2003) sebagai *accumulation by dispossession*. Sistem ini memperluas ruang akumulasi dengan mengubah seluruh struktur sosial menjadi mesin ekonomi. Tanah dijadikan aset negara, tenaga kerja dijadikan komoditas, dan hukum dijadikan instrumen legitimasi. Negara kolonial berfungsi sebagai agen akumulasi kapital global, ia mengumpulkan surplus melalui pemaksaan dan mendistribusikannya ke pusat kapitalisme dunia. Dalam arti ini, *Cultuurstelsel* bukan hanya kebijakan kolonial, tetapi juga mekanisme global untuk mengelola krisis kapitalisme Eropa abad ke-19.

Produksi kemiskinan struktural di bawah *Cultuurstelsel* menunjukkan bahwa kapitalisme tidak hanya menciptakan kekayaan, tetapi juga memerlukan kemiskinan sebagai syarat eksistensinya. Seperti dikatakan Marx (1990, p. 799), "*the accumulation of wealth at one pole is, therefore, at the same time accumulation of misery at the opposite pole*." Petani Jawa

Mega Nusa Creative

menjadi “subjek ganda”, di satu sisi dianggap warga produktif yang berkontribusi pada kemajuan negeri, di sisi lain dijadikan buruh murah yang menopang kapital global. Modernitas kolonial membentuk mereka sebagai individu ekonomi, namun dalam struktur yang meniadakan otonomi. Kemiskinan bukan akibat kegagalan produksi, tetapi hasil dari desain sistematis untuk memastikan arus nilai ke Eropa.

Pada 1870, setelah tekanan liberal di Belanda meningkat, *Cultuurstelsel* resmi dihapus dan digantikan oleh kebijakan ekonomi liberal yang membuka peluang bagi perusahaan swasta Eropa. Namun penghapusan itu tidak mengakhiri perampasan — ia hanya mengubah bentuknya. *Agrarische Wet* dan *Suikerwet* 1870 memberi legalitas baru bagi kapital swasta untuk menguasai tanah dan tenaga di Hindia Belanda. Dengan demikian, *Cultuurstelsel* menjadi jembatan antara kolonialisme negara dan kapitalisme korporasi. Ia menunjukkan bagaimana hukum dan pembangunan kolonial berfungsi sebagai bentuk kekerasan terlembaga, menciptakan kemiskinan bukan sebagai anomali, tetapi sebagai prasyarat bagi akumulasi.

Dalam sejarah panjang Indonesia, *Cultuurstelsel* adalah momen ketika kekuasaan kolonial menemukan cara paling efektif untuk merampas tanpa harus menembak. Kekerasan disublimasikan ke dalam hukum, moralitas, dan birokrasi. Negara kolonial menjadi “mesin produksi kemiskinan” — bukan karena kebodohan atau korupsi, tetapi karena itulah cara kapitalisme bekerja. Dan hingga kini, logika itu terus hidup: dalam pajak, utang, sertifikasi tanah, dan program pembangunan yang menjanjikan kesejahteraan sambil mereproduksi ketimpangan.

Media Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Beckford, G. L. (1972). *Persistent Poverty: Underdevelopment in Plantation Economies of the Third World*. Oxford University Press.

Booth, A. (1988). *Agricultural Development in Indonesia*. Allen & Unwin.

Elson, R. E. (1994). *Village Java under the Cultivation System, 1830–1870*. Allen & Unwin.

Fasseur, C. (1992). *The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch, and the Cultivation System*. Cornell University Press.

Fitzpatrick, D. (2008). *Beyond Dualism: Land Acquisition and Law in Indonesia*. In J. F. McCarthy & K. Robinson (Eds.), *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*. ISEAS.

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.

Marx, K. (1990). *Capital*, Volume I. (B. Fowkes, Trans.). Penguin. (Original work published 1867)

Peluso, N. L. (1992). *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. University of California Press.

Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.

Stoler, A. L. (1985). *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870–1979*. Yale University Press.

Media Nusa Creative

Wallerstein, I. (1974). *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. Academic Press.

Media Nusa Creative

6

LIBERAL KOLONIALISME DAN KAPITAL SWASTA (1870–1942)

"*The abolition of forced cultivation did not end colonial exploitation; it merely transferred it from the state to private capital*." - Jan Breman, *Control of Land and Labour in Colonial Java* (1983)

"*Capitalism seeks not only new markets but also new spaces of accumulation — frontiers of dispossession that sustain its survival*." - David Harvey, *The New Imperialism* (2003)

Ketika sistem *Cultuurstelsel* dihapus secara resmi pada 1870, banyak pihak di Eropa merayakannya sebagai kemenangan liberalisme atas eksploitasi kolonial. Namun, dalam kenyataannya, penghapusan tanam paksa bukanlah akhir dari perampasan, melainkan transformasi bentuknya. Eksploitasi yang sebelumnya dilakukan langsung oleh negara kini dialihkan ke tangan kapital swasta melalui kerangka hukum baru, *Agrarische Wet* 1870. Undang-undang ini menjadi tonggak dari apa yang disebut oleh banyak sejarawan sebagai *liberal colonialism* — fase di mana kolonialisme Belanda berpadu dengan logika pasar global untuk membuka "ruang-ruang akumulasi" baru di Hindia Belanda (Peluso, 1992; Fasseur, 1992; Vickers, 2005).

Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) mengizinkan investor swasta Eropa untuk menyewa tanah hingga 75 tahun, selama tanah itu bukan milik individu yang diakui oleh hukum kolonial. Melalui logika hukum ini, sebagian besar tanah adat

Media Nusa Creative

dinyatakan sebagai domein *van den staat/ domein verklaring* (tanah negara), karena masyarakat adat tidak memiliki sertifikat kepemilikan dalam pengertian hukum Belanda (Fitzpatrick, 2008). Di balik bahasa modern tentang hak dan hukum, tersembunyi mekanisme perampasan yang sistematis, bagaimana negara kolonial menafsirkan "tidak tertulis" sebagai "tidak ada," dan dengan demikian menghapus hak komunal yang telah hidup selama berabad-abad. Hukum menjadi instrumen untuk mengubah ruang sosial menjadi ruang ekonomi, di mana tanah bukan lagi ruang kehidupan, tetapi objek investasi.

Kebijakan ini membuka jalan bagi ekspansi besar-besaran perkebunan kapitalis di Sumatra Timur, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Perusahaan-perusahaan Eropa — seperti Deli Maatschappij, Senembah Maatschappij, dan NV Cultuurmaatschappij Amsterdam — memperoleh konsesi ribuan hektare tanah untuk menanam tembakau, karet, tebu, dan kopi. Di Sumatra Timur, tembakau Deli menjadi komoditas ekspor unggulan dunia, dengan kualitas yang menyaingi Kuba (Stoler, 1985). Namun, di balik kejayaan itu tersembunyi sistem kerja yang brutal, terdapat buruh kontrak (*koelie*) yang hidup di bawah pengawasan militer dan aturan hukuman keras. Jan Breman (1983) menyebutnya sebagai "*the return of slavery under capitalist legality*."

Sistem buruh kontrak di perkebunan-perkebunan Deli merupakan bentuk baru dari perampasan tenaga kerja. Ribuan pekerja direkrut dari Jawa, Cina, dan India melalui jaringan tukang angkut dan mandor, lalu diikat dengan kontrak yang hampir tidak mungkin dilanggar. Mereka dipekerjakan dalam kondisi yang sangat keras, dengan jam kerja panjang, upah minim, dan hukuman fisik sebagai alat disiplin. Dalam istilah Marx (1990), ini adalah bentuk "*extra-economic coercion*" — paksaan non-ekonomi yang tetap menjadi dasar akumulasi kapital. Kolonialisme liberal meminjam bahasa kebebasan dan

Media Nusa Creative

kontrak untuk menutupi kenyataan bahwa buruh tidak memiliki pilihan selain menjual tenaganya kepada kapital. Hukum kontrak kolonial tidak membebaskan, tetapi menetapkan perbudakan dalam bentuk modern.

Perkebunan besar di luar Jawa juga menciptakan *frontier* perampasan baru, di mana hutan dan tanah adat diubah menjadi aset ekonomi. Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi menjadi wilayah ekspansi kapital kolonial karena dianggap "tanah kosong" — istilah administratif yang menghapus eksistensi komunitas adat dan relasi ekologis mereka dengan ruang. Seperti dijelaskan oleh Nancy Peluso (1992), negara kolonial menggunakan kategori "tanah negara" untuk mengklaim hak atas sumber daya alam, lalu menyerahkannya kepada korporasi. Dalam proses ini, tanah adat diubah menjadi kapital tanah, dan masyarakat adat menjadi penduduk tanpa hak. *Frontier* kolonial bukan sekadar wilayah baru, tetapi ruang eksperimental bagi akumulasi kapital global.

Di bawah liberalisme kolonial, kekuasaan ekonomi semakin terpusat di tangan korporasi Eropa, sementara negara bertindak sebagai penjamin stabilitas hukum dan politik. Negara kolonial memastikan keamanan investasi melalui regulasi, militer, dan sistem hukum dualistic, hukum sipil untuk orang Eropa, dan hukum adat yang dikontrol untuk pribumi (Burns, 1989). Dengan cara ini, hukum berfungsi sebagai mekanisme diferensiasi sosial dan rasial. Ia tidak hanya mengatur hubungan ekonomi, tetapi juga menetapkan hierarki politik: Eropa sebagai pengusaha, pribumi sebagai tenaga kerja, dan masyarakat adat sebagai penghalang yang harus "diperbaiki." Hukum menjadi ekspresi material dari *governmentality kolonial* (Foucault, 1991), yaitu cara sebuah rezim yang memerintah melalui pengaturan kehidupan.

Liberalisme kolonial juga melahirkan transformasi mendalam dalam struktur ekonomi dan sosial pedesaan Jawa. Ketika

Mega Nusa Creative

tanah-tanah subur di Jawa dibuka untuk perkebunan gula swasta, petani kecil kehilangan akses ke sumber daya dan terjerat dalam sistem upah yang rendah. Seperti dicatat Elson (1994), liberalisasi ekonomi kolonial justru mempercepat proletarianisasi petani Jawa — mengubah mereka dari produsen subsisten menjadi buruh upahan di lahan yang dulu mereka miliki. Perampasan tanah dan tenaga berlangsung bersamaan, dan keduanya dilegitimasi oleh hukum serta retorika kemajuan. Negara kolonial menampilkan diri sebagai pembawa modernitas agraria, padahal yang sesungguhnya ia lakukan adalah menciptakan ketergantungan struktural antara penduduk lokal dan kapital global.

Sementara itu, di luar Jawa, kapitalisme perkebunan menciptakan bentuk-bentuk masyarakat baru yang sangat terstratifikasi. Di Sumatra Timur, Stoler (1985) menunjukkan bagaimana ras, kelas, dan gender menjadi instrumen kontrol sosial di bawah kapitalisme kolonial. Buruh Jawa ditempatkan di posisi bawah, sementara Cina menjadi perantara ekonomi, dan Eropa menduduki puncak struktur sosial. Perkebunan bukan hanya tempat produksi komoditas, tetapi juga ruang produksi ketimpangan. Kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui upah dan kontrak, tetapi juga melalui pengaturan tubuh, seksualitas, dan moralitas. Kapitalisme kolonial membentuk subjeknya melalui rasialisasi dan patriarki — dua unsur yang kemudian diwarisi oleh kapitalisme nasional setelah kemerdekaan.

Dari perspektif ekonomi dunia, fase liberal kolonialisme memperdalam posisi Indonesia sebagai periferi agraris dalam sistem kapitalis global. Seperti dicatat Wallerstein (1989), kapitalisme selalu membutuhkan ruang baru untuk menyalurkan surplus akumulasi, dan kolonialisme liberal abad ke-19 adalah ekspresi langsung dari *the second era of expansion* dalam ekonomi dunia. Hindia Belanda berfungsi sebagai salah satu pilar ekspansi itu, menyediakan karet, gula, kopi, dan

Medja Nusa Creative

minyak bumi bagi industri di Eropa dan Amerika. Dengan demikian, "liberalisasi" bukanlah kebebasan, melainkan mekanisme untuk memperkuat hubungan ketergantungan struktural antara pusat dan pinggiran. Pembangunan kolonial adalah pembangunan kapital global.

Sementara ekonomi kolonial mengalami *boom* ekspor, masyarakat pribumi hidup dalam kondisi stagnasi sosial. Jan Breman (1983) mencatat bahwa di banyak wilayah Jawa, pendapatan petani nyaris tidak meningkat selama periode 1870–1930, sementara harga tanah dan kebutuhan pokok melonjak tajam. Ketimpangan semakin melebar, tetapi ideologi kolonial menafsirkan kemiskinan sebagai akibat "kemalasan" atau "kurang pengetahuan." Inilah bentuk awal dari *developmental discourse* yang kelak dihidupkan kembali oleh negara pascakolonial, bagaimana narasi bahwa keterbelakangan adalah masalah individu, bukan struktur. Dalam arti ini, liberalisme kolonial bukan hanya ekonomi politik, tetapi juga epistemologi kekuasaan yang membentuk cara dunia memahami kemiskinan.

Kapitalisme liberal kolonial juga menciptakan bentuk-bentuk baru resistensi. Pemberontakan petani di Banten (1888), perlawanan Batak terhadap ekspansi perkebunan, dan berbagai gerakan tani lokal di Jawa dan Sumatra menunjukkan bahwa perampasan tidak pernah diterima tanpa perlawanan (Kartodirdjo, 1966). Namun perlawanan ini sering dikalahkan melalui kombinasi kekerasan dan hukum. Negara kolonial membungkus represi dengan moralitas legal, ia menyebut pemberontakan disebut "gangguan ketertiban umum," dan penindasan disebut "pemulihan hukum." Seperti yang diingatkan oleh Harvey (2003), kapitalisme modern tidak hanya bergantung pada pasar, tetapi juga pada *state violence* yang dilembagakan.

Media Nusa Creative

Menjelang awal abad ke-20, kolonialisme liberal mulai menampilkan wajah "berperikemanusiaan" melalui kebijakan Politik Etis (1901). Namun kebijakan ini tidak mengubah struktur dasar hubungan kolonial. Pendidikan, irigasi, dan migrasi — tiga pilar *Etische Politiek* — lebih berfungsi sebagai strategi pengendalian sosial dan reproduksi tenaga kerja (Booth, 1988). Seperti ditulis Stoler (1985), "*ethical colonialism was another stage in the moral justification of capital*." Pendidikan menciptakan birokrat lokal untuk menopang administrasi kolonial, bukan untuk mengubah tatanan kekuasaan. Politik Etis menandai puncak kolonialisme liberal: saat perampasan dibungkus dalam bahasa moral dan kemajuan.

Dengan demikian, fase 1870–1942 memperlihatkan bagaimana kapitalisme kolonial beradaptasi dengan bahasa liberalisme untuk mempertahankan kekuasaannya. *Agrarische Wet* menjadi instrumen hukum bagi privatisasi tanah adat; perkebunan besar menjadi ruang utama akumulasi kapital; dan buruh kontrak menjadi fondasi tenaga murah bagi ekonomi global. *Frontier* perampasan meluas dari Jawa ke Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, membentuk geografi kolonial yang masih terasa hingga kini. Negara kolonial bertindak sebagai mediator antara kapital global dan rakyat lokal — agen yang mengubah ruang hidup menjadi ruang akumulasi.

Liberal kolonialisme memperlihatkan paradoks yang melekat dalam modernitas kapitalis, semakin ia berbicara tentang kebebasan dan kemajuan, semakin dalam ia menanamkan perampasan. Seperti diingatkan Marx (1990), "*capital comes dripping from head to foot, from every pore, with blood and dirt*." Dalam konteks Indonesia, darah dan lumpur itu berasal dari tanah-tanah perkebunan, tambang, dan hutan yang direbut atas nama hukum dan pasar. Antara 1870 dan 1942, kapitalisme kolonial menulis bab penting dalam sejarah panjang *dispossession* di Indonesia — bab yang menunjukkan bahwa

Media Nusa Creative

liberalisme, seperti kolonialisme, adalah bahasa lain dari perampasan.

Media Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Breman, J. (1983). *Control of Land and Labour in Colonial Java*. Foris.

Booth, A. (1988). *Agricultural Development in Indonesia*. Allen & Unwin.

Burns, P. (1989). *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. KITLV Press.

Elson, R. E. (1994). *Village Java under the Cultivation System, 1830–1870*. Allen & Unwin.

Fasseur, C. (1992). *The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch, and the Cultivation System*. Cornell University Press.

Fitzpatrick, D. (2008). *Beyond Dualism: Land Acquisition and Law in Indonesia*. In J. F. McCarthy & K. Robinson (Eds.), *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*. ISEAS.

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.

Kartodirdjo, S. (1966). *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course, and Sequel*. Martinus Nijhoff.

Marx, K. (1990). *Capital*, Volume I. (B. Fowkes, Trans.). Penguin. (Original work published 1867)

Peluso, N. L. (1992). *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. University of California Press.

Stoler, A. L. (1985). *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870–1979*. Yale University Press.

Vickers, A. (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press.

Media Nusa Creative

Wallerstein, I. (1989). *The Modern World-System III: The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730–1840s*. Academic Press.

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

7

POLITIK ETIS DAN LAHIRNYA SUBJEK KOLONIAL MODERN (1901–1942)

"*The Ethical Policy marked not a moral awakening, but a sophisticated modernization of colonial rule*." - Frances Gouda, *Dutch Culture Overseas* (1995)

"*Education under colonialism did not liberate the native; it created the modern subject of empire*." - Syed Hussein Alatas, *The Myth of the Lazy Native* (1977)

Ketika Ratu Wilhelmina mengumumkan Politik Etis (*Ethische Politiek*) pada tahun 1901, Belanda mengklaim memasuki babak baru kolonialisme yang "berperikemanusiaan." Setelah lebih dari dua abad eksploitasi brutal, kebijakan ini konon lahir dari "hutang kehormatan" (*een eereschuld*) Belanda terhadap Hindia Timur. Namun di balik retorika moral tentang tanggung jawab dan kesejahteraan, Politik Etis sesungguhnya merupakan modernisasi kekuasaan kolonial — upaya untuk menstabilkan imperium dengan menciptakan subjek kolonial yang "beradab," produktif, dan dapat diatur. Pembangunan, pendidikan, dan peradaban menjadi bahasa baru bagi perampasan dan kontrol sosial.

Kebijakan ini berakar pada kritik liberal terhadap sistem tanam paksa dan eksploitasi negara sebelumnya. Kaum intelektual Belanda seperti *Conrad Theodor van Deventer* menyerukan "balas budi" (*de ethische roeping*), bahwa Belanda wajib meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia sebagai bentuk

Media Nusa Creative

moralitas kolonial. Pemerintah merespons dengan program tiga pilar utama: irigasi, edukasi, dan emigrasi (transmigrasi) (Fasseur, 1992). Ketiganya disebut "Trilogi Etis" dan menjadi kerangka pembangunan kolonial awal abad ke-20. Namun jika diamati lebih dalam, pilar-pilar ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan mekanisme untuk memperkuat struktur ekonomi kolonial dan menciptakan bentuk baru subjek kekuasaan.

Pertama, proyek irigasi yang dikembangkan sejak 1901 bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian rakyat, namun dalam praktiknya diarahkan untuk memperluas komoditas ekspor seperti padi dan tebu. Irigasi menjadi instrumen integrasi ekonomi desa ke pasar dunia, sekaligus alat pengawasan administratif terhadap desa-desa Jawa. Air diatur, tanah diukur, dan tenaga kerja diadministrasikan. Negara kolonial memperluas pengawasan melalui "teknologi kesejahteraan" — di mana bantuan teknis berfungsi sebagai bentuk *governmentality* (Foucault, 1991), bagaimana kekuasaan yang mengatur hidup manusia dengan dalih kebaikan. Dalam proyek-proyek ini, kesejahteraan rakyat tidak pernah menjadi tujuan utama; ia hanyalah sarana untuk menciptakan petani patuh yang produktif.

Kedua, kebijakan pendidikan menjadi jantung dari Politik Etis. Sistem sekolah baru seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), dan Algemeene Middelbare School (AMS) dibangun untuk mencetak generasi "pribumi terdidik." Namun pendidikan kolonial tidak dimaksudkan untuk membebaskan, melainkan untuk menciptakan subjek kolonial modern, individu yang berpikir dengan logika rasional Barat, tunduk pada otoritas negara, dan loyal pada tatanan kolonial. Kurikulum pendidikan mengajarkan moralitas kerja, disiplin waktu, dan bahasa Belanda — bukan pengetahuan lokal atau kesadaran politik (Locher-Scholten, 1994). Dengan demikian, pendidikan

Media Nusa Creative

menjadi proyek *subject formation*, ia mencetak elite administratif yang menjembatani kolonialisme dengan masyarakat lokal.

Pendidikan kolonial melahirkan apa yang disebut Syed Hussein Alatas (1977) sebagai "*the captive mind*" — pikiran terjajah yang menginternalisasi superioritas Barat dan memandang dirinya sebagai "belum modern." Para lulusan sekolah kolonial seperti MULO dan STOVIA kemudian menjadi birokrat, guru, dokter, dan pegawai negeri yang melayani sistem kolonial, meskipun sebagian kemudian berbalik menjadi nasionalis. Namun, bahkan nasionalisme yang muncul dari rahim pendidikan kolonial tetap membawa warisan epistemik kolonial, yaitu sebuah keyakinan bahwa kemajuan hanya dapat dicapai melalui pembangunan, rasionalitas, dan modernitas Barat (Anderson, 1990). Dalam arti ini, Politik Etis tidak hanya menciptakan elite sosial, tetapi juga mewariskan cara berpikir kolonial tentang kemajuan.

Ketiga, program emigrasi atau transmigrasi digunakan untuk memindahkan penduduk dari Jawa yang padat ke luar Jawa. Secara resmi, kebijakan ini disebut sebagai upaya pemerataan penduduk dan pembukaan lahan baru untuk pertanian. Namun, seperti ditunjukkan oleh Elson (1994) dan Peluso (1992), transmigrasi berfungsi sebagai strategi kolonisasi internal, ia mengubah wilayah-wilayah "liar" di Sumatra dan Kalimantan menjadi ruang produksi kolonial. Program ini membuka *frontier* baru bagi kapital perkebunan dan industri kayu, sekaligus memperluas kontrol negara atas masyarakat adat. Dengan memindahkan tenaga kerja dan mengosongkan ruang, transmigrasi menjadi bentuk perampasan spasial yang dibungkus dalam bahasa kesejahteraan.

Secara ideologis, Politik Etis menandai pergeseran kolonialisme dari kekerasan langsung menuju pemerintahan moral. Kolonialisme tidak lagi dijustifikasi oleh perang dan

Media Nusa Creative

penaklukan, melainkan oleh retorika kemanusiaan dan peradaban. Frances Gouda (1995) menegaskan bahwa *Etische Politiek* adalah "*the cultural face of empire*" — wajah lembut dari kekuasaan yang tetap eksploitatif. Pendidikan, irigasi, dan transmigrasi tidak mengubah struktur ekonomi kolonial, melainkan menstabilkannya. Negara kolonial belajar dari masa tanam paksa bahwa dominasi yang efektif tidak memerlukan cambuk dan rantai, tetapi dapat dicapai melalui pengetahuan dan moralitas.

Dengan menciptakan elite terdidik, kolonialisme memastikan keberlanjutan dirinya. Elite ini — yang disebut Benedict Anderson (1990) sebagai *the colonial intelligentsia* — menjadi perantara antara kekuasaan Eropa dan rakyat. Mereka menguasai bahasa, hukum, dan teknologi pemerintahan kolonial. Mereka juga menyerap nilai-nilai modernitas dan pembangunan sebagai kebenaran universal. Akibatnya, ketika nasionalisme lahir pada awal abad ke-20, banyak tokohnya masih berpikir dalam kerangka modernisasi ala Barat, bahwa kemerdekaan dilihat sebagai proyek pembangunan, bukan pembongkaran struktur kolonial.

Dalam istilah Escobar (1995), *development* menggantikan *colonialism* sebagai "dispositif kekuasaan baru" yang terus memproduksi dunia ketiga sebagai subjek yang perlu diperbaiki.

Pendidikan kolonial juga memperdalam pembagian sosial dan rasial. Akses ke sekolah dibatasi bagi kelompok elite pribumi dan keturunan bangsawan, sementara mayoritas rakyat tetap buta huruf. Sistem ini menciptakan stratifikasi baru: di antara yang "modern" dan "tradisional," yang "berpendidikan" dan yang "bodoh." Rasionalitas kolonial memproduksi hierarki internal yang membuat masyarakat lokal terpecah. Seperti dicatat Locher-Scholten (1994), kolonialisme Belanda pada awal abad ke-20 adalah "*a civilizing project that divided rather*

Media Nusa Creative

than united." Dengan demikian, Politik Etis menciptakan arsitektur sosial modernitas kolonial, di mana mobilitas sosial dibatasi oleh ras, pendidikan, dan loyalitas politik.

Dari perspektif ekonomi politik, *Etische Politiek* juga memperkuat sistem kapitalisme kolonial yang telah dibentuk sejak *Agrarische Wet* 1870. Infrastruktur yang dibangun — jalan, kanal, pelabuhan, dan sekolah — berfungsi ganda sebagai infrastruktur ekonomi bagi ekspor perkebunan dan tambang. Sementara itu, kebijakan "kesejahteraan rakyat" digunakan untuk menenangkan keresahan sosial akibat krisis ekonomi dan ketimpangan. Booth (1988) menunjukkan bahwa meskipun produktivitas pertanian meningkat, ketimpangan kepemilikan tanah justru memburuk. Modernisasi yang dijanjikan *Etische Politiek* tidak menghapus kemiskinan, melainkan mendisiplinkannya melalui program pembangunan dan kontrol administratif.

Dalam kacamata teori kekuasaan Foucault (1978, 1991), Politik Etis adalah contoh klasik dari *governmentality* colonial, bahwa kekuasaan yang mengatur bukan dengan senjata, tetapi melalui "perhatian" terhadap kehidupan rakyat. Kolonialisme tidak lagi hadir sebagai kekerasan eksternal, tetapi sebagai kekuasaan yang bekerja dari dalam tubuh sosial. Negara kolonial memproduksi wacana baru tentang "kemajuan" dan "kemiskinan" — dua konsep yang kemudian menjadi fondasi bagi seluruh proyek pembangunan pascakolonial. Dalam hal ini, *Etische Politiek* dapat dibaca sebagai prolog ideologis bagi *developmentalism* Indonesia modern, sebuah keyakinan bahwa kemajuan nasional harus dicapai melalui pembangunan yang diatur oleh negara dan didukung oleh elite terdidik.

Kebijakan ini juga menunjukkan bagaimana modernitas kolonial beroperasi melalui ambivalensi antara tanggung jawab moral dan rasionalitas ekonomi. Di satu sisi, Belanda mengklaim membantu rakyat Hindia; di sisi lain, mereka

Media Nusa Creative

memperkuat mekanisme eksploitasi ekonomi. Irigasi meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat kontrol atas air dan tanah. Pendidikan mencerdaskan, tetapi juga mendisiplinkan. Transmigrasi membuka lahan baru, tetapi juga menghapus hak adat. Dalam semua kasus itu, peradaban digunakan sebagai justifikasi kekuasaan. Sebagaimana ditulis oleh Stoler (1985), "*colonial modernity was never about freedom; it was about governing through improvement*."

Menjelang akhir kekuasaan kolonial, hasil dari Politik Etis terlihat jelas, sebuah masyarakat yang secara formal lebih modern, tetapi tetap terbelah secara struktural. Sebagian kecil elite pribumi terdidik menjadi wajah kemajuan, sementara mayoritas rakyat tetap hidup dalam kemiskinan dan keterikatan tanah. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, mereka mewarisi struktur ini dan menambahnya dengan mobilisasi massa untuk kepentingan perang. Dengan demikian, warisan *Etische Politiek* tidak berhenti pada kolonialisme, tetapi mengalir ke dalam bentuk-bentuk kekuasaan pascakolonial. Negara bangsa Indonesia kemudian mewarisi dua hal sekaligus yaitu rasionalitas pembangunan kolonial dan keyakinan moral bahwa pembangunan adalah kewajiban negara terhadap rakyat.

Dalam sejarah panjang Indonesia, Politik Etis adalah titik di mana kolonialisme berhenti tampil sebagai kekerasan kasar dan menjelma menjadi ideologi kemajuan. Ia memperkenalkan bahasa baru bagi kekuasaan dalam bentuk"istilah" peradaban, tanggung jawab, kesejahteraan. Namun di bawah bahasa itu, logika lama tetap hidup — logika perampasan, pengendalian, dan subordinasi. Elite pribumi yang lahir dari sekolah kolonial kemudian melanjutkan proyek itu dalam bentuk nasional, yaitu pembangunan sebagai warisan moral kolonial. Dengan demikian, *Etische Politiek* bukan hanya kebijakan kolonial

Media Nusa Creative

terakhir, tetapi juga benih bagi negara pembangunan pascakolonial.

Media Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, S. H. (1977). *The Myth of the Lazy Native*. Frank Cass.

Anderson, B. (1990). *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Cornell University Press.

Booth, A. (1988). *Agricultural Development in Indonesia*. Allen & Unwin.

Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press.

Fasseur, C. (1992). *The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch, and the Cultivation System*. Cornell University Press.

Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality*, Volume I: An Introduction. Pantheon.

Foucault, M. (1991). *Governmentality*. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. University of Chicago Press.

Gouda, F. (1995). *Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherlands Indies, 1900–1942*. Amsterdam University Press.

Locher-Scholten, E. (1994). *Ethical Imperialism: Institution Building and the Policy of the Dutch Colonial State, 1870–1915*. KITLV Press.

Peluso, N. L. (1992). *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. University of California Press.

Stoler, A. L. (1985). *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870–1979*. Yale University Press.

Vickers, A. (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press.

Media Nusa Creative

8

KEMERDEKAAN DAN REPRODUKSI KEKUASAAN: NEGARA NASIONAL DAN NEGARA YANG SEDANG DIBENTUK (1945–1965)

"*Independence did not end colonialism; it reconfigured it under a new flag*." - Partha Chatterjee, *The Nation and Its Fragments* (1993)

"*The 1965 killings were not only a counterrevolution; they were the destruction of a political imagination from below*." - Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Indonesia* (2010)

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa ini tampak memasuki era baru, dari koloni menjadi negara berdaulat. Namun kemerdekaan politik tidak serta-merta berarti pembebasan sosial dan ekonomi. Negara yang lahir dari revolusi justru membawa beban sejarah kolonial — struktur agraria timpang, ekonomi bergantung pada ekspor bahan mentah, serta birokrasi dan hukum yang diwarisi dari pemerintahan Hindia Belanda. Dalam banyak hal, negara nasional Indonesia dibangun di atas reruntuhan kolonialisme, tetapi dengan logika yang masih sama: pembangunan, kontrol, dan pengendalian atas rakyat.

Sejak awal, revolusi kemerdekaan Indonesia bukan hanya perjuangan militer melawan Belanda, tetapi juga pertempuran wacana tentang makna kemerdekaan itu sendiri. Di satu sisi, muncul visi kerakyatan yang menuntut keadilan sosial, reforma agraria, dan kedaulatan ekonomi. Di sisi lain, ada visi negara

Mojo Nusa Creative

kuat dan terpusat yang ingin menstabilkan kekuasaan melalui birokrasi dan modernisasi. Konflik antara dua arah ini membentuk seluruh dinamika politik Indonesia pasca-1945, antara demokrasi rakyat dan pembangunan negara. Sebagaimana dicatat oleh Ruth McVey (1971), negara pascakolonial Indonesia segera menghadapi dilemma, bagaimana menghapus warisan kolonial tanpa menghancurkan aparatus yang diwarisinya.

Salah satu cita-cita utama pascakemerdekaan adalah nasionalisasi ekonomi dan reforma agraria. Melalui semangat anti-kolonial dan anti-feodal, negara berupaya mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda melalui kebijakan nasionalisasi dan mengembalikan kontrol atas sumber daya nasional. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 menjadi simbol dari proyek ini. UUPA mencoba mengakhiri dualisme hukum kolonial — antara tanah adat dan hukum Barat — dengan menyatakan bahwa seluruh tanah di Indonesia berada di bawah "hak menguasai negara" (Pasal 2). Ia menjanjikan redistribusi tanah kepada petani miskin, pembatasan luas kepemilikan, dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Namun dalam praktiknya, UUPA 1960 gagal mengubah struktur agraria kolonial. Negara yang baru terbentuk belum memiliki kapasitas politik dan administratif untuk melaksanakan reforma tanah secara radikal. Birokrasi agraria masih diisi oleh pejabat warisan kolonial; para tuan tanah dan elite lokal tetap memegang kendali di pedesaan. Seperti dicatat Daniel Fitzpatrick (1997), konsep "hak menguasai negara" justru membuka ruang bagi intervensi negara tanpa jaminan perlindungan bagi rakyat kecil. Dengan demikian, UUPA tidak membebaskan tanah dari kekuasaan negara, tetapi menempatkan negara sebagai pemilik baru dalam sistem perampasan.

Media Nusa Creative

Kegagalan reforma agraria juga disebabkan oleh lemahnya kekuatan sosial petani dalam politik nasional. Meski organisasi seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) memperjuangkan pelaksanaan UUPA di tingkat akar rumput, mereka menghadapi resistensi dari tuan tanah, militer, dan elite birokrasi. Konflik agraria merebak di berbagai wilayah pada awal 1960-an, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara, di mana petani melakukan aksi sepihak untuk menduduki tanah. Namun, bagi negara yang sedang berupaya membangun stabilitas dan wibawa internasional, gerakan ini dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban.

Dalam wacana pembangunan pasca-1950, kemajuan nasional diidentikkan dengan stabilitas dan modernisasi, bukan dengan redistribusi kekayaan. Seperti dicatat oleh Prasenjit Duara (2004), negara pascakolonial seringkali mewarisi "*developmental authoritarianism*" — keyakinan bahwa pembangunan ekonomi hanya dapat dicapai melalui kontrol negara yang kuat. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam gagasan "Demokrasi Terpimpin" (1959–1965) di bawah Soekarno. Negara mengkonsolidasikan kekuasaan politik di tangan presiden dan militer, mengatasnamakan persatuan nasional dan revolusi yang belum selesai. Dalam konteks ini, rakyat — terutama petani — direduksi menjadi objek pembangunan, bukan subjek politik.

Namun dinamika sosial di pedesaan justru menunjukkan potensi politik rakyat yang besar. Gerakan tani pada awal 1960-an bukan semata reaksi terhadap kemiskinan, tetapi ekspresi dari politik otonomi rakyat — perjuangan untuk mengembalikan tanah dan martabat. PKI dan BTI menafsirkan UUPA bukan sebagai perangkat administratif, tetapi sebagai dasar revolusi sosial. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan negara dan militer, yang melihat gerakan petani sebagai ancaman terhadap stabilitas. Konflik ini mencapai puncaknya

Mega Nusa Creative

pada tragedi 1965, yang bukan hanya perubahan rezim, tetapi juga pemusnahan politik rakyat dari bawah.

Pembunuhan massal pasca-30 September 1965 — dengan jutaan korban dari kalangan PKI, petani, buruh, dan simpatisan kiri — adalah momen pendirian ulang negara dalam pengertian yang paling brutal. Seperti dikatakan oleh Robert Cribb (2001), kekerasan 1965 berfungsi sebagai "*foundational violence*" bagi tatanan Orde Baru. Ia menghancurkan seluruh basis sosial dan imajinasi politik alternatif yang dibangun oleh rakyat sejak kemerdekaan. Bagi Tania Li (2014), kekerasan ini menandai berakhirnya politik agraria rakyat dan awal dari "penjinakan desa" — transformasi masyarakat pedesaan menjadi objek pembangunan, bukan aktor politik.

Kekerasan 1965 tidak hanya menghancurkan organisasi politik kiri, tetapi juga menghapus gagasan bahwa rakyat berhak menentukan arah pembangunan. Negara mengambil alih seluruh ranah kehidupan sosial, mendefinisikan kemajuan sebagai proyek teknokratik di bawah kendali pusat. Dalam bahasa Foucault (1978), ini adalah bentuk *biopolitics of control*: kekuasaan yang mengatur hidup dengan menghapus kemungkinan politik alternatif. Desa-desa yang sebelumnya menjadi basis mobilisasi petani dikonversi menjadi unit administratif — tunduk pada birokrasi dan program pembangunan yang disusun dari atas. Rakyat tidak lagi dilihat sebagai warga yang memiliki hak, tetapi sebagai sumber daya manusia (*human resources*) yang harus "dibina."

Kekerasan ini juga merupakan perampasan politik dalam arti paling dalam, yaitu perampasan terhadap hak untuk berpikir dan berorganisasi secara kolektif. Seperti dicatat oleh Vedi Hadiz (2010), 1965 menghancurkan "imajinasi politik dari bawah" dan membuka jalan bagi lahirnya rezim *developmental* yang berorientasi pada kapital. Negara yang dibentuk pasca-1965 bukanlah negara rakyat, melainkan negara pembangunan

Media Nusa Creative

(*developmental state*) yang bertugas mengintegrasikan Indonesia ke dalam sistem kapitalisme global. Namun akar ideologinya telah disemai sejak awal 1960-an, ketika Soekarno dan militer sepakat bahwa pembangunan adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan.

Revolusi 1945 yang semula berangkat dari semangat kedaulatan rakyat berakhir menjadi proyek pembangunan negara. Dalam proses ini, negara mengambil alih posisi kolonial lama sebagai penguasa atas tanah dan rakyat. Nasionalisasi pasca-1949 yang seharusnya berarti dekolonisasi ekonomi malah mengukuhkan peran negara sebagai korporasi baru. Perusahaan Belanda memang dinasionalisasi, tetapi manajemennya sering diserahkan kepada birokrat dan militer (Robison, 1986). Negara menjadi kapitalis kolektif yang mengendalikan sumber daya tanpa mengubah struktur kepemilikan. Dengan kata lain, nasionalisasi menggantikan kapital asing dengan kapital negara — bukan dengan rakyat.

UUPA 1960 yang dimaksudkan sebagai alat pembebasan akhirnya berfungsi sebagai instrumen kontrol baru. Konsep "hak menguasai negara" memungkinkan negara mengatur, mencabut, atau mengalihkan tanah tanpa konsultasi dengan masyarakat. Di sini tampak kontinuitas langsung dengan hukum kolonial — terutama *Agrarische Wet* 1870 — yang juga menempatkan tanah adat di bawah otoritas negara. Fitzpatrick (2008) menunjukkan bahwa paradigma ini bertahan hingga era modern, menjadikan negara sebagai aktor utama dalam *accumulation by dispossession*. Reformasi agraria gagal bukan hanya karena resistensi elite, tetapi karena struktur hukum dan birokrasi yang secara inheren kolonial.

Kekerasan politik 1965 kemudian melengkapi proses ini dengan menghancurkan basis sosial dari potensi politik alternatif. Ia mengakhiri sejarah panjang gerakan tani dan menghapus tradisi perlawanan terhadap ketimpangan agraria

Media Nusa Creative

yang telah tumbuh sejak masa kolonial. Pembunuhan terhadap jutaan petani dan aktivis desa adalah pembunuhan terhadap kemungkinan demokrasi agraria. Dalam waktu singkat, desa-desa kehilangan struktur politik otonomnya dan dijadikan basis logistik bagi pembangunan Orde Baru. Negara memonopoli kekuasaan atas tanah, tenaga, dan bahkan narasi sejarah. Dalam pengertian inilah, kekerasan 1965 dapat dilihat sebagai momen transisi dari *postcolonial state* menjadi *developmental state* — dari negara yang merdeka menjadi negara yang menguasai.

Dengan demikian, periode 1945–1965 memperlihatkan paradoks mendalam dari kemerdekaan Indonesia. Revolusi yang lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme justru melahirkan negara yang mewarisi struktur kolonial kekuasaan. Pembangunan nasional dijadikan ideologi baru yang menutupi reproduksi ketimpangan lama. Rakyat yang semula menjadi subjek perjuangan kemerdekaan bertransformasi menjadi objek kebijakan pembangunan. Dalam istilah Chatterjee (1993), bangsa pascakolonial terjebak dalam "*the outer domain of the state*" — wilayah di mana rakyat dijinakkan melalui wacana nasionalisme dan pembangunan, sementara ruang otonomi politik mereka ditutup.

Kemerdekaan Indonesia dengan demikian tidak dapat dibaca hanya sebagai akhir kolonialisme, tetapi sebagai reproduksi logika kolonial dalam bentuk nasional. Negara nasional lahir bukan dari kehendak bebas rakyat, melainkan dari kompromi antara elite politik, militer, dan kekuatan kapital global. Reformasi agraria gagal karena negara lebih sibuk mempertahankan kekuasaan daripada membangun keadilan. Kekerasan 1965 memastikan bahwa politik rakyat dari bawah tidak akan pernah lagi mengancam tatanan dari atas. Sejak saat itu, pembangunan menjadi satu-satunya bahasa politik yang sah, dan negara menjadi pewaris sah kolonialisme — bukan musuhnya.

Media Muse Creative

DAFTAR PUSTAKA

Chatterjee, P. (1993). *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*. Princeton University Press.

Cribb, R. (2001). Genocide in Indonesia, 1965–1966. *Journal of Genocide Research*, 3(2), 219–239.

Duara, P. (2004). *Decolonization: Perspectives from Asian and African Histories*. Routledge.

Fitzpatrick, D. (1997). Disputes and Pluralism in Modern Indonesian Land Law. *Yale Journal of International Law*, 22(1), 171–212.

Fitzpatrick, D. (2008). *Beyond Dualism: Land Acquisition and Law in Indonesia*. In J. F. McCarthy & K. Robinson (Eds.), *Land and Development in Indonesia*. ISEAS.

Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality*, Volume I: An Introduction. Pantheon.

Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.

Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.

McVey, R. (1971). *The Post-Revolutionary Transformation of the Indonesian Army*. Cornell Modern Indonesia Project.

Robison, R. (1986). *Indonesia: The Rise of Capital*. Allen & Unwin.

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

9

PEMBANGUNAN, MILITER, DAN MODAL: ORDE BARU SEBAGAI REZIM PERAMPASAN (1966–1998)

"The state is central to the production of space for capital accumulation, often through dispossession and coercion."
David Harvey, *The New Imperialism* (2003)

"In Indonesia, the combination of state power, military authority, and business networks created a regime where dispossession was institutionalized."
Nancy Peluso, *Rich Forests, Poor People* (1992)

Setelah 1966 Indonesia memasuki era baru pemerintahan yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai tujuan tunggal legitimitas politik. Di bawah slogan "stabilitas untuk pembangunan", Orde Baru menggabungkan negara yang sangat terpusat, aparat keamanan yang kuat, dan jaringan kapital terhubung erat dengan mekanisme negara. Kombinasi itu bukan sekadar manuver politik; ia mewujudkan suatu rezim perampasan yang diinstitusionalisasikan, bagaimana hukum dan kebijakan negara menstrukturkan akses atas tanah, hutan, tambang, dan tenaga kerja sehingga modal—baik domestik maupun asing—dapat mengekstrak surplus secara sistematik. Dalam terminologi David Harvey, Orde Baru menempatkan Indonesia sebagai lokasi "*spatial fix*" dan arena baru *accumulation by dispossession*—mengubah ruang sosial dan ekologis menjadi sumber nilai yang bisa diekstraksi (Harvey, 2003).

Media Nusa Creative

Sentralisasi kekuasaan politik dan administratif menjadi prasyarat utama. Kedudukan militer dan birokrasi sentral memperkuat kapasitas negara untuk menetapkan aturan main ekonomi, memberi konsesi, dan menegakkan kepentingan investor. Salah satu instrumen kunci adalah hukum kehutanan 1967 (Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967) yang secara formal menegaskan doktrin bahwa hutan adalah bagian dari domain negara. Klasifikasi ini — yang sering mendefinisikan hutan sebagai "kawasan hutan negara" — mengubah relasi hukum antara masyarakat adat dan tanah yang dihuni turun-temurun. Hak-hak komunal sering kali tidak diakui dalam kerangka hukum nasional sehingga tanah adat dan hutan dapat diatribusikan kepada negara dan kemudian diberikan sebagai konsesi kepada korporasi. Hukum itu bukan netral teknokratik; ia adalah alat politik yang menata ulang kepemilikan dan membolehkan peralihan aset dari kolektif (*commons*) menjadi sumber daya komoditas bagi modal (Peluso, 1992).

Langkah-langkah legal-administratif itu berjalan seiring dengan kebijakan yang membuka sektor ekstraktif seperti pemberian konsesi pertambangan, hutan tanaman industri, dan hak perkebunan. Kontrak karya seperti yang diberikan kepada Freeport di Papua (perjanjian awal 1967) atau konsesi minyak kepada perusahaan multinasional memperlihatkan pola yang berulang, bagaimana negara menjamin hak ekstraksi jangka panjang, investasi modal asing atau *joint venture* dikondisikan pada akses luas terhadap sumber daya, dan imbalannya bagi negara sering berupa pendapatan fiskal minimal dibandingkan nilai yang diekstraksi. Dalam praktiknya, aliansi negara–kapital itu dijaga oleh kapasitas koersif militer dan aparat keamanan—untuk mengatasi perlawanan lokal, mengamankan jalan dan pelabuhan, serta menekan mobilisasi masyarakat yang menuntut pengakuan hak.

Media Nusa Creative

Proyek pembangunan nasional—mulai jaringan infrastruktur, irigasi besar, proyek transmigrasi hingga industrialisasi—dibingkai sebagai kebutuhan modernisasi dan legitimasi pemerintah. Namun fungsi praktisnya seringkali adalah membuka ruang akumulasi baru bagi modal. Jalan dan pelabuhan yang dibangun untuk "menghubungkan daerah" juga menurunkan biaya ekstraksi, mempercepat aliran komoditas ke pasar internasional, dan meningkatkan nilai lahan di koridor investasi. Program transmigrasi, yang dipromosikan sebagai solusi kepadatan Jawa, juga dapat dipahami sebagai strategi penguasaan ruang: pemindahan penduduk, pembukaan lahan, dan pembentukan basis tenaga kerja murah serta klaim negara atas tanah yang "baru dibuka". Dalam banyak kasus transmigrasi berujung pada konflik antara pendatang dan masyarakat adat/tempatan—konflik yang mereduksi klaim adat dan memudahkan alokasi konsesi perusahaan.

Perkembangan sektor sawit sejak 1970-an memberi contoh bagaimana kebijakan negara, investasi swasta, dan militer saling menopang. Perusahaan sawit skala besar mendapatkan izin masuk ke wilayah pedesaan; sertifikasi lahan dan izin usaha sering diproses melalui relasi patronase lokal—antara pejabat daerah, birokrat pusat, dan kelompok bisnis yang dekat dengan kekuasaan. Pemadatan hukum kehutanan dan tata ruang yang diatur sentral membuat klaim masyarakat adat sulit diterima, sehingga peralihan hak atas lahan menjadi relatif mudah dilakukan lewat mekanisme izin dan konsesi. Di sini proses perampasan berjalan ganda, secara formal lewat izin negara; secara sosial-ekologis lewat konversi hutan dan lahan agraria menjadi kebun monokultur yang mengubah mata pencaharian lokal dan ekosistem.

Militer bukan sekadar kekuatan keamanan; institusi tersebut menjadi aktor ekonomi langsung dan mediator politik. Di bawah Orde Baru, jabatan dan akses ekonomi untuk perwira

Media Nusa Creative

militer dan jaringan kroninya menjadi mekanisme patronase yang menjamin loyalitas. Perwira militer sering memegang posisi strategis di perusahaan negara, perusahaan swasta, atau proyek-proyek pembangunan—sehingga kepentingan mereka tetap tumpang tindih dengan kepentingan modal. Ketika terjadi resistensi masyarakat—misalnya protes petani terhadap penggusuran atau perlawanan masyarakat adat terhadap konsesi tambang—intervensi militer dan aparat keamanan sering dipakai untuk meredam gerakan, kadang disertai intimidasi, penahanan, atau kekerasan fisik. Fungsi represif ini menawarkan dimensi koersif bagi *consent to coercion* yang Harvey gambarkan bahwa persetujuan institusional plus ancaman kekerasan membuat perampasan lebih efektif (Harvey, 2003).

Orde Baru juga menumbuhkan kelas pengusaha nasional yang rapat hubungannya dengan penguasa. Konglomerat kroni—nama besar seperti perusahaan milik keluarga besar di bidang perdagangan, perbankan, dan agribisnis—mendapat akses istimewa ke kredit, kontrak negara, dan konsesi. Mereka menjadi ujung tombak akumulasi domestik yang ibaratnya bekerja bersama — bukan bertentangan — dengan modal asing. Rezim perampasan di tangan Orde Baru dengan demikian adalah koalisi yang saling menguatkan, bagaimana negara memberikan jaminan legal dan koersif, kapital menyuntikkan modal dan mengekstrak nilai, sedangkan militer menjaga stabilitas yang dibutuhkan untuk operasi bisnis. Ketiga pilar ini bersama-sama menghasilkan transfer nilai skala besar dari ruang-ruang sosial lokal ke saku modal terpusat.

Pembentukan rezim perampasan itu memiliki konsekuensi sosial yang panjang seperti relokasi paksa, penggusuran desa-desa, pemiskinan petani, dan erosi hak-hak adat. Dampak ekologisnya juga parah—deforestasi masif, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati pada laju yang cepat. Ketimpangan kekayaan melebar, sementara struktur agraria

Media Nusa Creative

tetap berat sebelah; modal terakumulasi di pusat ekonomi dan jaringan oligarki, sedangkan mayoritas rakyat di wilayah pedesaan menjadi pekerja upahan atau kehilangan penghidupan. Studi empiris dari berbagai wilayah Indonesia pada periode ini mencatat pola khas, yaitu peningkatan ekspor komoditas mendahului perbaikan kesejahteraan lokal, sementara konflik agraria meningkat sebagai respons terhadap klaim tanah dan konsesi (Peluso, 1992; Robison, 1986).

Adalah penting melihat bahwa logika perampasan Orde Baru bukanlah anomali domestik; ia beroperasi dalam kaitan langsung dengan arus modal global. Pinjaman luar negeri, investasi asing, dan permintaan internasional atas sumber daya mendorong perilaku negara untuk memprioritaskan pertumbuhan dan stabilitas di atas hak sosial. Ketika krisis timbul, negara cenderung menggunakan instrumen utang, privatisasi, dan deregulasi—yang pada akhirnya membuka pintu bagi gelombang akumulasi baru melalui perampasan sumber daya publik. Dengan demikian, rezim Orde Baru adalah manifestasi lokal dari logika kapitalisme global yang terus mencari ruang akumulasi baru melalui pengambilalihan aset yang sebelumnya tidak dikapitalisasi.

Jika kita membaca Orde Baru lewat lensa *accumulation by dispossession*, jelas bahwa pembangunan di bawah rezim ini bukan sekadar proses modernisasi teknis, melainkan proses politik hukum yang merekonfigurasi hubungan kepemilikan dan akses. Hukum kehutanan, regulasi pertambangan, izin investasi, program transmigrasi, dan penguatan militer semua menjadi bagian dari mesin yang memfasilitasi peralihan aset—dari *commons* menjadi komoditas—dan memindahkan nilai dari masyarakat banyak ke jaringan modal. Rezim Orde Baru mencontohkan bagaimana negara pembangunan dapat berfungsi sebagai agen utama perampasan, bukan sebagai agen pembebasan.

Media Nusa Creative

Di akhir era Orde Baru, ketika krisis moneter dan tekanan sosial politik mengguncang tatanan pada 1997–1998, warisan perampasan itu menjadi sangat jelas, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, konflik agraria yang meluas, dan masyarakat yang teralienasi dari sumber dayanya sendiri. Pembongkaran Orde Baru membuka ruang politik, tetapi juga menunjukkan betapa mendalam dan sistemik logika perampasan yang telah dibangun selama tiga dekade. Memahami periode 1966–1998 sebagai rezim perampasan bukanlah sekadar interpretasi normatif; ia adalah alat analitik untuk melihat bagaimana pembangunan yang diklaim demi "kemajuan nasional" sebenarnya beroperasi demi akumulasi kapital—dengan konsekuensi sosial dan ekologis yang terus bergema hingga hari ini.

Media Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.

Peluso, N. L. (1992). *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. University of California Press.

Robison, R. (1986). *Indonesia: The Rise of Capital*. Allen & Unwin.

Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967.

Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.

Marx, K. (1990). *Capital*, Volume I (B. Fowkes, Trans.). Penguin. (Original work published 1867)

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

10

REFORMASI, NEOLIBERALISME, DAN PERAMPASAN BARU (1998–SEKARANG)

"*Neoliberalism does not shrink the state; it retools it for the work of dispossession*." - David Harvey, *The New Imperialism* (2003)

"*Participation and sustainability have become the new moral grammars of dispossession*." - Tania Murray Li, *Powers of Exclusion* (2014)

Ketika Soeharto lengser pada Mei 1998, jutaan orang menyambutnya sebagai akhir dari tiga dekade kediktatoran. Reformasi dijanjikan sebagai awal baru: demokrasi, kebebasan sipil, dan desentralisasi kekuasaan. Namun, dua dekade setelahnya, harapan itu tampak hanya sebagian terpenuhi. Demokrasi elektoral memang membuka ruang kompetisi politik, tetapi struktur ekonomi dan logika kekuasaan yang menopang Orde Baru tetap bertahan — bahkan beradaptasi dalam bentuk baru. Reformasi melahirkan demokrasi tanpa dekolonisasi, dan kapitalisme tanpa redistribusi. Jika Orde Baru adalah rezim pembangunanisme terpusat, maka era Reformasi adalah rezim neoliberal yang memecah kekuasaan tetapi memperluas perampasan.

David Harvey (2003) menyebut fase global pasca-1970 sebagai era *accumulation by dispossession*, bagaimana kapitalisme yang mempertahankan dirinya dengan merebut ulang apa yang sebelumnya di luar logika pasar — tanah, sumber daya, bahkan kehidupan sosial. Di Indonesia pasca-1998, perampasan tidak

Mejia Nusa Creative

lagi dilakukan melalui otoritarianisme militer seperti Orde Baru, melainkan melalui mekanisme hukum, kebijakan ekonomi, dan wacana partisipatif yang tampak demokratis. Inilah apa yang disebut Harvey (2003, p. 39) sebagai "*consent to coercion*" — kekuasaan yang memaksakan perampasan dengan persetujuan formal masyarakat, seringkali melalui partisipasi semu dan retorika kesejahteraan.

Jatuhnya Soeharto menandai fragmentasi kekuasaan negara. Desentralisasi politik melalui Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan dimaksudkan untuk mendekatkan kekuasaan ke rakyat. Namun dalam praktiknya, desentralisasi memperbanyak titik kekuasaan dan membuka peluang bagi munculnya oligarki lokal (Hadiz, 2010). Kepala daerah menjadi penguasa mini yang mengontrol izin tambang, kehutanan, dan perkebunan, sementara hubungan patronase dengan pengusaha tetap bertahan. Negara pusat memang melemah dalam kontrol langsung, tetapi logika kapital tetap hidup dalam jaringan lokal yang terdesentralisasi.

Vedi Hadiz dan Richard Robison (2013) menyebut fenomena ini sebagai "oligarki terdesentralisasi" — kelanjutan langsung dari rezim Orde Baru di bawah struktur demokrasi elektoral. Oligarki ini bekerja bukan melalui represi terbuka, melainkan melalui politik izin, tender, dan konsesi. Dalam konteks neoliberal, izin (*license*) menjadi bentuk baru dari hak milik, dan perizinan menjadi arena utama perebutan rente. Dengan demikian, reformasi tidak membubarkan rezim perampasan, tetapi mengubahnya menjadi sistem *governance* yang lebih cair, di mana kekuasaan negara, kapital, dan elite lokal saling berkelindan.

Liberalisasi ekonomi menjadi agenda utama era Reformasi, sejalan dengan intervensi lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia setelah krisis 1997–1998.

Media Nusa Creative

Pemerintah menandatangani *Letter of Intent* dengan IMF pada 1998, yang memuat agenda privatisasi BUMN, deregulasi investasi, dan pembukaan pasar keuangan (Rosser, 2002). Program ini disebut sebagai langkah menuju "efisiensi ekonomi," tetapi dalam kenyataannya, ia mempercepat pengalihan aset publik ke sektor swasta dan korporasi asing. Di bawah retorika reformasi ekonomi, terjadi gelombang perampasan baru — kali ini melalui mekanisme pasar dan kebijakan hukum.

Privatisasi perusahaan negara dan deregulasi investasi menciptakan medan baru akumulasi. Dalam sektor energi, misalnya, UU Migas No. 22/2001 membuka ruang bagi kontrak bagi hasil dengan perusahaan asing dan menyingkirkan monopoli Pertamina. Dalam sektor air, UU Sumber Daya Air No. 7/2004 (kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2015) memberi peluang bagi perusahaan swasta untuk mengelola air minum dan sumber daya air. Dalam sektor ketenagalistrikan, UU Ketenagalistrikan 2009 mendorong *independent power producers* (IPP) yang sebagian besar adalah konglomerat energi nasional dan asing.

Privatisasi ini tidak hanya mengalihkan kepemilikan aset publik, tetapi juga mengubah status warga menjadi konsumen. Layanan publik yang dulunya dibiayai negara kini dijalankan sebagai komoditas dengan logika profit. Harvey (2003) menulis bahwa privatisasi adalah salah satu mekanisme utama *accumulation by dispossession*, yaitu cara kapitalisme "mengambil kembali" ruang publik yang sebelumnya diciptakannya. Dalam konteks Indonesia, privatisasi BUMN dan sumber daya strategis bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan kelanjutan dari kolonialisme dalam bentuk neoliberalisme — perampasan yang dijalankan melalui hukum, bukan kekerasan terbuka.

Media Nusa Creative

Reformasi juga membuka kesempatan bagi daerah untuk menarik investasi sendiri. Sejak 2000, ratusan izin pertambangan, HGU, dan HPH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten tanpa kontrol ketat dari pusat. Akibatnya, ekspansi tambang dan perkebunan meningkat tajam. Menurut data JATAM (2020), terdapat lebih dari 8.000 izin tambang aktif yang mencakup lebih dari 43 juta hektare wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, izin ini tumpang tindih dengan lahan pertanian, hutan lindung, atau wilayah adat. Desentralisasi yang dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi lokal justru menggandakan mekanisme perampasan melalui kompetisi rente di tingkat daerah (Hadiz, 2010).

Di Kalimantan Timur, misalnya, liberalisasi izin tambang batu bara menyebabkan ekspansi perusahaan besar seperti KPC, Bayan, dan Adaro ke wilayah yang sebelumnya dikuasai masyarakat adat. Di Sulawesi Tengah dan Tenggara, izin nikel menjamur, memicu konflik antara masyarakat lokal dan Perusahaan. Di Sumatra dan Kalimantan, ekspansi kelapa sawit meningkat drastis — dari sekitar 3 juta hektare pada 1998 menjadi lebih dari 16 juta hektare pada 2022. Dalam banyak kasus, konsesi sawit diberikan kepada perusahaan yang terhubung dengan elite politik lokal, seringkali dengan memanfaatkan aparat keamanan untuk "mengamankan investasi."

Fenomena ini menunjukkan bentuk baru dari *consent to coercion* (Harvey, 2003), yaitu bagaimana kekuasaan tidak lagi menindas secara langsung, tetapi memaksa melalui mekanisme hukum dan ekonomi yang tampak legal. Masyarakat "setuju" untuk menyerahkan tanahnya demi pembangunan atau investasi, karena perlawanan berarti kehilangan akses terhadap birokrasi dan layanan. Kekerasan menjadi simbolik, tersembunyi dalam bahasa partisipasi. Inilah wajah baru perampasan pasca-Reformasi — perampasan yang dilakukan

Media Nusa Creative

dengan persetujuan administratif rakyat yang tak memiliki pilihan lain.

Pada dekade 2010-an, di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan terutama Joko Widodo, perampasan berbaju pembangunan mencapai puncaknya. Proyek infrastruktur masif — jalan tol, bendungan, bandara, pelabuhan, kawasan industri, dan ibu kota baru — dijalankan dengan retorika "konektivitas nasional." Pemerintah menekankan pentingnya infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, namun di balik itu terjadi penggusuran besar-besaran dan perampasan ruang hidup.

Proyek strategis nasional seperti Bendungan Jatigede (Sumedang) menggusur lebih dari 70 ribu orang tanpa kompensasi memadai; Bandara Kulon Progo (Yogyakarta) memaksa petani melepas lahan produktifnya atas nama kemajuan; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok menyingkirkan masyarakat pesisir yang telah tinggal turun-temurun. Dalam proyek-proyek ini, perampasan tidak dilakukan dengan kekerasan langsung seperti era Orde Baru, melainkan melalui kombinasi birokrasi, hukum, dan narasi partisipasi. Konsultasi publik diadakan, tetapi keputusan sudah ditetapkan; kompensasi dibayarkan, tetapi kehilangan sosial dan ekologis diabaikan.

Bahkan ketika wacana pembangunan mulai diganti dengan istilah "berkelanjutan" dan "hijau," logika perampasan tidak hilang. Program REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), misalnya, dipromosikan sebagai solusi iklim, tetapi di banyak tempat malah memperkuat kontrol negara dan korporasi atas hutan. Masyarakat adat dibatasi aksesnya dengan alasan konservasi, sementara perusahaan kehutanan dan lembaga donor internasional mengelola kredit karbon. Seperti dikatakan Li (2014), "*green economy is often a new moral justification for the same old dispossession*." Dalam

Media Nusa Creative

hal ini, ekonomi hijau menjadi *green grabbing* — bentuk baru kolonialisme ekologis di mana nilai ekonomi diproduksi dari penghapusan akses lokal.

Fase paling mutakhir dari perampasan pasca-Reformasi dapat dilihat pada Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) 2020. Dengan dalih menyederhanakan regulasi dan menciptakan lapangan kerja, UU ini merevisi lebih dari 70 undang-undang, termasuk sektor agraria, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Ia menghapus atau melemahkan banyak mekanisme kontrol sosial terhadap kapital: izin lingkungan diganti dengan perizinan berbasis risiko, sanksi pidana lingkungan dikurangi, dan perlindungan buruh dilemahkan. Dalam analisis hukum kritis, UU ini bukan sekadar deregulasi, tetapi pembentukan rezim hukum neoliberal — di mana hukum berfungsi sebagai perangkat untuk memfasilitasi, bukan membatasi, akumulasi kapital (Butt & Lindsey, 2020).

Konsekuensi langsungnya adalah percepatan perampasan tanah dan sumber daya. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 2024) mencatat lebih dari 2.500 konflik agraria selama periode 2015–2023, dengan luas lebih dari 5 juta hektare dan jutaan korban terdampak. Sebagian besar konflik berkaitan dengan proyek infrastruktur, tambang, dan perkebunan sawit. Di Riau, masyarakat adat Sakai digusur untuk perluasan kebun sawit perusahaan besar; di Kalimantan Tengah, desa-desa Dayak kehilangan lahan akibat proyek *Food Estate*; di Wadas, Jawa Tengah, warga menolak tambang batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener dan menghadapi intimidasi aparat. Setiap konflik ini menunjukkan pola yang sama, yaitu negara mengklaim pembangunan untuk rakyat, tetapi hasilnya adalah perampasan atas rakyat.

Fenomena ini persis seperti yang dijelaskan Harvey (2003), bahwa kapitalisme modern mempertahankan akumulasinya dengan "*recreating primitive accumulation under legal forms*."

Media Nusa Creative

Dalam konteks Indonesia, *accumulation by dispossession* tidak lagi memerlukan kekuasaan kolonial atau militerisasi brutal; ia bekerja melalui sistem demokrasi dan hukum yang telah dikonsolidasikan. Persetujuan masyarakat (*consent*) dicapai melalui konsultasi administratif, tetapi pilihan sebenarnya sudah ditentukan oleh logika pasar dan kepentingan modal. Seperti ditulis Li (2014), "*coercion has become embedded in the design of participation itself*."

Selain di pedesaan, perampasan juga berlangsung di kota. Jakarta menjadi laboratorium neoliberalisme urban — kota yang dipasarkan sebagai "*global city*" melalui proyek reklamasi, gentrifikasi, dan privatisasi ruang publik. Proyek reklamasi Teluk Jakarta, misalnya, melibatkan konsorsium pengembang besar yang dekat dengan elite politik. Nelayan tradisional kehilangan ruang tangkap, sementara pantai diubah menjadi kawasan eksklusif. Di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, proyek penataan kota sering berujung pada penggusuran komunitas miskin yang dianggap "kumuh." Mereka direlokasi ke rusun jauh dari tempat kerja, tanpa akses memadai terhadap ekonomi kota.

Proyek-proyek ini mengingatkan pada analisis Henri Lefebvre (1991) tentang *the production of space* — bahwa ruang kota selalu diproduksi oleh kekuasaan ekonomi dan politik. Dalam konteks neoliberal, ruang publik direstrukturisasi menjadi ruang komersial. Harvey (2008) menyebutnya "*the right to the city*" — hak yang terus-menerus dirampas oleh logika kapitalisme urban. Di Indonesia, hak atas kota telah digantikan oleh hak atas investasi. Pembangunan perkotaan menjadi arena baru *accumulation by dispossession*, di mana tanah, ruang sosial, dan bahkan identitas lokal dijual atas nama modernitas.

Setelah dua dekade reformasi, tampak jelas bahwa *dispossession* tidak berakhir; ia berubah bentuk. Jika Orde Baru menegakkan perampasan melalui militer dan otoritarianisme,

Media Nusa Creative

maka era Reformasi melakukannya melalui *consent to coercion*, yaitu perampasan yang dilegalkan, dilembagakan, dan dibungkus dalam retorika demokrasi. Desentralisasi menciptakan elite lokal yang menjalankan kekuasaan serupa dengan penguasa kolonial; neoliberalisme membuka ruang bagi kapital global untuk masuk dengan wajah ramah; dan hukum dijadikan alat untuk mengatur, bukan melindungi.

Harvey (2003) menjelaskan bahwa *accumulation by dispossession* tidak sekadar fenomena ekonomi, tetapi mekanisme politik dari kapitalisme global — cara sistem mempertahankan diri ketika akumulasi internal mulai stagnan. Dalam konteks Indonesia, perampasan pasca-Reformasi menegaskan integrasi struktural negara ke dalam tatanan neoliberal dunia. Sumber daya alam, tanah, dan buruh menjadi instrumen untuk menarik investasi asing; sementara kesejahteraan rakyat dijanjikan melalui pertumbuhan yang tidak pernah merata. Proyek pembangunan, baik yang berbasis batu bara maupun energi hijau, menjadi bentuk baru dari imperialisme global — *new imperialism* yang bekerja melalui pasar, hukum, dan utang.

Reformasi yang dahulu digadang-gadang sebagai jalan demokratisasi kini tampak sebagai fase baru dari kolonisasi internal. Demokrasi elektoral berfungsi menjaga sirkulasi elite; hukum berfungsi melegitimasi kapital; dan partisipasi masyarakat dijadikan mekanisme kooptasi. Rakyat yang berusaha melawan, seperti di Kendeng, Wadas, Seruyan, Riau, dan Papua, menghadapi represi yang dibenarkan atas nama pembangunan dan nasionalisme. Dengan demikian, pembangunan pasca-Reformasi tidak lagi bisa dipahami sebagai proyek kemajuan nasional, tetapi sebagai bentuk kontemporer perampasan yang dilembagakan dalam tatanan neoliberal.

Media Nusa Creative

Seperti diingatkan Harvey (2003) dan Li (2014), kapitalisme tidak berhenti menciptakan ruang baru untuk akumulasi. Di Indonesia, ruang itu kini mencakup bukan hanya hutan dan tambang, tetapi juga udara (melalui karbon), data (melalui digitalisasi), dan bahkan identitas budaya yang dikomodifikasi untuk pariwisata. Proses perampasan menjadi semakin halus, tetapi tidak kalah total. Ia hadir dalam kebijakan, hukum, proyek pembangunan, dan gaya hidup. Inilah wajah *dispossession through consent* di abad ke-2, bagaimana kekuasaan yang mengatur melalui janji kemajuan, dan rakyat yang terpaksa menyetujui nasibnya atas nama masa depan.

Media Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Barr, C. (2001). *Profits, Politics and Illegal Logging in Indonesia's Forests*. CIFOR.

Butt, S., & Lindsey, T. (2020). *Indonesian Law and Society* (3rd ed.). Federation Press.

Cribb, R. (2001). Genocide in Indonesia, 1965–1966. *Journal of Genocide Research*, 3(2), 219–239.

Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganisation of Power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57.

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.

Harvey, D. (2008). The Right to the City. *New Left Review*, 53, 23–40.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2024). Catatan Akhir Tahun 2023: Reforma Agraria di Bawah Bayang Oligarki. Jakarta.

Li, T. M. (2002). Local Histories, Global Markets: Cocoa and Class in Upland Sulawesi. *Development and Change*, 33(3), 415–437.

Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press.

Li, T. M. (2014). *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. NUS Press.

Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Blackwell.

Media Nusa Creative

McCarthy, J. F. (2010). Processes of Inclusion and Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrarian Change in Sumatra, Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, 37(4), 821–850.

Rosser, A. (2002). *The Politics of Economic Liberalization in Indonesia: State, Market, and Power*. Routledge.

Wallerstein, I. (1989). *The Modern World-System III*. Academic Press.

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

11

PERAMPASAN DI ERA DIGITAL

"Data is the new oil, and surveillance capitalism is the refinery that extracts it." - Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (2019)

"Digital life is increasingly colonized: our behaviors, interactions, and identities become raw material for global capital." Nick Couldry & Ulises A. Mejias, *The Costs of Connection* (2019)

Sejarah kapitalisme di Indonesia selalu ditandai oleh perebutan kendali atas sumber daya. Pada masa kolonial, yang direbut adalah tanah dan tenaga kerja; pada masa pembangunan Orde Baru, sumber daya alam dan ruang sosial. Kini, di abad ke-21, bentuknya bergeser ke data dan algoritma. Namun logikanya tetap sama, pemisahan masyarakat dari kendali atas sumber daya produktif mereka. Ekonom politik David Harvey menyebut mekanisme ini sebagai *accumulation by dispossession*—akumulasi melalui perampasan—proses di mana aset kolektif diubah menjadi komoditas privat demi pertumbuhan kapital.

Jika dulu yang dirampas adalah tanah, kini yang diekstraksi adalah data. Data menjadi sumber daya utama ekonomi digital, sebagaimana minyak pada era industri. Shoshana Zuboff dalam *The Age of Surveillance Capitalism* menjelaskan bagaimana perusahaan teknologi global mengubah perilaku manusia menjadi "surplus perilaku" untuk dimonetisasi lewat prediksi dan manipulasi perilaku konsumen. Dalam konteks ini, pengguna digital Indonesia bukan sekadar konsumen, tetapi juga produsen nilai yang tak disadarinya.

Media Nusa Creative

Indonesia dengan lebih dari 213 juta pengguna internet (DataReportal, 2024) adalah pasar digital terbesar di Asia Tenggara sekaligus laboratorium frontier baru kapitalisme digital. Aktivitas harian—mencari di Google, memesan Gojek, berbelanja di Tokopedia, atau menonton TikTok—menghasilkan jejak digital yang menjadi bahan bakar ekonomi platform. Seperti dalam fase kolonial, rakyat berpartisipasi dalam produksi nilai, tetapi hasilnya dikuasai oleh korporasi global yang mengendalikan algoritma dan server.

Fenomena ini disebut Nick Srnicek sebagai *platform capitalism*—fase kapitalisme yang bertumpu pada platform digital sebagai infrastruktur utama ekonomi. Di bawah skema ini, pengguna dan pekerja digital berperan sebagai "produsen tak dibayar," sementara keuntungan disentralisasi pada korporasi global. Model ini paling nyata terlihat dalam *gig economy*: pengemudi ojek daring, desainer lepas, atau penulis konten yang bekerja tanpa kepastian upah maupun jaminan sosial. Studi Khawarizmi (2023) menunjukkan, lebih dari 60% pekerja lepas di Indonesia menghadapi persaingan tinggi dan upah rendah, sementara biaya produksi seperti perangkat dan koneksi internet harus mereka tanggung sendiri. Fleksibilitas yang dipromosikan sebagai kebebasan, sesungguhnya adalah bentuk baru perampasan hak-hak dasar pekerja.

Kolonialisme Data dan Ketergantungan Baru

Dalam perspektif sistem dunia Immanuel Wallerstein, negara seperti Indonesia menempati posisi *periphery*—pemasok bahan mentah bagi pusat kapital global. Pola lama itu kini berulang dalam bentuk baru: data menjadi komoditas mentah, sementara nilai tambahnya dikuasai perusahaan teknologi raksasa. Ekonomi digital Indonesia bernilai lebih dari 80 miliar dolar AS (Google, Temasek & Bain, 2024), tetapi sebagian besar pertumbuhan itu ditopang oleh investasi dan infrastruktur asing. Aliran nilai kini bukan lagi hasil bumi ke Eropa,

Media Nusa Creative

melainkan arus data ke pusat server global milik Amazon, Google, dan Microsoft.

Peran negara dalam konteks ini ambivalen. Pemerintah menyediakan infrastruktur dan regulasi ramah investasi demi menarik kapital teknologi, namun langkah tersebut sering justru memperkuat subordinasi terhadap kepentingan global. Perjanjian perdagangan digital Indonesia–Amerika Serikat pada 2025, misalnya, mencantumkan klausul yang menjamin kebebasan transfer data pribadi ke luar negeri. Meski pemerintah menegaskan sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022), perjanjian ini menunjukkan bahwa data warga negara telah menjadi objek akumulasi dalam sirkuit kapital global.

Kondisi ini membuat Indonesia berisiko menjadi "periphery digital", penyedia data mentah bagi pusat kapital teknologi dunia. Seperti diuraikan Nick Couldry dan Ulises Mejias dalam *The Costs of Connection*, kolonialisme data bekerja dengan prinsip yang sama seperti kolonialisme klasik—menjadikan kehidupan sosial manusia sebagai sumber daya untuk diekstraksi. Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan dan e-commerce besar beberapa tahun lalu memperlihatkan lemahnya kedaulatan data nasional dan rendahnya literasi digital masyarakat. Data pribadi kini diperdagangkan di pasar gelap, menciptakan ekonomi kejahatan siber yang memperparah ketimpangan digital.

AI dan Perampasan yang Tak Terlihat

Kapitalisme digital mengekstraksi nilai bukan dari tenaga fisik, melainkan dari informasi tentang manusia. Kecerdasan buatan (AI) dan *big data* menjadi instrumen utama dalam proses ini. Kate Crawford dalam *Atlas of AI* menegaskan, AI bukan sekadar teknologi, tetapi rezim pengetahuan yang bergantung pada tenaga kerja murah dan infrastruktur material di Global South. Di Indonesia, ribuan pekerja digital menjadi *data annotator* dan

Media Nusa Creative

content moderator untuk melatih algoritma perusahaan global—mereka menciptakan nilai, namun tidak memiliki kendali atas hasilnya.

Di sisi lain, algoritma menjadi alat kekuasaan baru. Ruha Benjamin menyebutnya "*the New Jim Code*", mekanisme yang mereproduksi ketimpangan sosial melalui bias algoritmik. Di Indonesia, algoritma perekrutan daring, penilaian kredit digital, hingga pengawasan publik berpotensi menormalisasi ketimpangan dengan mengklaim objektivitas. Dalam logika Harvey, ini adalah bentuk mutakhir *dispossession*—perampasan bukan atas tanah, melainkan atas representasi diri dan hak untuk didefinisikan.

Nusantara dan Kedaulatan Digital

Proyek *smart city* Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi simbol ambisi Indonesia memasuki era digital. Namun, tanpa kedaulatan atas data dan algoritma, Nusantara berisiko menjadi laboratorium baru kapitalisme pengawasan. Pembangunan pusat data raksasa oleh AWS, Google, dan Microsoft di Bekasi dan Batam menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan kedaulatan digital dalam logika investasi, bukan kemandirian. Ketika infrastruktur dan pengolahan data dikuasai korporasi asing, "kedaulatan" yang dibangun hanya bersifat administratif, bukan substantif.

Dalam kerangka Wallerstein, frontier semacam ini membuka ruang baru bagi akumulasi kapital global sekaligus memperdalam ketergantungan struktural negara perifer. Namun, di tengah arus dominasi ini, mulai tumbuh benih perlawanan: gerakan masyarakat sipil dan komunitas teknologi lokal yang mendorong *data sovereignty* dan *commons-based digital economy*. Advokasi terhadap implementasi UU Perlindungan Data Pribadi, pengembangan proyek *open source*, serta upaya membangun infrastruktur cloud nasional adalah

Media Nusa Creative

langkah awal menuju *counter-dispossession*—perlawanan terhadap perampasan digital.

Menuju Ekonomi Digital yang Berdaulat

Sejarah perampasan di Indonesia menunjukkan kesinambungan yang mencolok: dari rempah-rempah VOC, tanah kolonial, sumber daya Orde Baru, hingga data dan algoritma di era digital—semuanya berakar pada logika akumulasi melalui perampasan. Ketika frontier lama mencapai batas resistensinya, kapitalisme mencari frontier baru, dan kini frontier itu adalah data.

Tantangan Indonesia bukan hanya memperluas transformasi digital, tetapi memastikan siapa yang mengendalikan nilai yang dihasilkan. Pembangunan digital tanpa kedaulatan data hanya akan memperdalam ketimpangan dan menciptakan bentuk kolonialisme baru yang tak kasat mata. Kedaulatan digital harus dimaknai bukan sekadar melindungi data pribadi, melainkan mengembalikan kendali atas infrastruktur, algoritma, dan nilai ekonomi digital ke tangan rakyat.

Membangun masa depan digital Indonesia berarti menolak logika perampasan dan menumbuhkan ekonomi data yang berbasis solidaritas dan kepemilikan bersama. Selama data masih diperlakukan sebagai komoditas, dan algoritma lebih berdaulat daripada warga, maka sejarah perampasan di negeri ini belum berakhir—ia hanya berganti wajah.

Media Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism*. Stanford University Press.

Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. Yale University Press.

DataReportal. (2024). Digital 2024: Indonesia. Retrieved November 6, 2025, from (https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia

Gandini, A. (2021). "Digital Labour: An Empty Signifier?" *Media, Culture & Society*, 43(2), 369–380.

Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. Honolulu, HI: University of Hawai'i Press.

Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.

Harvey, D. (2018). *Marx, capital, and the madness of economic reason*. Oxford: Oxford University Press.

Khawarizmi, K. (2023). Buruh Digital dan Negosiasi Kuasa: Siasat Komunitas Freelancer Indonesia Menghadapi Kerentanan Kerja di Tengah Kekuasan Asimetri Perusahaan Platform. *Jurnal PolGov*, *5*(1), 151-196.

Putri, E. P. (2022). Pentingnya Perlindungan Data Di Indonesia Sebagai Upaya Tanggungjawab Hukum Atas Kebocoran Data.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Sekretariat Negara.

Media Kusa Creative

Siregar, D. R., & Yulianto, A. (2024). “Platform Capitalism and Gig Work Precarity in Indonesia.” *Indonesian Journal of Social and Cultural Studies*, 9(2), 45–63.

Sorisa, C., Kiareni, C. L., & Parhusip, J. (2024). “Etika Keamanan Siber: Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia.” *Journal Sains Student Research*, 2(6), 586–593.

Srnicek, N. (2017). Platform Capitalism. Polity Press.

Wallerstein, I. (1974). The Modern World-System I. Academic Press.

Luo, Charles, Data Colonialism and the New Extractivism: How Digital Platforms Recreate Colonial Resource Extraction (July 15, 2025). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5352498 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5352498

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. Profile Books.

The Jakarta Post. (2025, July 24). RI-US trade deal possible threat to data sovereignty. Retrieved November 6, 2025, from (https://www.thejakartapost.com/business/2025/07/24/ri-us-trade-deal-possible-threat-to-data-sovereignty.html)

Antara News. (2025, July 25). Indonesia to allow personal data transfer to United States. Retrieved November 6, 2025, from (https://en.antaranews.com/news/368489/indonesia-to-allow-personal-data-transfer-to-united-states)

Antara News. (2025, July 26). No personal data transferred to US under trade pact: Govt. Retrieved November 6, 2025, from (https://en.antaranews.com/news/368897/no-personal-data-transferred-to-us-under-trade-pact-govt)

Media Nusa Creative

VOI.id. (2025, August 1). Trade deal sparks debate over Indonesia's data sovereignty. Retrieved November 6, 2025, from (https://voi.id/en/teknologi/500251)

Assegaf Hamzah & Partners (AHP). (2025, August 8). Indonesia–United States Trade Deal and the Transfer of Personal Data: Legal Implications under the PDP Law. Retrieved November 6, 2025, from (https://www.ahp.id/clientalert/AHPClientUpdate-8August2025.pdf)

Media Nusa Creative

Bagian III — Genealogi Kekuasaan

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

12

PERAMPASAN LEWAT BAHASA DAN HUKUM

"*Law speaks the language of order, but it is always written in the grammar of power*." - Michel Foucault, *Society Must Be Defended* (1976)

"*Legality is not the opposite of violence; it is its most enduring form*." - David Kennedy, *The Dark Sides of Virtue* (2004)

Dalam sejarah panjang Indonesia, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui senjata dan aparat, tetapi juga melalui bahasa — terutama bahasa hukum. Bahasa hukum menjanjikan kepastian, rasionalitas, dan keadilan; namun justru di situlah kekuatannya untuk menyembunyikan kekerasan dan ketimpangan. Ia mengubah perampasan menjadi "pembangunan," penaklukan menjadi "pengaturan," dan pengusiran menjadi "penertiban." Seperti diingatkan Foucault (1991), kekuasaan modern tidak selalu menindas secara kasar; ia bekerja dengan cara memproduksi kebenaran — membuat bahasa tertentu tampak alamiah, rasional, dan tak terbantahkan. Dalam konteks Indonesia, hukum menjadi perangkat epistemik yang membuat perampasan tampak sah, bahkan perlu.

Bahasa hukum tentang tanah dan pembangunan tidak muncul begitu saja; ia memiliki genealogi yang panjang, yang berakar sejak masa kolonial. Istilah seperti tanah negara, kepentingan umum, dan pembangunan nasional membawa warisan wacana kolonial yang menempatkan negara sebagai satu-satunya

Warta Nusa Creative

subjek rasional dan sah atas ruang. Ketika pemerintah kolonial Belanda memberlakukan *Agrarische Wet* 1870, mereka memperkenalkan konsep *domein verklaring/ van den staat* — gagasan bahwa semua tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan hukum adalah milik negara (Fitzpatrick, 2008). Dengan logika itu, masyarakat adat yang selama berabad-abad mengelola tanah secara komunal dinyatakan "tidak memiliki hak." Inilah bentuk awal dari kekerasan hukum, ia bekerja menghapus keberadaan hukum adat melalui logika legalitas formal.

Pasca-kemerdekaan, istilah "tanah negara" tidak dihapus, melainkan diadaptasi ke dalam hukum nasional. UUPA 1960 menyatakan bahwa seluruh tanah di Indonesia berada di bawah "hak menguasai negara." Rumusan ini tampak progresif karena menghapus dualisme hukum kolonial dan mengakui hak rakyat, tetapi di dalamnya tersimpan ambiguitas fundamental: negara tidak hanya bertugas mengatur, tetapi juga berhak menguasai. Seperti dicatat oleh Burns (1989) dan Fitzpatrick (2008), konsep "hak menguasai negara" memungkinkan birokrasi untuk menafsirkan kepemilikan rakyat sebagai hak yang bersyarat, dapat dicabut kapan pun demi "kepentingan umum." Dengan demikian, warisan kolonial tidak dihapus, melainkan direformulasi dalam bentuk nasional — dari *domein van den staat* menjadi tanah negara.

Istilah "kepentingan umum" sendiri adalah produk ideologis yang lentur. Dalam praktik hukum Indonesia, "kepentingan umum" tidak pernah didefinisikan secara sempit; ia dapat mencakup proyek infrastruktur, pertambangan, kawasan industri, bahkan investasi swasta. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, misalnya, memperluas kategori itu hingga mencakup proyek "investasi strategis nasional." Dengan demikian, bahasa hukum membuka ruang luas bagi negara dan korporasi untuk mengklaim legitimasi atas penguasaan ruang. Dalam kasus pembangunan

Media Nusa Creative

Bandara Kulon Progo, proyek KEK Mandalika, dan Bendungan Bener, "kepentingan umum" digunakan untuk menjustifikasi penggusuran ribuan orang. Kekerasan administratif ini berlangsung dengan restu hukum, dan dengan demikian tampak "tanpa kekerasan."

Bahasa hukum tidak netral; ia bekerja dengan gramatika kekuasaan. Ketika istilah "tanah negara" digunakan, ia menyingkirkan kemungkinan lain untuk memahami tanah sebagai ruang hidup, identitas, atau relasi ekologis. Ketika "investasi strategis" disebut, ia menyembunyikan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Dalam wacana hukum, setiap istilah membawa efek kebenaran (Foucault, 1978), ia tidak hanya mendeskripsikan realitas, tetapi menciptakannya. Bahasa hukum membentuk persepsi sosial tentang apa yang dianggap sah, rasional, dan modern. Masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya dipandang "melawan hukum," sementara korporasi yang menguasai ribuan hektare dianggap "sah secara administratif."

Istilah "pembangunan nasional" menempati posisi sentral dalam bahasa kekuasaan ini. Sejak Orde Baru, "pembangunan" (*development*) menjadi mantra negara yang menyatukan hukum, ekonomi, dan ideologi. Pembangunan tidak sekadar proyek ekonomi, tetapi bahasa legitimasi yang menggantikan kolonialisme. Escobar (1995) menunjukkan bahwa pembangunan bekerja sebagai dispositif — perangkat wacana yang memproduksi "dunia ketiga" sebagai subjek yang harus diperbaiki, dibina, dan dikembangkan. Dalam konteks Indonesia, pembangunan nasional mengandaikan rakyat sebagai "objek pembangunan" — pasif, butuh bimbingan, dan harus berpartisipasi dalam proyek negara. Di bawah logika itu, setiap tindakan negara atas tanah atau sumber daya dapat dibenarkan karena dilakukan "demi pembangunan."

Media Nusa Creative

Bahasa pembangunan juga menciptakan oposisi moral: antara "maju" dan "tertinggal," "produktif" dan "tidak produktif." Lahan yang dikelola secara subsisten dianggap tidak efisien; hutan adat dipandang liar; komunitas tradisional dianggap menghambat kemajuan. Maka, pembukaan lahan untuk sawit, tambang, atau kawasan industri bukanlah perampasan, melainkan rasionalisasi ruang. Dalam kata-kata Ferguson (1994), pembangunan adalah "*anti-politics machine*": mesin yang menghapus politik dari ranah ekonomi, menjadikan perampasan tampak sebagai tindakan teknokratis. Di sinilah hukum memainkan peran penting — bukan untuk mencegah kekerasan, tetapi untuk mengubahnya menjadi prosedur administratif yang sah.

Dalam dua dekade terakhir, muncul pula istilah baru dalam wacana hukum dan kebijakan: "objek vital nasional" dan "investasi strategis." Istilah ini sering digunakan dalam peraturan keamanan dan ekonomi untuk melindungi proyek yang dianggap penting bagi negara. Namun, di baliknya terdapat mekanisme perlindungan kapital. Dalam Peraturan Pemerintah No. 17/2018 tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara, misalnya, "objek vital" mencakup bandara, pelabuhan, pabrik, kilang, dan proyek energi — hampir seluruhnya dikelola oleh BUMN atau perusahaan swasta besar. Dengan label itu, aparat militer dapat dilibatkan untuk "mengamankan" proyek dari ancaman, termasuk dari warga yang menolak. Legalitas menjadi instrumen militerisasi ruang sipil.

Demikian pula istilah "investasi strategis nasional," yang banyak muncul sejak diterbitkannya UU Cipta Kerja 2020, berfungsi sebagai bahasa baru dari perampasan neoliberal. Undang-undang ini menyatukan ratusan regulasi di bawah satu kerangka hukum yang menyederhanakan izin investasi. Secara retoris, ia berbicara tentang efisiensi, kemudahan berusaha, dan partisipasi. Namun, dalam praktiknya, UU ini menghapus banyak perlindungan sosial dan lingkungan yang sebelumnya

Media Nusa Creative

ada. Perampasan tidak lagi terjadi melalui pencabutan hak secara paksa, tetapi melalui penghapusan prosedur hukum yang melindungi rakyat. Seperti dikatakan Harvey (2003), neoliberalisme adalah "negara yang direkayasa untuk memfasilitasi akumulasi kapital." Dalam konteks ini, hukum tidak melemah, tetapi disusun ulang agar sesuai dengan kebutuhan kapital.

Bahasa hukum juga menata relasi moral antara negara dan rakyat. Dalam setiap teks perundangan, negara selalu tampil sebagai pihak yang rasional, netral, dan berorientasi pada kepentingan umum; sementara rakyat tampil sebagai pihak yang emosional, tidak terdidik, dan perlu diarahkan. Relasi ini meniru logika kolonial: negara sebagai penjaga peradaban, rakyat sebagai objek pembinaan. Li (2007) menyebut ini *the will to improve* — keinginan kekuasaan untuk memperbaiki kehidupan orang lain tanpa mengubah struktur yang menciptakan ketimpangan. Melalui bahasa hukum, negara memposisikan dirinya bukan sebagai pelaku perampasan, tetapi sebagai "penyelenggara kemajuan." Dengan demikian, kekuasaan memperoleh bentuk etis: kekuasaan yang tampak baik.

Namun, seperti dicatat oleh Boaventura de Sousa Santos (2002), hukum modern adalah "*legal form of domination*" — bentuk penaklukan yang menyamar sebagai rasionalitas universal. Dalam sistem kapitalisme global, hukum tidak berdiri di luar ekonomi; ia adalah infrastruktur yang memungkinkan ekonomi beroperasi. Di Indonesia, hukum agraria, kehutanan, pertambangan, dan investasi telah menjadi alat untuk mengintegrasikan ruang-ruang lokal ke dalam sirkuit kapital global. Bahasa hukum yang tampak teknis menyembunyikan fakta bahwa setiap izin adalah keputusan politik; setiap "izin usaha" adalah bentuk transfer nilai dari publik ke privat.

Media Nusa Creative

Dengan demikian, hukum dan bahasa tidak bisa dipisahkan dari politik perampasan. Mereka adalah dua sisi dari proses yang sama: hukum memberi bentuk formal pada kekuasaan, dan bahasa memberi makna moral pada bentuk itu. Tanpa bahasa "pembangunan," penggusuran akan tampak seperti kekerasan; tanpa istilah "investasi strategis," perampasan akan tampak seperti pencurian. Bahasa mengubah perampasan menjadi pengorbanan, dan pengorbanan menjadi kewajiban nasional. Di sinilah kekuasaan hukum mencapai bentuk tertingginya: bukan ketika ia memaksa, tetapi ketika ia membuat orang percaya bahwa paksaan adalah kebaikan.

Di hadapan kekuasaan seperti ini, kritik terhadap hukum tidak bisa berhenti pada pelanggaran prosedural. Ia harus menelusuri genealogi istilah dan makna: bagaimana "tanah negara," "kepentingan umum," atau "investasi strategis" diproduksi, disebarkan, dan diterima sebagai kebenaran. Sebab, seperti diingatkan Foucault (1976), "*power produces reality; it produces domains of objects and rituals of truth*." Hukum tidak hanya menegakkan kekuasaan; ia menciptakan dunia di mana kekuasaan tampak wajar. Maka, melawan perampasan berarti juga melawan bahasanya — mengembalikan makna tanah, pembangunan, dan kehidupan kepada mereka yang dirampas atas namanya.

Media Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Burns, P. (1989). *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. KITLV Press.

Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press.

Ferguson, J. (1994). *The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. University of Minnesota Press.

Fitzpatrick, D. (2008). *Beyond Dualism: Land Acquisition and Law in Indonesia*. In J. F. McCarthy & K. Robinson (Eds.), *Land and Development in Indonesia*. ISEAS.

Foucault, M. (1976). *Society Must Be Defended: Lectures at the Collège de France, 1975–76*. Picador.

Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality*, Volume I: An Introduction. Pantheon.

Foucault, M. (1991). *Governmentality*. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality (pp. 87–104). University of Chicago Press.

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.

Kennedy, D. (2004). *The Dark Sides of Virtue: Reassessing International Humanitarianism*. Princeton University Press.

Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press.

Santos, B. de S. (2002). *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation*. Butterworths.

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

13

TUBUH, TENAGA, DAN PENGETAHUAN YANG DIRAMPAS

"*Capitalism did not begin with machines, but with the body — disciplined, measured, and made productive*." - Silvia Federici, *Caliban and the Witch* (2004)

"*To colonize a people is also to colonize their ways of knowing and being*." - Boaventura de Sousa Santos, *Epistemologies of the South* (2014)

Ketika kita berbicara tentang perampasan (d*ispossession*), yang sering muncul adalah bentuk material: tanah yang diambil, hutan yang dibabat, tambang yang menganga. Namun perampasan tidak berhenti di situ. Ia juga bekerja di ranah yang lebih halus — tubuh, waktu, tenaga, dan pengetahuan. Kapitalisme dan modernitas, sejak kelahirannya, telah mengandaikan bahwa tubuh manusia dapat diatur, waktu dapat diukur, dan pengetahuan dapat diurutkan dalam hierarki "modern" dan "tradisional." Dalam konteks Indonesia, proyek modernitas dan pembangunan bukan hanya menata ulang ruang ekonomi dan politik, tetapi juga menormalisasi bentuk kehidupan tertentu — kehidupan yang produktif, rasional, dan sesuai dengan logika kemajuan. Di situlah berlangsung bentuk paling dalam dari *dispossession*, yaitu pengambilalihan cara hidup dan cara berpikir.

Michel Foucault (1977) menyebut proses ini sebagai *disciplinary power*, yaitu bagaimana kekuasaan bekerja bukan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan mengatur tubuh dan

Media Nusa Creative

perilaku agar tunduk pada norma tertentu. Sejak masa kolonial, tubuh penduduk Hindia Belanda menjadi objek disiplin, mulai dari sistem kerja paksa, pemeriksaan kesehatan, penataan kampung, dan pendidikan moral semuanya diarahkan untuk menciptakan subjek yang patuh dan produktif. Di perkebunan tebu dan kopi Jawa abad ke-19, waktu kerja diatur dengan ketat; tenaga diukur, produktivitas dihitung. Seperti dicatat Stoler (1995), bahkan tubuh dianggap indikator moral — tubuh pekerja pribumi dilihat sebagai malas dan perlu didisiplinkan agar "layak" bagi peradaban.

Orde Baru mewarisi logika ini dalam bentuk baru, melalui pembangunan nasional yang menuntut "disiplin, kerja keras, dan efisiensi." Tubuh warga negara diatur melalui sekolah, pabrik, kamp kerja, dan program keluarga berencana. Ideologi Trilogi Pembangunan — stabilitas, pertumbuhan, pemerataan — mengandaikan warga yang patuh, rajin, dan tidak banyak menuntut. Bagi buruh pabrik, tubuh mereka dijadikan mesin waktu produktif yang tak pernah berhenti; bagi petani, tenaga mereka dipaksa tunduk pada program intensifikasi pangan. Dalam istilah Marx (1867/1990), inilah transformasi tenaga kerja menjadi komoditas, dan waktu hidup menjadi sumber akumulasi kapital. Tubuh menjadi modal, bukan kehidupan.

Bagi perempuan, perampasan ini memiliki dimensi ganda. Silvia Federici (2004) menunjukkan bahwa kapitalisme awal dibangun melalui pengendalian tubuh Perempuan, yaitu melalui kerja reproduksi — melahirkan, merawat, memberi makan — dijadikan kerja tak berbayar yang menopang akumulasi kapital. Di Indonesia, proyek pembangunan keluarga menempatkan perempuan sebagai "ibu bangsa," penjaga moral dan reproduksi sosial. Tubuh perempuan dijadikan simbol moralitas nasional sekaligus sumber tenaga murah dalam industri garmen, elektronik, dan tenaga kerja migran (Ford & Lyons, 2011). Perempuan menjadi subjek yang diatur melalui norma kesopanan, agama, dan ekonomi — tubuh yang harus

Media Nusa Creative

bekerja tetapi tidak boleh berkuasa atas dirinya sendiri. Dalam konteks ini, pembangunan adalah bentuk *disciplining of desire* (Ong, 1999), yaitu pengaturan tubuh dan hasrat agar selaras dengan logika produktivitas dan moralitas kapitalis.

Dispossession juga terjadi melalui pengambilalihan waktu. Marx (1867/1990) sudah mencatat bahwa kapitalisme tumbuh dengan memisahkan produsen dari kendali atas waktunya sendiri. Dalam sistem kerja upahan, waktu menjadi komoditas yang dibeli dan dijual; setiap jam kerja adalah nilai yang diambil. Di Indonesia, transisi dari ekonomi subsisten ke ekonomi upahan mempercepat proses ini. Modernitas memperkenalkan jam kerja, kalender, dan ritme industri — bentuk *temporal colonization* (Adam, 1990) di mana waktu tradisional digantikan oleh waktu produktif. Dalam pabrik-pabrik di Bekasi, Batam, atau Semarang, buruh perempuan bekerja 10–12 jam sehari, sementara waktu istirahat dan sosial mereka terkikis. Di perkebunan sawit Kalimantan dan Riau, buruh harian lepas tidak hanya menjual tenaga, tetapi juga waktu hidup mereka kepada sistem yang tidak pernah selesai.

Waktu juga dirampas melalui utang dan ekonomi digital. Program *financial inclusion* dan kredit mikro menjanjikan kemandirian, tetapi pada praktiknya menciptakan ketergantungan baru. Seperti ditunjukkan oleh Graeber (2011), utang adalah bentuk perampasan masa depan: ia mengikat individu untuk bekerja demi nilai yang sudah diambil sebelumnya. Di Indonesia, jutaan perempuan kini menjadi sasaran kredit mikro, baik melalui koperasi, fintech, maupun lembaga donor. Mereka terlibat dalam siklus kerja yang tak pernah berhenti — menjual waktu hari ini untuk membayar utang kemarin. Dalam konteks ini, kapitalisme neoliberal menciptakan bentuk baru *dispossession of time*, yaitu perampasan masa depan melalui mekanisme finansial.

Media Nusa Creative

Perampasan juga menyasar dimensi ekologis dan kosmologis — cara manusia memahami hubungannya dengan alam. Bagi banyak komunitas adat di Indonesia, tanah, hutan, sungai, dan gunung bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi bagian dari kosmologi kehidupan, ruang yang mengandung roh leluhur dan keterikatan spiritual. Ketika negara menyatakan hutan sebagai "tanah negara" atau "kawasan produksi," ia tidak hanya mengambil sumber daya, tetapi juga menghapus relasi ontologis antara manusia dan alam. Ini adalah bentuk *ontological dispossession* (Blaser, 2013): pemaksaan satu cara berada di dunia atas cara-cara lain yang dianggap "tidak modern."

Di berbagai wilayah, seperti di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi, komunitas adat terus berhadapan dengan proyek tambang, hutan tanaman industri, dan konservasi. Dalam semua proyek itu, alam dipandang sebagai "sumber daya" yang harus dikelola secara rasional. Li (2014) menunjukkan bahwa pemerintah dan donor internasional sering menggunakan bahasa "pengelolaan lestari" untuk menyingkirkan penduduk lokal. Di bawah retorika keberlanjutan, terjadi penghapusan pengetahuan ekologis yang telah bertahan selama berabad-abad. Sistem ladang berpindah, yang dianggap "tidak efisien," digantikan dengan perkebunan monokultur; ritual adat yang menjaga keseimbangan ekologis dianggap tak ilmiah dan dilarang. Modernitas meminggirkan spiritualitas, menggantinya dengan kalkulasi ekonomi dan pengukuran karbon. Inilah bentuk *dispossession* yang paling sunyi — perampasan makna dunia.

Jika tanah dan tubuh dapat direbut secara fisik, maka pengetahuan direbut secara epistemik. Boaventura de Sousa Santos (2014) menyebutnya *epistemicide* — pembunuhan terhadap sistem pengetahuan non-Barat melalui dominasi sains modern dan kolonialisme epistemik. Dalam sejarah Indonesia, kolonialisme Belanda membangun hierarki

Media Nusa Creative

pengetahuan yang menempatkan ilmu Barat sebagai kebenaran universal, sementara pengetahuan lokal dianggap takhayul. Pendidikan kolonial menciptakan subjek terdidik yang berpikir dalam kerangka modernitas Eropa, bukan dalam kosmologi lokal. Proyek nasionalisme pasca-kemerdekaan melanjutkan warisan ini: modernisasi diartikan sebagai "rasionalisasi," pembangunan diartikan sebagai "pencerahan."

Akibatnya, pengetahuan lokal — tentang pertanian, obat-obatan, pengelolaan air, hingga kosmologi — kehilangan statusnya sebagai sumber legitimasi. Negara mengadopsi logika *developmentalism* yang melihat tradisi sebagai penghalang kemajuan. Seperti dicatat Escobar (1995), pembangunan tidak hanya mengatur ekonomi, tetapi juga "memproduksi subjek pembangunan" — individu yang belajar untuk tidak percaya pada pengetahuannya sendiri. Dalam konteks ini, modernitas Indonesia adalah proyek epistemik: menanamkan cara berpikir tertentu, membatasi yang lain. Sekolah, universitas, dan media menjadi aparatus yang melestarikan pengetahuan modern sambil menghapus cara lain untuk memahami dunia.

Kini, bentuk baru *epistemic dispossession* muncul dalam wacana "*smart city*," "industri 4.0," dan "*digital economy*." Pengetahuan lokal dianggap ketinggalan zaman, digantikan oleh teknologi dan data. Namun, seperti ditunjukkan oleh Couldry dan Mejías (2019), kapitalisme digital juga adalah bentuk kolonialisme baru: *data colonialism* yang mengekstraksi informasi dan perhatian manusia untuk akumulasi nilai. Di Indonesia, proyek digitalisasi desa, *smart farming*, dan ekowisata seringkali menggantikan praktik lokal dengan sistem algoritmik yang dikendalikan oleh perusahaan teknologi. Pengetahuan menjadi sumber daya baru yang diprivatisasi, sementara pengalaman hidup masyarakat dikonversi menjadi data. Ini adalah bentuk terbaru dari *epistemic extraction*: perampasan pengetahuan melalui teknologi.

Mbuja Nusa Creative

Semua bentuk perampasan ini — tubuh, waktu, ekologi, pengetahuan — terikat oleh satu logika, yaitu normalisasi. Modernitas Indonesia adalah proyek yang tidak hanya membangun infrastruktur dan industri, tetapi juga membentuk manusia "modern" yang produktif, rasional, berorientasi pasar, dan taat hukum. Dalam bahasa Foucault (1991), kekuasaan modern bekerja melalui *governmentality* — seni mengatur kehidupan agar sesuai dengan norma tertentu. Dalam proyek pembangunan, kehidupan rakyat diatur melalui survei, statistik, dan kebijakan; yang tidak sesuai dianggap perlu "diperbaiki." Modernitas menjanjikan kemajuan, tetapi dengan syarat: menundukkan diri pada rasionalitas ekonomi dan hukum negara.

Maka, *dispossession* di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai kehilangan materi, melainkan kehilangan otonomi atas kehidupan itu sendiri. Tubuh diatur, waktu dijadwal, alam diukur, dan pengetahuan disaring. Kapitalisme dan modernitas bersekutu dalam mengubah kehidupan menjadi komoditas, dan keberagaman menjadi penyimpangan. Namun, di balik itu, resistensi tetap hidup — dalam ritual adat yang terus dijalankan meski dilarang, dalam buruh perempuan yang berorganisasi, dalam komunitas yang menolak tambang dan menulis ulang hubungan mereka dengan tanah. Mereka menolak bukan hanya kehilangan ruang, tetapi juga kehilangan makna. Karena pada akhirnya, melawan *dispossession* berarti menegaskan kembali hak untuk menentukan cara hidup dan cara mengetahui sendiri.

Mejia Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Adam, B. (1990). *Time and Social Theory*. Polity Press.

Blaser, M. (2013). Ontological Conflicts and the Stories of Peoples in Spite of Europe. *Current Anthropology*, 54(5), 547–568.

Couldry, N., & Mejías, U. A. (2019). *The Costs of Connection: How Data is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism*. Stanford University Press.

Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press.

Federici, S. (2004). *Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation*. Autonomedia.

Ford, M., & Lyons, L. (2011). *Outsourcing Domesticity: International Domestic Workers in Asia*. Routledge.

Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage.

Foucault, M. (1991). *Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller* (Eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. University of Chicago Press.

Graeber, D. (2011). *Debt: The First 5,000 Years*. Melville House.

Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.

Marx, K. (1990). *Capital: A Critique of Political Economy*, Volume I (B. Fowkes, Trans.). Penguin. (Original work published 1867)

Ong, A. (1999). *Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality*. Duke University Press.

Santos, B. de S. (2014). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. Routledge.

Media Nusa Creative

Stoler, A. L. (1995). *Race and the Education of Desire: Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things*. Duke University Press.

Media Nusa Creative

14

RESISTENSI DAN AGENSI

"*Where there is power, there is resistance*." - Michel Foucault, *The History of Sexuality*, Volume I (1978)

"*The commons are not remnants of the past but prefigurations of a future beyond capitalism*." - Silvia Federici, *Re-Enchanting the World* (2018)

Jika sejarah Indonesia adalah sejarah perampasan, maka ia juga adalah sejarah perlawanan yang tak pernah padam. Di balik setiap kebijakan pembangunan, setiap proyek investasi, dan setiap hukum yang menyingkirkan rakyat, selalu muncul gerakan kecil yang menolak, merawat, dan menegosiasikan kehidupan. Perlawanan di Indonesia tidak selalu meledak dalam bentuk revolusi, tetapi sering berlangsung dalam keseharian — dalam tindakan bertahan, berbagi, dan mengingat. Sejarah ini menunjukkan bahwa *dispossession* tidak pernah total; selalu ada celah di mana agensi tumbuh.

Michel Foucault (1978) mengingatkan bahwa kekuasaan tidak pernah tunggal dan mutlak, sebab di setiap relasinya tersimpan potensi perlawanan. Dalam konteks Indonesia, agensi rakyat muncul bukan hanya dalam bentuk protes terbuka, tetapi juga dalam praktik alternatif yang mempertanyakan logika kapitalisme dan pembangunan. Dari gerakan tani di era kolonial hingga komunitas adat dan koperasi rakyat hari ini, perlawanan terhadap perampasan adalah juga perjuangan untuk menegaskan kembali cara hidup di luar logika pasar dan negara.

Media Nusa Creative

Perlawanan terhadap perampasan di Indonesia memiliki akar yang panjang dan berlapis. Pada masa kolonial, pemberontakan petani menjadi bentuk utama resistensi terhadap penindasan agraria. Pemberontakan Banten (1888), Cilegon, Tapanuli, hingga perang Sisingamangaraja dan Diponegoro, semuanya berakar pada ketidakadilan tanah dan beban pajak. Seperti dicatat oleh Scott (1985), perlawanan petani sering kali tidak frontal, tetapi berlangsung sebagai *everyday forms of resistance*, yaitu melalui sabotase, pembangkangan, perlambatan kerja, dan bentuk-bentuk keengganan terhadap otoritas. Perlawanan ini menandai bahwa bahkan dalam dominasi kolonial paling keras, rakyat tidak pernah sepenuhnya tunduk.

Setelah kemerdekaan, perjuangan agraria menjadi tulang punggung gerakan rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 lahir dari tekanan gerakan tani yang menuntut redistribusi tanah dan penghapusan struktur feodal. Gerakan Tani Indonesia (GTI), Sarekat Tani, dan kemudian Barisan Tani Indonesia (BTI) berusaha menegakkan prinsip "tanah untuk yang menggarap." Namun, kekerasan 1965 menghancurkan struktur gerakan rakyat ini, dan bersama dengannya, gagasan keadilan agraria dikubur di bawah wacana stabilitas dan pembangunan (Roosa, 2006). Tragedi itu tidak hanya memusnahkan ribuan aktivis, tetapi juga menimbulkan trauma kolektif yang membuat perlawanan agraria harus menemukan bahasa barunya di era setelahnya.

Era Orde Baru menandai periode di mana resistensi harus menyamar. Di bawah represi militer, gerakan rakyat bertahan melalui organisasi nonformal dan jaringan solidaritas. Buruh membentuk serikat bawah tanah; masyarakat adat merawat ritual sebagai bentuk kedaulatan; kelompok perempuan menumbuhkan ekonomi rumah tangga sebagai ruang resistensi terhadap logika upah dan industri (Hadiz, 1997). Gerakan lingkungan seperti WALHI dan JATAM muncul pada akhir 1980-an sebagai bentuk baru politik ekologis,

Media Nusa Creative

menghubungkan eksploitasi sumber daya dengan struktur kekuasaan. Meskipun banyak diintimidasi, jaringan ini menanamkan kembali kesadaran bahwa pembangunan yang dijalankan negara bukanlah netral, melainkan sarana perampasan yang dilegalkan.

Reformasi 1998 membuka ruang bagi artikulasi baru resistensi. Gerakan tani kembali muncul melalui Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang menuntut redistribusi tanah dan reforma agraria sejati. Masyarakat adat membentuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada 1999, menegaskan hak atas wilayah dan identitas yang dihapus oleh negara. Gerakan buruh, perempuan, nelayan, dan mahasiswa mulai bersatu dalam jaringan lintas isu, menyadari bahwa perjuangan mereka tidak terpisah: semua berakar pada struktur *dispossession* yang sama — negara dan kapital yang terus memperluas akumulasi. Dalam periode inilah muncul kesadaran baru: perlawanan bukan sekadar menuntut reformasi kebijakan, tetapi juga menantang logika pembangunan itu sendiri.

Dalam dua dekade terakhir, gerakan resistensi di Indonesia berkembang tidak hanya dalam bentuk protes politik, tetapi juga dalam praktik sosial yang menciptakan alternatif. Silvia Federici (2018) menyebut ini sebagai *commoning* — proses mengembalikan sumber daya ke dalam pengelolaan kolektif di luar logika pasar dan negara. Dalam konteks Indonesia, praktik *commoning* tampak dalam banyak bentuk: koperasi tani yang mengelola lahan secara kolektif, komunitas pesisir yang menjaga ruang tangkap bersama, hingga inisiatif perkotaan yang merebut kembali ruang publik untuk solidaritas.

Di Sumatra Barat dan Kalimantan Tengah, misalnya, masyarakat adat membangun sistem pengelolaan hutan berbasis hukum adat, menolak klaim negara atas “tanah negara.” Kelompok petani Kendeng mengembangkan pertanian berbasis kearifan lokal dan menolak tambang semen yang

Media Nusa Creative

mengancam mata air mereka. Di Kalimantan, komunitas membangun *credit union* berbasis solidaritas, menolak logika bank komersial yang mendorong utang. Semua ini adalah bentuk *reclaiming* — merebut kembali bukan hanya tanah, tetapi juga otonomi atas kehidupan dan pengetahuan.

Gerakan *commoning* di Indonesia menunjukkan bahwa resistensi tidak harus bersifat destruktif; ia dapat bersifat produktif — menciptakan dunia lain di dalam dunia yang menindas. Seperti dicatat oleh Linebaugh (2008), *commons* bukan sekadar ruang milik bersama, tetapi praktik sosial yang berakar pada solidaritas dan pemeliharaan timbal balik. Dalam konteks agraria, *reclaiming* menjadi strategi melawan *dispossession* yang dilembagakan oleh hukum dan pasar. Tanah-tanah yang direbut kembali — seperti di Jambi, Lampung, dan Sulawesi Selatan — bukan hanya ruang produksi, tetapi juga ruang politis di mana relasi sosial baru dibangun: tanpa majikan, tanpa kapital, dan tanpa izin negara. Di sinilah muncul bentuk modernitas tandingan — kehidupan yang menolak dikurung dalam logika efisiensi dan pertumbuhan.

Dalam banyak komunitas, perempuan menjadi garda depan resistensi. Mereka bukan hanya korban perampasan, tetapi juga penjaga kehidupan yang dirampas. Dalam gerakan Kendeng, perempuan menjadi simbol keteguhan terhadap industrialisasi yang mengancam sumber air. Mereka menanam kaki mereka dalam semen sebagai penanda bahwa tubuh adalah bagian dari tanah. Dalam istilah Federici (2018), ini adalah *politics of care* — politik yang berakar pada pemeliharaan, bukan produksi. Di Riau dan Kalimantan, kelompok perempuan membentuk jaringan untuk melawan kekerasan perusahaan sawit dan memperjuangkan hak lingkungan. Mereka mengartikulasikan resistensi bukan dalam bahasa ideologi, tetapi dalam bahasa kehidupan sehari-hari: tentang air, pangan, anak, dan masa depan.

Media Nusa Creative

Perlawanan perempuan memperluas makna politik: dari perebutan kekuasaan ke pemeliharaan kehidupan. Ia menolak dikotomi antara privat dan publik, ekonomi dan sosial, produksi dan reproduksi. Dalam logika pembangunan, perawatan dianggap kerja tak produktif; dalam logika perlawanan, ia menjadi inti keberlanjutan. Seperti ditulis oleh Federici (2004), "*to reclaim the commons is to reclaim the body, the time, and the reproduction of life itself*." Gerakan perempuan, dalam hal ini, menjadi sumber epistemologi politik yang menolak ekonomi kapitalis dan patriarki sebagai fondasi kemajuan.

Dari gerakan agraria hingga komunitas digital alternatif, resistensi di Indonesia hari ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai modernitas tandingan — bentuk kemajuan yang tidak diukur oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh kemampuan menjaga kehidupan bersama. Gerakan lingkungan yang memperjuangkan *ecological citizenship* (Isin, 2012), koperasi rakyat yang menolak spekulasi pasar, komunitas adat yang menghidupkan kembali ritual, semua menunjukkan kemungkinan lain bagi modernitas. Ini bukan nostalgia romantik terhadap masa lalu, tetapi usaha untuk menulis masa depan di luar logika perampasan.

Modernitas tandingan ini berakar pada kesadaran bahwa pembangunan tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan, dan kemajuan tidak identik dengan kebebasan. Dalam setiap praktik commoning, terdapat penolakan terhadap ide bahwa manusia harus mendominasi alam dan sesamanya. Dalam setiap gerakan reclaiming, ada upaya mengembalikan kehidupan kepada relasi timbal balik. Dan dalam setiap perlawanan lokal, tersimpan visi global tentang dunia yang lebih adil. Seperti ditulis Harvey (2010), "*the right to change the city is the right to change ourselves*." Begitu pula, hak atas tanah, air, dan kehidupan adalah hak untuk menulis ulang makna kemajuan.

Media Nusa Creative

Di tengah dominasi neoliberalisme dan represi yang dilembagakan, resistensi di Indonesia mungkin tampak kecil dan terfragmentasi. Namun, justru dalam fragmen itulah harapan tumbuh. Setiap komunitas yang menolak tambang, setiap perempuan yang mempertahankan tanah, setiap koperasi yang berbagi hasil, adalah bentuk kehidupan yang mengingatkan kita bahwa dunia tidak harus berjalan seperti sekarang. Perlawanan bukan sekadar menolak kekuasaan, tetapi membangun kembali dunia yang dirampas.

Dan mungkin di situlah letak makna terdalam dari sejarah panjang ini: bahwa jika pembangunan dan modernitas Indonesia bertumpu pada perampasan, maka masa depannya hanya bisa dibangun melalui pemulihan — *recovery*, *reclamation*, dan *re-commoning* kehidupan bersama.

Media Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Federici, S. (2004). *Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation*. Autonomedia.

Federici, S. (2018). *Re-Enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons*. PM Press.

Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality*, Volume I: An Introduction. Pantheon.

Hadiz, V. R. (1997). *Workers and the State in New Order Indonesia*. Routledge.

Harvey, D. (2010). *Social Justice and the City*. University of Georgia Press.

Isin, E. F. (2012). *Citizens Without Frontiers*. Bloomsbury.

Linebaugh, P. (2008). *The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All*. University of California Press.

Roosa, J. (2006). *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia*. University of Wisconsin Press.

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

Bagian IV — Sejarah Sebagai Alat Pembebasan

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

15

MELAMPAUI PEMBANGUNAN

"*The crisis of development is not a crisis of implementation but a crisis of imagination*." - Arturo Escobar, *Encountering Development* (1995)

"*To live well is not to grow without end, but to live in reciprocity*." Eduardo Gudynas, *Buen Vivir: Today's Tomorrow* (2011)

Setelah lebih dari setengah abad merdeka, Indonesia terus memuja satu kata kunci yang dianggap sacral yaitu "pembangunan". Ia menjadi mantra nasional yang merangkul semua rezim dan ideologi, dari Orde Baru hingga Reformasi, dari program industrialisasi hingga ekonomi hijau. Namun di balik keberhasilannya membangun jalan, bendungan, dan menara, pembangunan telah gagal menjawab pertanyaan paling mendasar: untuk siapa kemajuan itu? Seperti diingatkan Escobar (1995), krisis pembangunan bukan karena ia gagal diimplementasikan, tetapi karena ia didasarkan pada asumsi yang salah tentang manusia, alam, dan makna kehidupan itu sendiri.

Pembangunan, dalam bentuknya yang dominan, lahir dari rasionalitas modernitas Barat yang memisahkan manusia dari alam, ekonomi dari etika, dan kemajuan dari keberlanjutan. Dalam paradigma ini, kemajuan diukur melalui pertumbuhan — akumulasi tanpa batas yang menjadikan bumi sekadar mesin produksi. Dalam konteks Indonesia, paradigma ini diadopsi tanpa kritik sejak Orde Baru. Pembangunan nasional didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

Media Nusa Creative

industrialisasi cepat, dan integrasi ke pasar global. Pembangunan menjadi ideologi negara, dan pertumbuhan menjadi moralitas baru. Mereka yang menolak atau tidak sesuai dengan logika ini dianggap "tertinggal," "tradisional," atau "anti-kemajuan."

Namun, seperti ditunjukkan oleh Wolfgang Sachs (1992), pembangunan bukanlah konsep netral — ia adalah bentuk kekuasaan epistemik yang menentukan siapa yang dianggap maju dan siapa yang tidak. Ia membentuk dunia dalam hierarki: pusat dan pinggiran, modern dan primitif, rasional dan tradisional. Di Indonesia, hierarki ini mewujud dalam politik ruang dan ekonomi: Jawa menjadi pusat modernitas, sementara daerah luar diperlakukan sebagai frontier pembangunan; kota menjadi simbol kemajuan, sementara desa menjadi beban. Pembangunan, dengan demikian, mereproduksi struktur kolonial di bawah nama nasionalisme.

Paradigma pembangunan juga berakar pada ide pertumbuhan tanpa batas — logika yang telah menyebabkan krisis ekologis global. Sejak 1970-an, para ekonom ekologis seperti Herman Daly (1996) dan Nicholas Georgescu-Roegen (1971) mengingatkan bahwa bumi memiliki batas, sementara kapitalisme tidak. Pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus bergantung pada ekstraksi energi dan material yang tak dapat diperbarui, menciptakan kerusakan ekologis yang mengancam kehidupan. Namun, politik modernitas Indonesia terus menolak kenyataan ini. Setiap pemerintahan menegaskan bahwa "pertumbuhan adalah kebutuhan," bahkan ketika lahan, air, dan udara sudah jenuh oleh beban industri. Dengan demikian, krisis ekologis bukan sekadar akibat teknis pembangunan yang salah arah, tetapi akibat logika epistemik yang menganggap alam sebagai objek yang dapat dikelola tanpa batas.

Media Nusa Creative

Melampaui pembangunan berarti menantang fondasi ontologis dan epistemologisnya — membayangkan dunia di mana kemajuan tidak lagi diukur oleh pertumbuhan, tetapi oleh keberlanjutan kehidupan. Dalam kerangka ini, ekonomi tidak lagi dipahami sebagai sistem produksi nilai abstrak, melainkan sebagai jaringan timbal balik antara manusia, komunitas, dan ekosistem. Seperti ditulis Polanyi (1944), sebelum ekonomi dipisahkan dari kehidupan sosial, ia adalah bagian dari praktik timbal balik (*reciprocity*) dan gotong royong. Kapitalisme dan pembangunan modern memisahkan keduanya, mengubah relasi sosial menjadi transaksi, dan kerja menjadi komoditas. Karena itu, melampaui pembangunan berarti mendemarketisasi kehidupan — mengembalikan ekonomi ke dalam domain sosial dan ekologisnya.

Alternatif terhadap paradigma pertumbuhan dapat ditemukan dalam praktik yang telah lama hidup di masyarakat: koperasi, gotong royong, arisan, dan komunitas solidaritas. Dalam wacana kontemporer, bentuk-bentuk ini dikenal sebagai ekonomi solidaritas (Laville, 2010; Gibson-Graham, 2006) — ekonomi yang berakar pada prinsip timbal balik, perawatan, dan keadilan sosial, bukan akumulasi. Di berbagai wilayah Indonesia, ekonomi solidaritas bukan konsep baru, tetapi warisan yang terus hidup di bawah permukaan pembangunan. Jaringan petani di Kendeng, komunitas adat di Kalimantan dan Maluku, hingga pasar mama-mama di Papua menunjukkan bahwa ekonomi dapat dikelola tanpa eksploitasi.

Dalam ekonomi solidaritas, nilai tidak diukur dengan harga, tetapi dengan relasi sosial dan ekologis. Prinsip gotong royong — yang selama ini direduksi menjadi slogan nasional — sebenarnya menyimpan potensi politik radikal, ia menolak individualisme pasar dan membuka ruang untuk redistribusi yang berbasis kebutuhan. Seperti dicatat Gibson-Graham (2006), ekonomi alternatif ini tidak menunggu revolusi; ia tumbuh di sela-sela kapitalisme, menciptakan dunia kecil yang

Media Nusa Creative

berfungsi dengan logika lain. Dalam konteks Indonesia, ekonomi solidaritas bukan sekadar utopia; ia adalah praktik yang telah lama menopang masyarakat ketika negara dan pasar gagal.

Selain itu, konsep ekologi politik rakyat (Baviskar, 2003; Peluso & Watts, 2001) menawarkan kerangka untuk melihat hubungan antara perlawanan sosial dan ekologi. Ia menekankan bahwa krisis lingkungan bukan hanya persoalan teknis, tetapi persoalan politik — tentang siapa yang berkuasa atas sumber daya dan siapa yang menanggung biayanya. Di Indonesia, gerakan masyarakat adat dan petani telah mengembangkan bentuk-bentuk ekologi politik ini secara praksis: melawan tambang bukan hanya untuk tanah, tetapi untuk mempertahankan relasi ekologis yang menjadi dasar kehidupan. Dari hutan adat di Kalimantan hingga pesisir Maluku, mereka membangun bentuk *environmental citizenship* (Isin, 2012) yang menegaskan hak untuk mengatur ruang hidupnya sendiri. Dalam konteks ini, ekologi menjadi politik — politik yang berakar pada kehidupan, bukan pada pertumbuhan.

Melampaui pembangunan juga menuntut pemulihan epistemik — mengakui kembali validitas pengetahuan lokal yang telah lama disingkirkan oleh sains modern dan birokrasi pembangunan. Pengetahuan adat tentang pertanian, air, obat-obatan, dan tata ruang bukan sekadar tradisi, tetapi sistem ekologis yang terbukti berkelanjutan. Seperti ditunjukkan oleh de Sousa Santos (2014), dunia modern telah melakukan *epistemicide* — membunuh cara-cara mengetahui yang tidak sesuai dengan rasionalitas Barat. Di Indonesia, kolonialisme epistemik ini diteruskan oleh negara nasional melalui sistem pendidikan yang menganggap modernitas sebagai satu-satunya jalan menuju kemajuan.

Media Nusa Creative

Kini, di tengah krisis iklim dan sosial, pengetahuan lokal justru menjadi sumber inovasi. Konsep subak di Bali, lubuk larangan di Sumatra, dan sasi di Maluku adalah contoh tata kelola sumber daya berbasis komunitas yang menggabungkan etika ekologis dan spiritualitas. Pengetahuan seperti ini tidak melihat manusia sebagai penguasa alam, tetapi sebagai bagian darinya. Escobar (2018) menyebutnya *designs for the pluriverse* — cara mendesain kehidupan yang menghormati keberagaman ontologis dan epistemik. Dalam konteks Indonesia, pluralitas ini berarti mengakui bahwa tidak ada satu model kemajuan yang universal. Pembangunan yang benar-benar adil hanya mungkin jika ia lahir dari pengalaman, bahasa, dan kosmologi rakyat sendiri.

Dengan demikian, melampaui pembangunan bukanlah menolak kemajuan, tetapi menulis ulang maknanya. Modernitas tidak harus identik dengan industrialisasi atau urbanisasi; ia bisa berarti peningkatan kualitas kehidupan yang berakar pada solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan ekologis. Seperti gagasan Buen Vivir di Amerika Latin (Gudynas, 2011; Acosta, 2013), alternatif terhadap pembangunan tidak mengusulkan pertumbuhan tanpa batas, melainkan kehidupan yang baik dalam keseimbangan dengan alam. Prinsip ini selaras dengan nilai-nilai lokal Indonesia — *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* di Minangkabau, *Tri Hita Karana* di Bali, atau lembaga masyarakat di Papua. Semua menegaskan bahwa kesejahteraan tidak bisa diukur hanya dengan produk domestik bruto, tetapi dengan keharmonisan antara manusia, alam, dan spiritualitas.

Kritik terhadap pembangunan telah lama disuarakan oleh akademisi dan aktivis, tetapi jarang diterjemahkan menjadi politik publik. Negara masih terperangkap dalam fiksasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat terjebak dalam logika konsumsi yang dianggap sebagai tanda kemajuan. Karena itu, tantangan terbesar bukan hanya

Media Nusa Creative

membongkar ide pembangunan, tetapi membangun imajinasi baru tentang kehidupan bersama.

Escobar (2020) menulis bahwa *transition discourses* harus berangkat dari komunitas — bukan dari kebijakan teknokratik. Melampaui pembangunan berarti mempercayai kapasitas rakyat untuk menciptakan dunia mereka sendiri. Dalam konteks Indonesia, ini berarti menempatkan kembali desa, hutan, laut, dan pasar rakyat sebagai pusat ekonomi dan politik, bukan sebagai objek kebijakan. Politik pemulihan yang lahir dari bawah dapat menumbuhkan sistem ekonomi yang tidak bertumpu pada perampasan, tetapi pada perawatan, yaitu ekonomi yang memperhitungkan kebutuhan generasi masa depan, bukan laba jangka pendek.

Dengan demikian, tulisan bagian ini bukan ajakan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk memulihkan masa depan — masa depan di mana Indonesia tidak lagi menjadi laboratorium pembangunan, melainkan ruang bagi kehidupan yang beragam. Melampaui pembangunan berarti menolak narasi tunggal tentang kemajuan dan membuka ruang bagi pluralitas modernitas. Karena hanya dengan melampaui pembangunan, kita dapat benar-benar memulihkan sejarah — sejarah rakyat, alam, dan pengetahuan yang selama ini dirampas atas nama kemajuan.

Media Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Acosta, A. (2013). *The Buen Vivir: Sumak Kawsay, a New Paradigm for Development*. In M. Lang & D. Mokrani (Eds.), *Beyond Development: Alternative Visions from Latin America*. Rosa Luxemburg Stiftung.

Baviskar, A. (2003). *For a Cultural Politics of Natural Resources*. Economic and Political Weekly, 38(48), 5051–5055.

Daly, H. E. (1996). *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*. Beacon Press.

de Sousa Santos, B. (2014). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. Routledge.

Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World.* Princeton University Press.

Escobar, A. (2018). *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Duke University Press.

Escobar, A. (2020). *Pluriversal Politics: The Real and the Possible*. Duke University Press.

Georgescu-Roegen, N. (1971). *The Entropy Law and the Economic Process*. Harvard University Press.

Gibson-Graham, J. K. (2006). *A Postcapitalist Politics*. University of Minnesota Press.

Gudynas, E. (2011). Buen Vivir: Today's Tomorrow. *Development*, 54(4), 441–447.

Laville, J.-L. (2010). The Solidarity Economy: An International Movement. *International Social Science Journal*, 62(203–204), 205–213.

Media Nusa Creative

Peluso, N. L., & Watts, M. (Eds.). (2001). *Violent Environments*. Cornell University Press.

Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation*. Farrar & Rinehart.

Sachs, W. (Ed.). (1992). *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*. Zed Books.

Media Nusa Creative

16

MENGEMBALIKAN YANG DIRAMPAS

"*What has been enclosed can be reopened, what has been privatized can be reclaimed*." - David Harvey, *Rebel Cities* (2012)

"*Commons are not things we inherit; they are relations we make and remake*." - Elinor Ostrom, *Governing the Commons* (1990)

Sejarah Indonesia, seperti telah diuraikan bab sebelumnya, adalah sejarah panjang perampasan, tanah diambil alih atas nama negara, tenaga dijadikan mesin pembangunan, hutan dijadikan cadangan ekonomi, dan pengetahuan lokal dihapus oleh sains modern. Tetapi sejarah itu belum selesai. Di tengah reruntuhan modernitas dan krisis ekologis yang kian dalam, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana kita mengembalikan yang telah dirampas? Bukan sekadar mengembalikan hak milik, tetapi memulihkan relasi sosial, ekologis, dan epistemik yang telah terkoyak oleh kapitalisme dan negara pembangunan. Bab ini menawarkan sebuah arah politik pemulihan — upaya untuk membangun kembali dunia bersama (*the commons*) yang menjadi dasar kehidupan.

Dalam pandangan ekonomi modern, tanah, air, dan hutan diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi. Dalam sistem hukum Indonesia, mereka dikategorikan sebagai barang ekonomi yang tunduk pada logika hak milik dan perizinan. Namun, sebelum hukum kolonial dan nasional hadir, masyarakat di Nusantara telah hidup dengan logika berbeda. Mereka memandang alam bukan sebagai objek kepemilikan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan kolektif — *commons*,

Media Nusa Creative

ruang yang dijaga bersama dan digunakan untuk keberlanjutan bersama.

Elinor Ostrom (1990) menunjukkan bahwa *commons* bukan ruang tanpa aturan, tetapi ruang yang diatur oleh norma sosial dan etika timbal balik. Dalam masyarakat adat Indonesia, prinsip ini hidup dalam praktik sasi di Maluku, subak di Bali, lubuk larangan di Sumatra, atau pangale di Sulawesi. Semua menunjukkan sistem pengelolaan kolektif yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Namun, kolonialisme dan pembangunan modern menggantikan logika commons ini dengan rezim kepemilikan tunggal: negara dan korporasi. Akibatnya, relasi sosial yang berakar pada solidaritas berubah menjadi relasi kompetisi.

Mengembalikan yang dirampas berarti mengembalikan prinsip *commoning* — bukan hanya secara hukum, tetapi sebagai etika kehidupan bersama. Dalam konteks agraria, ini berarti melampaui konsep reforma agraria yang terbatas pada redistribusi tanah individu, menuju reforma agraria sosial-ekologis yang menempatkan tanah sebagai ruang hidup kolektif. Redistribusi tanah harus disertai dengan pengakuan terhadap tata kelola lokal, sistem produksi berkelanjutan, dan otonomi komunitas. Tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi fondasi kedaulatan pangan, budaya, dan spiritualitas.

Demikian pula dengan air dan hutan. Gerakan masyarakat di berbagai wilayah telah memperjuangkan pengelolaan berbasis komunitas. Dalam kasus gerakan air untuk rakyat di Jakarta dan Yogyakarta, warga menolak privatisasi air yang menyebabkan kenaikan tarif dan penurunan akses bagi masyarakat miskin. Di Kalimantan dan Papua, masyarakat adat memperjuangkan hak atas hutan adat yang selama ini diklaim sebagai kawasan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 yang mengakui hutan adat sebagai bukan hutan negara adalah tonggak penting, tetapi implementasinya masih menghadapi

Media Nusa Creative

resistensi dari birokrasi dan perusahaan. Pengakuan hukum tanpa pengembalian kontrol sosial hanya menciptakan *commons without commoners* — ruang bersama yang tetap dikuasai oleh logika kapital.

Tenaga manusia — terutama tenaga kerja perempuan dan buruh informal — juga merupakan *commons* yang telah dikomodifikasi. Dalam ekonomi kapitalis, kerja diartikan semata sebagai faktor produksi; padahal, kerja adalah aktivitas sosial yang menopang kehidupan. Mengembalikan tenaga yang dirampas berarti menegaskan kembali hak atas waktu dan kehidupan. Ini dapat diwujudkan melalui sistem ekonomi solidaritas: koperasi pekerja, jaminan sosial universal, dan redistribusi waktu kerja. Sebagaimana dikemukakan Federici (2018), "*to reclaim the commons is to reclaim the body and the reproduction of life*." Dalam konteks Indonesia, politik pemulihan tenaga berarti membebaskan kerja dari logika eksploitasi dan mengembalikannya ke logika perawatan.

Selain sumber daya material, yang tak kalah penting untuk dikembalikan adalah pengetahuan. Kolonialisme dan pembangunan modern telah menciptakan hierarki epistemik di mana ilmu Barat ditempatkan sebagai satu-satunya bentuk pengetahuan yang sah, sementara pengetahuan lokal, spiritualitas, dan pengalaman hidup dianggap tak ilmiah. Boaventura de Sousa Santos (2014) menyebut fenomena ini sebagai *epistemicide* — pembunuhan terhadap cara mengetahui lain.

Mengembalikan pengetahuan yang dirampas berarti membangun kembali ekologi pengetahuan (*ecology of knowledges*), di mana sains modern dan pengetahuan lokal berdialog secara setara. Ini menuntut perubahan paradigma pendidikan dan penelitian di Indonesia. Sekolah dan universitas tidak boleh lagi menjadi mesin reproduksi modernitas tunggal, tetapi menjadi ruang pembelajaran lintas

Media Nusa Creative

pengetahuan. Dalam banyak komunitas, gerakan ini sudah dimulai, adanya sekolah adat di Kalimantan dan Papua, berbagai laboratorium komunitas dan masyarakat sipil yang menggabungkan teknologi dan pengetahuan tradisional. Praktik ini menunjukkan bahwa pemulihan epistemik bukan utopia; ia sedang berlangsung di tengah rakyat.

Politik pengetahuan juga mencakup *reclaiming narrative* — menulis ulang sejarah dari perspektif mereka yang dirampas. Dalam historiografi resmi, pembangunan selalu digambarkan sebagai proses nasional yang heroik; sementara perlawanan rakyat direduksi menjadi gangguan. Mengembalikan yang dirampas berarti juga mengembalikan suara mereka yang dibungkam: petani yang kehilangan tanah, perempuan yang menanggung beban pembangunan, masyarakat adat yang dihapus dari peta. Pengetahuan bukan hanya alat untuk memahami dunia, tetapi untuk mengubahnya. Dalam politik pemulihan, menulis ulang sejarah adalah tindakan dekolonial.

Mengembalikan yang dirampas bukan sekadar agenda moral, tetapi proyek politik yang konkret. Nancy Fraser (2000) mengajukan tiga pilar keadilan: *redistribution, recognition, and representation*. Dalam konteks Indonesia, ketiganya dapat diterjemahkan sebagai politik pemulihan: redistribusi sumber daya, pengakuan terhadap keragaman pengetahuan dan identitas, serta rekonstruksi kelembagaan yang memungkinkan rakyat berpartisipasi penuh dalam menentukan masa depannya.

Redistribusi berarti mengembalikan akses terhadap sumber daya yang selama ini dimonopoli oleh negara dan korporasi. Ini mencakup tanah, hutan, air, energi, dan waktu kerja. Namun redistribusi tidak cukup tanpa pengakuan (*recognition*) — pengakuan terhadap hak masyarakat adat, perempuan, dan komunitas lokal atas cara hidup dan pengetahuan mereka sendiri. Tanpa pengakuan, redistribusi hanya mengulang

Media Nusa Creative

dominasi dalam bentuk baru. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi (*reconstruction*): membangun ulang sistem hukum, pendidikan, dan ekonomi agar tidak lagi berpusat pada akumulasi, tetapi pada keberlanjutan.

Dalam konteks hukum agraria, misalnya, politik pemulihan berarti menafsir ulang konsep "hak menguasai negara" menjadi "hak mengurus untuk rakyat." Negara bukan pemilik, tetapi penjaga *commons*. Dalam kebijakan ekonomi, pemulihan berarti memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas dan menolak dominasi korporasi transnasional. Dalam pendidikan, pemulihan berarti mengembalikan kurikulum kepada keberagaman lokal, bahasa ibu, dan pengalaman hidup. Politik pemulihan, dengan demikian, bukan program teknokratis, tetapi revolusi epistemik dan etis — cara baru melihat dunia dan diri kita di dalamnya.

Mengembalikan yang dirampas bukan sekadar mengembalikan masa lalu; ini adalah tentang menciptakan masa depan. Dunia yang dipulihkan bukan dunia tanpa konflik, tetapi dunia yang menyadari keterhubungan antara manusia, alam, dan pengetahuan. Dalam dunia seperti itu, ekonomi bukan lagi arena kompetisi, melainkan ruang perawatan; hukum bukan instrumen kekuasaan, melainkan penjaga keseimbangan; pengetahuan bukan monopoli universitas, melainkan hasil dialog lintas pengalaman.

David Harvey (2012) menyebut kota sebagai ruang utama *commoning* — tempat di mana solidaritas dan kehidupan bersama dapat dipulihkan. Dalam konteks Indonesia, ruang ini bisa berarti desa, kampung, atau komunitas adat. Setiap praktik berbagi benih, menanam kembali hutan, atau menulis sejarah lokal adalah tindakan politik yang menentang logika perampasan global. Di tengah krisis iklim dan ketimpangan sosial, politik pemulihan bukan pilihan moral semata, tetapi satu-satunya jalan menuju keberlangsungan.

Media Nusa Creative

Karena pada akhirnya, sejarah Indonesia tidak hanya perlu diingat sebagai sejarah perampasan, tetapi juga sejarah pemulihan. Pemulihan bukan kembalinya yang lama, melainkan penciptaan ulang yang adil — dunia di mana yang dirampas dapat kembali berbicara, bekerja, dan hidup dalam martabat. Itulah tugas generasi kita: bukan sekadar melanjutkan pembangunan, tetapi mengembalikannya kepada kehidupan.

Media Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Bakker, K. (2007). The “Commons” Versus the “Commodity”: Alter-globalization, Anti-privatization and the Human Right to Water in the Global South. *Antipode*, 39(3), 430–455.

Federici, S. (2018). *Re-Enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons*. PM Press.

Fraser, N. (2000). *Rethinking Recognition*. New Left Review, 3, 107–120.

Harvey, D. (2012). *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*. Verso.

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

de Sousa Santos, B. (2014). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide.* Routledge.

Media Nusa Creative

Media Nusa Creative

17

MENULIS SEJARAH NASIONAL

"*History is written by the victors — but it can be rewritten by those who remember*." - Howard Zinn, *A People's History of the United States* (1980)

"*Selama perampasan masih disebut pembangunan, sejarah Indonesia belum selesai ditulis*." - Anonim

Menulis sejarah selalu merupakan tindakan politik. Ia bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang siapa yang diberi suara untuk menentukan makna masa kini dan arah masa depan. Dalam konteks Indonesia, sejarah nasional yang kita kenal hari ini sebagian besar lahir dari pandangan negara, disusun untuk mengabsahkan proyek pembangunan dan modernisasi. Sejak Orde Baru, sejarah diinstitusionalisasi sebagai narasi tunggal tentang kemajuan nasional — dari kolonialisme ke kemerdekaan, dari keterbelakangan ke pembangunan, dari chaos ke stabilitas. Namun, di balik kisah itu tersembunyi sejarah lain, sejarah mereka yang dirampas atas nama kemajuan.

Narasi sejarah resmi menempatkan negara sebagai subjek utama dan rakyat sebagai objek pasif. Ia memusatkan perhatian pada tokoh, peristiwa besar, dan pembangunan infrastruktur, sementara suara petani, buruh, masyarakat adat, perempuan, dan korban kekerasan negara dihapus atau direduksi menjadi catatan kaki. Hal ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari politik pengetahuan. Michel-Rolph Trouillot (1995) menyebutnya *silencing the past* — proses di mana kekuasaan menentukan apa yang layak diingat dan apa yang dilupakan. Dalam

Media Nusa Creative

historiografi Orde Baru, misalnya, peristiwa 1965 ditulis sebagai kemenangan negara melawan kekacauan, bukan sebagai tragedi genosida politik terhadap ratusan ribu warga negara. Pembangunan Orde Baru digambarkan sebagai pencapaian nasional, tanpa menyinggung perampasan tanah, hutan, dan tenaga kerja yang menopangnya.

Menulis ulang sejarah nasional berarti mengguncang fondasi epistemik ini. Ia bukan sekadar upaya akademik, tetapi juga tindakan dekolonial — upaya untuk mengembalikan sejarah kepada rakyat. Seperti dinyatakan Walter Mignolo (2011), *decoloniality is about delinking from the colonial matrix of power*, yaitu memutus hubungan dengan sistem pengetahuan dan representasi yang menempatkan Barat dan modernitas sebagai pusat. Dalam konteks Indonesia, kolonialitas itu kini hidup dalam bentuk lain: nasionalisme pembangunan. Melalui narasi "kemajuan," negara terus mereproduksi logika kolonial yang sama — menjadikan rakyat, tanah, dan alam sebagai objek yang harus "diperbaiki" agar sesuai dengan visi modernitas.

Oleh karena itu, menulis sejarah nasional yang baru bukan sekadar mengganti nama-nama pelaku atau memperluas daftar tokoh, tetapi mengubah subjek sejarah itu sendiri. Subjek sejarah bukan lagi negara atau elite, melainkan rakyat — mereka yang mengalami perampasan, bekerja, melawan, dan membangun kehidupan di sela-sela kekuasaan. Seperti yang dilakukan Howard Zinn (1980) dalam *A People's History of the United States*, sejarah rakyat tidak menolak fakta-fakta besar, tetapi menata ulang perspektif: dari bawah ke atas, dari mereka yang dirugikan oleh sistem, bukan yang diuntungkan olehnya.

Menulis sejarah dari perspektif rakyat berarti juga menolak logika linear tentang "kemajuan." Dalam historiografi pembangunan, sejarah digambarkan sebagai garis lurus: dari keterbelakangan menuju modernitas, dari desa menuju kota, dari pertanian menuju industri. Tetapi, bagi rakyat yang

Media Nusa Creative

kehilangan tanah atau hutan, modernitas justru berarti kehilangan masa depan. David Harvey (2003) mengingatkan bahwa akumulasi kapital selalu berjalan melalui *dispossession* — perampasan yang dilegalkan. Jika pembangunan Indonesia adalah mesin pertumbuhan, maka bahan bakarnya adalah tanah, tenaga, dan alam rakyat. Dalam logika ini, setiap tahap "kemajuan" adalah tahap baru perampasan. Karena itu, menulis sejarah dari perspektif rakyat berarti membalik logika pembangunan menjadi logika perampasan.

Sejarah nasional yang baru juga harus menempatkan kekerasan sebagai bagian konstitutif, bukan penyimpangan. Dari pembantaian Banda (1621) hingga operasi militer di Aceh dan Papua, kekerasan selalu menjadi mekanisme utama untuk memaksakan tatanan ekonomi-politik baru. Namun, historiografi resmi cenderung menutupinya dengan bahasa "penertiban," "pembangunan," atau "stabilisasi." Seperti diungkap Achille Mbembe (2003), kekuasaan kolonial dan pascakolonial beroperasi melalui *necropolitics* — kemampuan untuk menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang boleh mati atas nama kemajuan. Dalam konteks Indonesia, kekerasan pembangunan menandai kelanjutan kolonialisme dengan wajah nasional: jalan tol dan bendungan dibangun di atas tanah yang diambil paksa, tambang dan perkebunan dibuka di wilayah adat tanpa persetujuan, kota diperluas dengan menggusur kampung. Menulis sejarah berarti menamai ulang kekerasan itu — bukan sebagai "biaya pembangunan," tetapi sebagai inti dari politik modernitas.

Namun menulis sejarah rakyat tidak cukup hanya mengungkap penderitaan; ia juga harus menghidupkan kembali agensi dan imajinasi. Rakyat bukan sekadar korban, tetapi juga pelaku sejarah yang membangun alternatif kehidupan di tengah represi. Dalam setiap periode perampasan selalu muncul bentuk-bentuk perlawanan, mulai dari pemberontakan petani di Banten dan Tondano pada abad ke-19, gerakan tani dan

Media Nusa Creative

buruh tahun 1950-an, perlawanan perempuan terhadap proyek pembangunan di Kendeng dan Kulon Progo, hingga gerakan masyarakat adat yang menuntut pengakuan hutan-tanah mereka di abad ke-21. Semua ini adalah bukti bahwa sejarah rakyat adalah sejarah keberlanjutan perjuangan — sejarah *commoning* dalam arti yang paling luas, yaitu usaha kolektif untuk memulihkan dunia yang dirampas (Federici, 2018).

Menulis sejarah nasional dari perspektif rakyat berarti menjadikan sejarah sebagai alat kesadaran, bukan glorifikasi. Ia tidak bertujuan untuk merayakan bangsa, melainkan untuk memahami bagaimana bangsa ini dibentuk melalui konflik, dominasi, dan perlawanan. Sejarah seperti ini tidak mencari pahlawan tunggal, tetapi menunjukkan bahwa pahlawan sejati adalah rakyat yang terus bertahan dalam sistem yang menindasnya. Paulo Freire (1970) menyebutnya *conscientization* — proses pembebasan melalui kesadaran kritis. Dengan menulis sejarah secara kritis, kita tidak hanya memahami masa lalu, tetapi juga belajar untuk membayangkan masa depan yang lain.

Dalam kerangka ini, sejarah nasional bukan lagi arsip negara, tetapi ruang politik: ruang untuk menegosiasikan kembali makna kebangsaan, pembangunan, dan keadilan. Ia mengajarkan bahwa nasionalisme sejati tidak diukur dari besarnya proyek infrastruktur, tetapi dari kemampuan bangsa untuk menjaga kehidupan rakyatnya. Nasionalisme yang dibangun di atas perampasan adalah nasionalisme tanpa jiwa; sementara sejarah yang jujur adalah sejarah yang berani mengakui luka dan belajar darinya. Seperti ditulis Benedict Anderson (1991), bangsa adalah *imagined community* — ia bisa dibayangkan ulang, ditulis ulang, dan dihidupkan ulang.

Menulis sejarah rakyat juga berarti menulis ulang bahasa pembangunan. Bahasa bukan sekadar alat deskripsi, tetapi perangkat kekuasaan. Istilah seperti “tanah negara,” “objek

Media Nusa Creative

vital," "masyarakat terbelakang," atau "investasi strategis" telah menjadi instrumen yang menutupi kekerasan material di balik modernitas (Scott, 1998). Karena itu, tugas sejarah kritis adalah membongkar eufemisme itu dan menggantinya dengan bahasa kehidupan: bukan "pembangunan," tetapi "perampasan"; bukan "kemajuan," tetapi "ketidakadilan"; bukan "proyek nasional," tetapi "politik eksklusi." Hanya dengan mengganti kata, kita dapat mengubah cara kita melihat dunia — dan akhirnya, mengubah dunia itu sendiri.

Akhirnya, menulis sejarah nasional bukan hanya tugas sejarawan, tetapi tanggung jawab semua warga. Sejarah adalah ruang bersama (*commons of memory*) yang harus dijaga, diperdebatkan, dan terus diperbaharui. Setiap kisah lokal, setiap perjuangan komunitas, setiap arsip keluarga adalah bagian dari mosaik sejarah bangsa yang lebih luas. Dalam era digital, ruang-ruang baru untuk menulis sejarah terbuka: arsip komunitas, peta partisipatif, dokumentasi warga, dan karya seni yang memulihkan ingatan. Sejarah tidak lagi milik lembaga resmi, tetapi milik mereka yang berani mengingat dan menulis.

Karena itu, seruan terakhir dari buku ini adalah seruan etis sekaligus politis: Selama perampasan masih disebut pembangunan, sejarah Indonesia belum selesai ditulis. Menulis sejarah nasional berarti menulis ulang arah bangsa — dari sejarah penguasaan menuju sejarah pemulihan, dari pembangunan menuju kehidupan. Ia menuntut keberanian untuk melihat masa lalu tanpa romantisasi, masa kini tanpa ilusi, dan masa depan tanpa dogma. Sejarah yang dipulihkan bukan sejarah yang lengkap, tetapi sejarah yang terbuka; terbuka bagi suara, bagi perlawanan, dan bagi kemungkinan dunia yang lebih adil.

Media Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.

Federici, S. (2018). *Re-Enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons*. PM Press.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.

Mbembe, A. (2003). *Necropolitics*. Public Culture, 15(1), 11–40.

Mignolo, W. D. (2011). *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*. Duke University Press.

Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press.

Trouillot, M.-R. (1995). *Silencing the Past: Power and the Production of History.* Beacon Press.

Zinn, H. (1980). *A People's History of the United States*. Harper & Row.

Media Nusa Creative

EPILOG: TENTANG INGATAN DAN PENGHAPUSAN

"*Forgetting is not absence; it is an operation of power*."
Michel-Rolph Trouillot, *Silencing the Past* (1995)

"*Yang hilang bukan hanya hutan, tanah, dan air, tapi juga cara kita memandang dunia*."
Anonim

Setiap bangsa hidup di antara dua kekuatan, ingatan dan penghapusan. Yang satu berupaya mengingat agar luka masa lalu tidak berulang, yang lain bekerja diam-diam untuk menghapus, menutup, dan menormalisasi kekerasan yang pernah terjadi. Sejarah Indonesia — dari kolonialisme, pembangunan, hingga neoliberalisme — tidak hanya ditandai oleh perampasan material, tetapi juga oleh penghapusan makna. Tanah dapat direbut kembali, hutan bisa ditanam ulang, tetapi ketika cara pandang terhadap dunia telah dirampas, maka seluruh horizon kemungkinan hidup ikut hilang.

Buku ini dimulai dengan satu premis sederhana namun mendasar: bahwa pembangunan dan modernitas Indonesia dibangun di atas fondasi perampasan. Dari tanah Banda yang dijarah VOC, hutan Kalimantan yang digunduli atas nama kemajuan, hingga tubuh perempuan yang dijadikan tenaga murah dalam pabrik global, seluruh proyek "kemajuan" Indonesia dibangun dengan menyingkirkan sebagian rakyatnya. Namun epilog ini bukan sekadar pengulangan kritik, melainkan sebuah refleksi, mengapa kita perlu terus menulis sejarah perampasan itu? Apa maknanya bagi masa kini — bagi bangsa yang mengaku telah modern, demokratis, dan maju?

Menulis sejarah perampasan bukan sekadar membuka arsip, catatan, dan kisah lampau tetapi melawan penghapusan. Sebab

Mega Nusa Creative

kekuasaan tidak hanya menindas melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui kendali atas ingatan kolektif. Michel Foucault (1977) mengingatkan bahwa kekuasaan bekerja melalui produksi kebenaran, ia menentukan apa yang dapat dikatakan, siapa yang dapat berbicara, dan apa yang layak diingat. Dalam konteks Indonesia, kekuasaan Orde Baru telah mengajarkan seluruh generasi untuk melupakan, melupakan kekerasan 1965, melupakan tanah-tanah yang diambil untuk proyek pembangunan, melupakan nasib rakyat kecil yang disingkirkan dari sejarah resmi. Negara membangun bukan hanya jalan, gedung-gedung dan bendungan, tetapi juga arsitektur amnesia.

Kita hidup dalam masyarakat yang dibentuk oleh penghapusan sistematis terhadap ingatan kolektif. Buku sejarah sekolah masih mengulang narasi pembangunan sebagai keberhasilan nasional, media menyiarkan kemajuan infrastruktur tanpa menyinggung siapa yang digusur, dan kebijakan publik menulis ulang penderitaan rakyat menjadi "partisipasi pembangunan." Penghapusan bekerja bukan hanya melalui pelarangan, tetapi juga melalui normalisasi, ketika perampasan tidak lagi terlihat karena ia telah menjadi kebiasaan, bahasa, bahkan moralitas. Inilah yang disebut David Harvey (2003) sebagai *consent to coercion* yakni ketika kekuasaan tak lagi memaksa, tetapi diterima sebagai hal yang wajar.

Ingatan menjadi berbahaya karena ia mengancam stabilitas tatanan itu. Mengingat berarti menolak normalisasi kekerasan. Mengingat berarti menolak narasi bahwa pembangunan adalah takdir. Dalam setiap perjuangan rakyat, dari petani Pulau Padang yang menjahit mulut, Petani Kendeng yang "mengecor" kaki mereka, hingga masyarakat adat/tempatan yang mempertahankan hutan-tanah mereka di dari Sumatera hingga Papua, ada satu hal yang sama: mereka menolak untuk melupakan. Mereka menolak untuk dijadikan masa lalu, menolak untuk dipinggirkan dari masa depan. Dengan demikian, ingatan menjadi bentuk tertinggi dari perlawanan.

Media Nusa Creative

Dalam konteks ini, penulisan sejarah rakyat bukan sekadar proyek akademik, tetapi tindakan politis yang mendasar. Menulis berarti menandai kembali ruang-ruang yang dihapus; mengembalikan pengalaman yang selama ini disisihkan oleh narasi besar pembangunan. Howard Zinn (1980) menulis bahwa *the historian's task is not to celebrate the nation but to expose its silences*. Menulis sejarah rakyat Indonesia berarti menuliskan kembali wajah bangsa ini dari sudut pandang mereka yang dihapus, para buruh yang diekploitasi tenaga dan hidupnya, masyarakat adat yang diusir dari hutan-tanah, perempuan yang tubuhnya menjadi medan akumulasi kapital, dan warga kota yang kampungnya digusur atas nama tata ruang.

Namun, mengingat bukan sekadar soal nostalgia, ia adalah tindakan politik pembebasan. Paulo Freire (1970) menyebutnya *conscientization*, proses sadar kritis yang memungkinkan rakyat memahami hubungan antara pengalaman mereka dan struktur penindasan yang lebih luas. Dengan mengingat perampasan, kita memahami bahwa kemiskinan bukan nasib, tetapi hasil dari kebijakan, bahwa "keterbelakangan" bukan kondisi alami, tetapi konsekuensi dari pembangunan yang eksklusif. Ingatan seperti ini mengubah cara kita memahami dunia, dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek sejarah.

Dalam perjalanan menulis buku ini, saya melihat bahwa penghapusan tidak hanya terjadi di buku-buku sejarah atau kebijakan, tetapi juga di dalam diri kita sendiri. Kita tumbuh dalam sistem yang menormalisasi perampasan sebagai "kemajuan." Kita diajarkan untuk mengagumi pencapaian ekonomi, tanpa bertanya siapa yang membayarnya. Kita merayakan pembangunan kota sambil melupakan desa yang dikosongkan. Kita menyebut hutan yang dijadikan perkebunan sebagai "produktif," tanpa menyadari bahwa produktivitas itu berarti kematian bagi ekosistem dan masyarakat

Media Nusa Creative

adat/tempatan. Inilah bentuk terdalam dari *dispossession*, ketika cara kita memandang dunia telah dijajah oleh logika kapital dan modernitas.

Arturo Escobar (2018) menulis bahwa tantangan terbesar bagi dunia pascakolonial bukan hanya membongkar struktur ekonomi, tetapi *re-imagining the world*. Dunia yang kini kita huni telah kehilangan keseimbangan karena kita kehilangan cara untuk memandangnya secara relasional, sebagai jaringan kehidupan, bukan sekadar sumber daya. Modernitas, dengan klaim rasionalitas dan kemajuannya, telah memutuskan hubungan antara manusia dan dunia di sekelilingnya. Ia mengubah bumi menjadi pabrik, air menjadi komoditas, tubuh menjadi tenaga kerja, dan waktu menjadi uang. Maka, tugas kita bukan hanya mengingat perampasan itu, tetapi juga mengembalikan cara pandang yang dirampas.

Ingatan kolektif memiliki kekuatan untuk membangun kembali dunia yang hancur. Dalam masyarakat adat, ingatan tidak pernah terpisah dari ruang, ia hidup dalam ritual, cerita rakyat, dan praktik sehari-hari. Ketika masyarakat Dayak menanam kembali hutan mereka, mereka tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam ingatan — menghidupkan kembali relasi sosial dan spiritual yang telah dihapus oleh proyek *logging*. Ketika perempuan di Kendeng menolak pabrik semen, mereka tidak hanya menolak pembangunan, tetapi juga mempertahankan cara memandang tanah sebagai ibu, bukan sebagai komoditas. Dalam tindakan-tindakan ini, ingatan menjadi praksis pemulihan, bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi menciptakan masa depan yang berbeda.

Menulis sejarah perampasan berarti juga menulis sejarah pemulihan. Seluruh bab dalam buku ini, dari kolonialisme hingga neoliberal, menunjukkan satu pola berulang, kekuasaan selalu berusaha menguasai melalui perampasan —terhadap tanah, tenaga, dan pengetahuan. Namun di setiap masa, selalu

Media Nusa Creative

ada pula upaya untuk mengembalikan: reformasi agraria, gerakan masyarakat adat, koperasi rakyat, sekolah alternatif, dan bentuk-bentuk *commoning* yang membangun dunia bersama di luar logika kapital. Itulah mengapa sejarah Indonesia tidak pernah sepenuhnya sejarah kekalahan. Ia juga sejarah daya hidup, sejarah imajinasi, dan sejarah keberanian untuk bermimpi di tengah reruntuhan modernitas.

Menulis tentang perampasan berarti pula mengakui keterlibatan kita di dalamnya. Tidak ada posisi yang netral dalam sejarah ini. Sebagai penulis, peneliti, atau warga negara, kita semua hidup dalam dunia yang dibangun dari hasil perampasan, rumah kita berdiri di atas tanah yang dulu milik komunitas lain, listrik kita berasal dari sumber energi yang merusak ekosistem, pakaian kita dijahit oleh buruh yang tak pernah kita kenal. Kesadaran ini seharusnya tidak melahirkan rasa bersalah pasif, tetapi tanggung jawab aktif, tanggung jawab untuk mengubah cara kita hidup dan berpikir.

Boaventura de Sousa Santos (2014) menyebutnya *epistemologies of the South* — pengetahuan yang lahir dari pengalaman penderitaan dan perjuangan rakyat di belahan dunia Selatan. Pengetahuan ini tidak mencari universalitas, tetapi keberagaman; tidak berpretensi netral, tetapi berpihak pada kehidupan. Dalam konteks Indonesia, epistemologi Selatan berarti belajar kembali dari rakyat: dari kebijaksanaan petani, pengetahuan adat, solidaritas buruh, dan spiritualitas lokal. Mengingat perampasan berarti membuka diri terhadap bentuk-bentuk pengetahuan yang selama ini disingkirkan oleh sains modern dan birokrasi pembangunan.

Epilog ini juga merupakan undangan untuk melanjutkan perdebatan dan penulisan. Buku ini tidak dimaksudkan untuk menutup diskusi, melainkan membukanya. Setiap bab hanyalah fragmen dari sejarah panjang yang belum selesai. Masih banyak wilayah yang belum digali: bagaimana politik utang

Media Nusa Creative

menciptakan bentuk baru perampasan? Bagaimana algoritma dan data menjadi frontier baru kapitalisme di abad ke-21? Bagaimana kota-kota Indonesia menjadi ruang *dispossession* digital — di mana perhatian, waktu, dan emosi rakyat dijadikan komoditas? Sejarah perampasan kini tidak lagi hanya berlangsung di tanah dan hutan, tetapi juga di ruang maya, di mana data menjadi bentuk baru dari kapital (Zuboff, 2019). Karena itu, perjuangan untuk mengembalikan yang dirampas harus terus diperluas, dari dunia material ke dunia digital, dari ruang ekonomi ke ruang kesadaran.

Namun, di balik seluruh kompleksitas teori dan sejarah, ada satu hal yang paling mendasar bahwa ingatan adalah syarat kemanusiaan. Ketika kita kehilangan kemampuan untuk mengingat, kita kehilangan orientasi moral terhadap dunia. Mengingat perampasan berarti mengingat bahwa dunia ini pernah — dan bisa kembali — dijalankan atas dasar saling ketergantungan, bukan dominasi. Mengingat berarti percaya bahwa sejarah dapat ditulis ulang, bahwa kehidupan dapat dipulihkan. Dan karena itu, menulis sejarah perampasan bukan hanya tugas akademik, melainkan tindakan etis untuk memulihkan kemanusiaan kita yang dirampas oleh modernitas.

Akhirnya, epilog ini adalah pengakuan bahwa menulis sejarah Indonesia berarti juga menulis sejarah diri kita sendiri — tentang bagaimana kita menjadi bangsa melalui luka, dan bagaimana kita bisa sembuh melalui ingatan. Setiap kali kita menyebut kata “kemajuan,” marilah kita bertanya: kemajuan bagi siapa, dan dengan harga apa? Selama perampasan masih disebut pembangunan, maka sejarah Indonesia belum selesai ditulis. Dan tugas kita bukan hanya menulis kembali, tetapi membuka kembali — membuka arsip yang dikunci, membuka ruang yang ditutup, membuka masa depan yang selama ini dianggap mustahil.

Media Nusa Creative

Karena yang hilang dari Indonesia bukan hanya hutan, tanah, dan air, tetapi juga cara kita memandang dunia. Dan mungkin, dengan mengingat, kita bisa menemukannya kembali.

Media Nusa Creative

DAFTAR PUSTAKA

Escobar, A. (2018). *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Duke University Press.

Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.

Santos, B. de S. (2014). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. Routledge.

Trouillot, M.-R. (1995). *Silencing the Past: Power and the Production of History.* Beacon Press.

Zinn, H. (1980). *A People's History of the United States*. Harper & Row.

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

Media Nusa Creative

KATA PENUTUP:

MENULIS DARI RERUNTUHAN

Kami menulis buku ini bukan dari menara gading, tetapi dari reruntuhan — reruntuhan hutan yang telah hilang, reruntuhan kampung yang digusur, reruntuhan bahasa yang tak lagi diucapkan, dan reruntuhan imajinasi kita tentang dunia yang adil. Dalam reruntuhan itulah kami menemukan bahwa menulis bukan sekadar upaya intelektual, melainkan bentuk kecil dari perlawanan; melawan penghapusan, melawan amnesia yang dipelihara negara, melawan wacana pembangunan yang terus menyembunyikan luka.

Setiap bab buku ini adalah usaha untuk menamai kembali apa yang selama ini disembunyikan oleh kata "kemajuan." Sebab, di balik jalan raya dan gedung tinggi, ada tanah yang diambil, tenaga yang diperas, dan kehidupan yang dikorbankan. Kami menulis bukan untuk menolak pembangunan, tetapi untuk membongkar logika yang membuat pembangunan menjadi perampasan. Karena selama pembangunan berdiri di atas penderitaan, ia bukan kemajuan, melainkan kelanjutan dari kolonialisme dengan bahasa baru.

Menulis dari posisi ini berarti mengakui keberpihakan, berpihak pada mereka yang kehilangan, yang dihapus dari peta, yang dianggap tidak rasional, tidak modern, atau tidak relevan. Inilah posisi yang tak populer dalam dunia akademik yang menuntut objektivitas; tetapi bagi kami, objektivitas yang membisu terhadap ketidakadilan hanyalah bentuk lain dari kolusi. Menulis dengan berpihak bukan berarti menutup diri dari kompleksitas, melainkan menolak untuk netral di hadapan kekuasaan.

Mega Nusa Creative

Kami menyadari bahwa buku ini tidak menawarkan jawaban final. Ia tidak menutup, tetapi membuka. Membuka kemungkinan untuk membaca ulang sejarah Indonesia dengan cara yang lebih jujur; membuka jalan bagi percakapan antara teori dan pengalaman, antara sejarah besar dan kisah kecil. Karena sejatinya, pengetahuan bukan milik universitas atau lembaga, tetapi milik mereka yang hidup dan berjuang. Setiap perbincangan di warung kopi, setiap cerita dari petani, setiap arsip keluarga adalah bagian dari pengetahuan yang membentuk bangsa ini.

Menulis Sejarah Indonesia, Sejarah Perampasan adalah cara kami menyusun kembali kepingan yang tercerai — agar kita tak hanya mengingat, tetapi juga memahami apa yang telah hilang, dan mengapa ia bisa hilang. Ini bukan proyek nostalgia, tetapi upaya untuk membangun masa depan yang lain: masa depan di mana pembangunan tidak lagi berarti perampasan, dan kemajuan tidak lagi menuntut pengorbanan.

Kami berharap buku ini menjadi jembatan antara teori dan kenyataan, antara luka dan keberanian, antara ingatan dan tindakan. Karena di dunia yang terus berubah cepat, kita membutuhkan bukan hanya pembangunan, tetapi pemulihan — terhadap tanah, terhadap sesama, dan terhadap diri kita sendiri.

Dan jika ada satu pesan yang ingin Kami tinggalkan di halaman terakhir ini, maka itu adalah ini:

Selama kita masih mampu mengingat, menulis, dan berbicara, maka sejarah belum selesai. Ia selalu dapat ditulis ulang — dari reruntuhan, untuk kehidupan.

Media Nusa Creative

TENTANG PENULIS

Hidayatullah Rabbani, Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saat ini sedang belajar bidang Sejarah politik ekonomi lingkungan.
Surel: *hidayatullahrabbani@gmail.com*

Mei Suciati, Peneliti di Pusat Media dan Demokrasi - **Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Fokus pada kajian** studi Media, Politik dan Ruang Publik Digital Indonesia. Saat ini, ia terlibat dalam proyek riset kolaboratif bersama Universitas Diponegoro (UNDIP), KILTV, dan Monash University yang mengeksplorasi hubungan antara media dan praktik demokrasi. Surel: *meisuci2000@gmail.com.*

Media Nusa Creative